



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM *ALTERNATIVE  
DEVELOPMENT* ALIH FUNGSI LAHAN GANJA DI MUKIM  
LAMTEUBA, KEC. SEULIMEUM, KAB. ACEH BESAR, NAD**

**TESIS**

**AGUNG SUSENO**

**0906655364**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
SALEMBA  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM *ALTERNATIVE DEVELOPMENT* ALIH FUNGSI LAHAN GANJA DI MUKIM LAMTEUBA, KEC. SEULIMEUM, KAB. ACEH BESAR, NAD**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi (MA) dalam bidang Administrasi dan Kebijakan Publik**

**AGUNG SUSENO**

**0906655364**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
SALEMBA  
JUNI 2012**

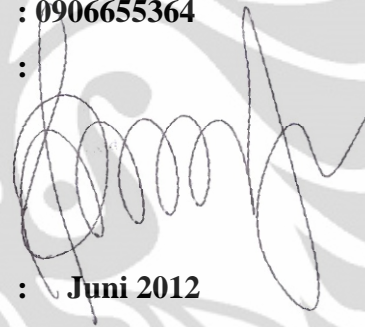
## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk,  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Agung Suseno**

**NPM : 0906655364**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : Juni 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Agung Suseno  
NPM : 0906655364  
Program Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Evaluasi Perencanaan Program *Alternative Developemnt* Alih Fungsi Lahan Ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi (MA) pada Program Studi Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

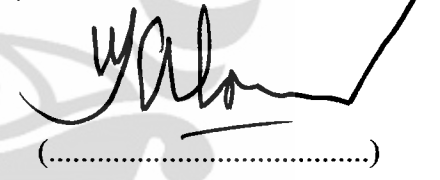
### DEWAN PENGUJI

**Pembimbing** : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA  
NUP. 090903274



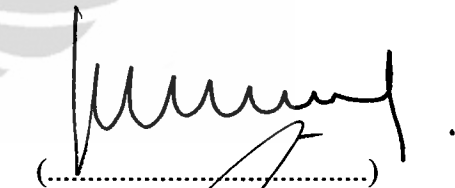
(.....)

**Penguji** : Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc  
NIP. 195703021988071001



(.....)

**Ketua Sidang** : Dr. Amy Y. S. Rahayu, M.Si  
NIP. 195501301989032001



(.....)

**Sekretaris Sidang** : Lina Mitahul Jannah, M.Si  
NIP. 197301272008122002



(.....)

**Ditetapkan di : Depok**

**Tanggal : Juli 2012**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Evaluasi Perencanaan Program *Alternative Developemnt* Alih Fungsi Lahan Ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD”. Shalawat serta salam bagi Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Administrasi (MA) dalam bidang Administrasi dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Alhamdulillah, penulis bersyukur dan sangat bahagia dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

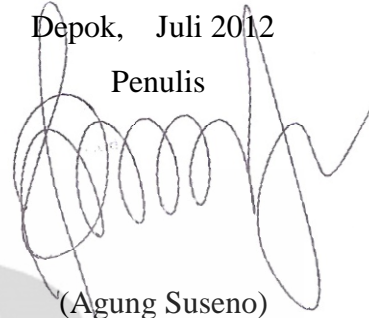
1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. sebagai Dekan FISIP Universitas Indonesia;
2. Prof. Azhar Kasim sebagai pembimbing penulis dalam melakukan penelitian ini, atas bantuannya dalam mengarahkan penulis selama proses penelitian;
3. Dr. Roy V. Salomo, Msoc.Sc selaku penguji ahli sidang proposal dan tesis penulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat menantang penulis untuk menjawabnya dengan sebaik mungkin;
4. Dr. Amy Y. S. Rahayu, M.Si (Ketua Sidang Tesis) dan Lina Miftahul Jannah, M.Si (Sekretaris Sidang Tesis), perbaikan-perbaikan yang disarankan Insya Allah sudah dikerjakan, diperbaiki, dan diselesaikan dengan baik;
5. Dosen dan Pegawai Departemen Ilmu Administrasi;
6. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun material khususnya yang tak pernah putus mendoakan penulis sejak penulisan hingga selesainya tesis ini;
7. Kakak dan kemenakan penulis;
8. Emma Hapsari yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada penulis;
9. Rekan-rekan kerja penulis yang selalu memberikan dukungan bagi penulis untuk tetap semangat dalam menulis tesis ini

10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

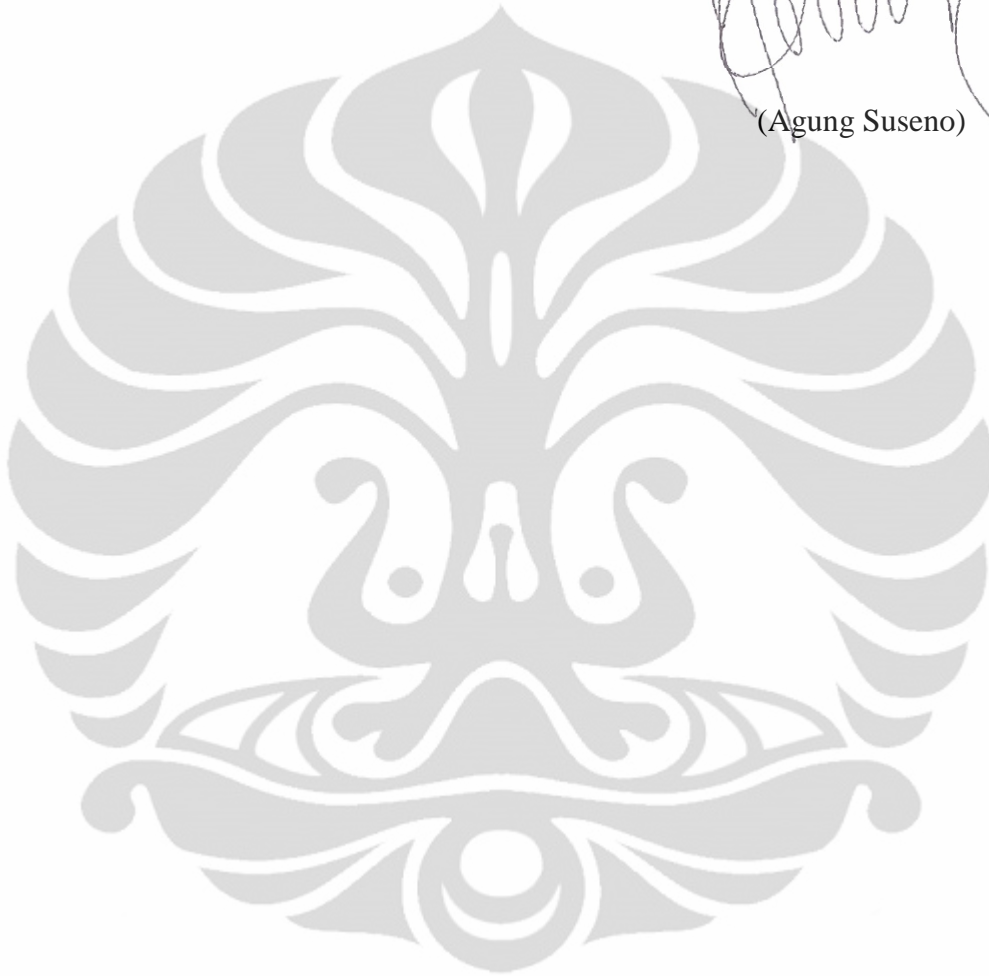
Akhir kata, semoga tesis ini dapat membawa manfaat pembangunan ilmu.

Depok, Juli 2012

Penulis



(Agung Suseno)



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Agung Suseno  
NPM : 0906655364  
Program Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

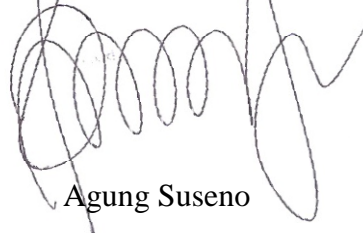
Evaluasi Perencanaan Program *Alternative Development* Alih Fungsi Lahan Ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya **selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Salemba

Pada Tanggal: Juni 2012

Yang menyatakan



Agung Suseno

## ABSTRAK

Nama : Agung Suseno,  
Program Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik  
Judul : Evaluasi Perencanaan Program *Alternative Development* Alih Fungsi Lahan Ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD

Evaluasi terhadap perencanaan program *alternative development* di Mukim Lamteuba perlu dilakukan. Program alih fungsi lahan ganja yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 belum menampakkan hasil yang nyata. Penyebabnya, perencanaan program *alternative development* periode 2006-2008 berujung kekecewaan warga Mukim Lamteuba. Tahun 2012 program tersebut direncanakan akan dilaksanakan kembali dengan menanam Jabon dan Nilam. Sebelum hal tersebut terlaksana, perlu dilakukan evaluasi atas perencanaan yang dibuat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *positivist* dengan metode observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, perencanaan program *alternative development* alih fungsi lahan ganja di Mukim Lamteuba belum berjalan dengan baik.

Kata kunci: evaluasi, perencanaan, dan program.

## ABSTRACT

Name : Agung Suseno  
Study Program : Administration and Public Policy Science  
Title : *The Evaluation of Alternative Development Planning Program of Mariyuana Land Conversion in Lamteuba Villages, Seulimeum, Aceh Besar, NAD*

*The evaluation of alternative development planning program in Lamteuba Village is necessary. The program of Mariyuana Land Conversion which has been implemented since 2006 has not showed the real results. The problem is, the planning of alternative development program period of 2006 until 2008 made a dissapointment to the Lamteuba's villagers. In 2012, that program will be plan to held back with jabon and patchouli as an alternative plants. Before that, we need to evaluate the plan that has been made. This research used positivist approach with observation methods, in-depth interviews and study of documentations. The results of this study is found that the alternative development planning program of mariyuana land conversion in Lamteuba Village is do not run well.*

*Keyword: evaluation, planning, and program.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
ABSTRAK/ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR DIAGRAM .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	15
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.4 Signifikansi Penelitian .....	16
1.5 Batasan Penelitian .....	16
1.6 Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Teori Evaluasi Program .....	19
2.1.1 Pengertian Evaluasi .....	19
2.1.2 Pengertian Evaluasi Program .....	22
2.1.3 Evaluasi Perencanaan Program .....	23
2.1.4 Bentuk Evaluasi .....	25
2.2 <i>Feasibility Studies</i> .....	27
2.3 <i>Alternative Development</i> .....	31
2.3.1 Pengertian <i>Alternative Development</i> .....	31
2.3.2 Tujuan dan Sasaran <i>Alternative Development</i> .....	34
2.3.3 Konsep Evaluasi Kerja <i>Alternative Development</i> .....	37
2.2.4 Kualitatif Evaluasi Program <i>Alternative Development</i> .....	39
2.4 Definisi Operasional .....	40
2.5 Tinjauan Pustaka .....	41
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	49
3.2 Jenis Penelitian .....	49
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.4 Narasumber/Informan .....	53
3.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	54
3.6 Hipotesa Kerja .....	55
3.7 Site Penelitian .....	55
3.8 Keterbatasan Penelitian .....	55

**BAB 4 GAMBARAN UMUM PROGRAM *ALTERNATIVE DEVELOPMENT* BNN DAN MUKIM LAMTEUBA, ACEH BESAR**

4.1 Sejarah BNN .....	57
4.2 Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN .....	60
4.3 Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN dan <i>Aternative Development</i> .....	61
4.3.1 Program Alih Fungsi Profesi Petani Penanam Ganja ke Usaha yang Legal dan Produktif .....	63
4.3.2 Program Dukungan Operasional Direktorat Pemberdayaan Alternatif yang Legal dan Produktif.....	64
4.3.3 Perencanaan Program Pemberdayaan Alternatif .....	65
4.3.4 <i>Monioring</i> /Pemantauan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Alternatif .....	66
4.3.5 Evaluasi .....	67
4.4 Periodesasi Program <i>Alternative Development</i> .....	68
4.4.1 Periode 2005-2008 .....	68
4.4.2 Periode 2009-2010 .....	75
4.4.3 Periode 2011-2012 .....	78

**BAB 5 EVALUASI PROGRAM *ALTERNATIVE DEVELOPMENT* ALIH FUNGSI LAHAN GANJA DI MUKIM LAMTEUBA, KEC. SEULIMEUM, KAB. ACEH BESAR, NAD**

5.1 <i>Assess Context</i> .....	80
5.1.1 Kualitas dari Pengetahuan Petani terkait dengan Penggunaan Teknologi.....	80
5.1.2 Tipe Aktivitas dalam Bekerja di Lahan .....	81
5.1.3 Faktor Kontribusi sebagai Pendukung terhadap Kesuksesan Partisipasi .....	83
5.1.4 Peralatan, Lahan, Lembaga Simpan Pinjam, dan Akses Perdagangan .....	84
5.2 <i>Gather Reconnaissance</i> .....	85
5.2.1 Motivasi Petani ikut serta dalam Program <i>Alternative         Development</i> .....	85
5.2.2 Jumlah Petani yang ikut serta dalam Program <i>Alternative         Development</i> .....	87
5.3 <i>Engage Stakeholder</i> .....	89
5.3.1 Kelompok Sosial Masyarakat yang Terbentuk .....	89
5.3.2 Keterlibatan Pemerintah/NGO dalam Organisasi Bentukan Warga .	90
5.3.3 Identifikasi <i>Stakeholder</i> Proses Perencanaan Program <i>Alternative         Development</i> .....	92
5.4 <i>Describe The Program</i> .....	93
5.4.1 Ganja .....	93
5.4.2 Jabon .....	102
5.4.3 Nilam .....	107
5.5 <i>Focus The Evaluation</i> .....	118
5.5.1 Keseuaian Rencana dan Jadwal Program .....	119
5.5.1.1 Program <i>Alternative Development</i> yang Sudah Dijalankan .....	121
5.5.1.2 Program <i>Alternative Development</i> yang Belum Dijalankan .....	124
5.5.2 Kesesuaian Tujuan Program .....	127
5.5.3 <i>Capacity Building</i> .....	127

**BAB 6 PENUTUP**

6.1 Simpulan .....	129
6.2 Saran .....	129

<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	131
-------------------------------	-----

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kasus Narkoba Tahun 2006-2010 .....	3
Tabel 1.2	Jumlah Pasien Jiwa Akibat Penyalahgunaan Pemanfaatan Tanaman Ganja .....	5
Tabel 1.3	Jumlah dan <i>Rangking</i> Barang Bukti Pohon Ganja Tahun 2008-2010 ....	6
Tabel 1.4	Jumlah dan <i>Rangking</i> Lahan Ganja Tahun 2008-2010 .....	7
Tabel 1.5	Kasus Ganja di Mukim Lamteuba Tahun 2010 .....	12
Tabel 2.1	Definisi Operasional .....	40
Tabel 2.2	Perbandingan Penelitian .....	46
Tabel 3.1	Teknik Pengumpulan Data .....	52
Tabel 3.2	Analisis Data .....	54
Tabel 4.1	Sejarah Pendirian BNN .....	58
Tabel 4.2	Pencapaian Program <i>Alternatice Development</i> di Aceh 2005-2008 .....	74
Tabel 4.3	Pencapaian Program <i>Alternative Development</i> di Aceh 2009-2010 .....	78
Tabel 4.4	Pencapaian Program <i>Alternative Development</i> di Aceh 2011-2012 .....	79
Tabel 5.1	Analisis Kelayakan Ganja .....	98
Tabel 5.2	Analisis Kelayakan Jabon .....	106
Tabel 5.3	Analisis Kelayakan Nilam .....	110
Tabel 5.4	Analisis Kelayakan Jabon, Nilam, dan Ganja .....	114
Tabel 5.5	<i>Grand Design</i> Kegiatan <i>Alternative Development</i> .....	120

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Jalur Peredaran Ganja di Indonesia .....	9
Gambar 2.1	Tujuan Evaluasi .....	21
Gambar 2.2	EPIC MODEL .....	25
Gambar 2.3	Cara Sederhana dalam Menghitung Keuntungan Masa Depan .....	30
Gambar 2.4	Konsep Kerja <i>Alternative Development</i> untuk Asia Tenggara .....	36
Gambar 2.5	Siklus Proyek .....	38
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN .....	61
Gambar 4.2	Alur Kerja Deputi Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Alternatif .....	62
Gambar 4.3	Studi Banding Tokoh Masyarakat ke Doi Tung, Thailand .....	70
Gambar 4.4	Tes Kesehatan dan Pencegahan Malaria .....	70
Gambar 4.5	Kunjungan Sekjen Mr. Disnadda Diskul .....	71
Gambar 4.6	Hasil Pemetaan dari Tim MFLF Tahun 2007 .....	72
Gambar 4.7	Kunjungan Direktur Eksekutif UNODC Mr. Antonio Maria Costa ke Aceh .....	73
Gambar 4.8	Peresmian SALD di Lamteuba, Aceh Besar .....	73
Gambar 4.9	Penyerahan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) .....	75
Gambar 4.10	Survei Pemetaan Wilayah dan Area Ganja .....	76
Gambar 4.11	Hasil Pemetaan Wilayah dan Area Ganja .....	77
Gambar 4.12	Sosialisasi dan <i>Workshop</i> Pendampingan Tanaman Nilam bagi Eks Petani Ganja, Mukim Lamteuba, Aceh Besar .....	77
Gambar 4.13	Lahan yang Disiapkan Warga Mukim Lamteuba untuk Jabon dan Nilam .....	79
Gambar 5.1	Pertanian di Mukim Lamteuba .....	81
Gambar 5.2	Suasana Pembagian Cangkul kepada Petani Program <i>Alternative Development</i> .....	84
Gambar 5.3	Suasana Pembagian Uang Saku kepada Peserta Pelatihan .....	86
Gambar 5.4	Daftar Petani Nilam Program <i>Alternative Development</i> BNN .....	88
Gambar 5.5	Kehidupan di Mukim Lamteuba, Aceh Besar, Aceh Kepala Mukim Lamteuba, Tim BNN, dan Peneliti .....	94
Gambar 5.6	Peta Wilayah Mukim Lamteuba, Aceh Besar .....	95
Gambar 5.7	Gn. Api Seulawah Agam, Mukim Lamteuba, Aceh Besar .....	95
Gambar 5.8	Brimob Polda Aceh saat Operasi Pemberantasan Lahan Ganja .....	99
Gambar 5.9	Petani Ganja yang Ditangkap oleh Polda Aceh .....	100
Gambar 5.10	Salah Satu Pohon Jabon di Mukim Lamteuba, Aceh Besar .....	103
Gambar 5.11	Peninjauan Lahan Jabon Milik Pegawai BI, Tim BNN, Dinas Kehutanan Aceh dan Petani Jabon di Mukim Lamteuba, Aceh Besar ..	104
Gambar 5.12	Diskusi Peneliti, Tim BNN dengan Dinas Kehutanan tentang Upaya Yang Dilakukan oleh Dinas Kehutanan kepada Warga Seulimeum .....	107
Gambar 5.13	Sampel Nilam pada Acara Pembekalan Petani dalam Alih Fungsi Lahan Pengembangan Komoditi Nilam dan Jabon, Mukim Lamteuba .	108
Gambar 5.14	Rapat Internal 29 Mei 2012 Membahas Program Nilam dan Jabon Ditengahi oleh Camat Seulimeum .....	118
Gambar 5.15	Lahan dan Hasil Panen Jagung Program <i>Alternative Development</i> Periode 2005-2008, Mukim Lamteuba, Aceh Besar .....	122
Gambar 5.16	Lahan yang Digunakan untuk Program <i>Alternative Development</i> Periode 2005-2008, Mukim Lamteuba, Aceh Besar .....	124

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 5 Studi Kelayakan Jabon, Nilam, dan Ganja .....	113
---	-----



## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Transkrip Verbatim Penyuluh Lapangan Tayalis, Amd.

Transkrip Verbatim Rapat Internal Warga Mukim Lamteuba dengan BNN

Transkrip Verbatim Pegawai BNN Ari Lispriyanto

Transkrip Verbatim Kelompok Ahli BNN Ahwil Lutan

Transkrip Verbatim Akademisi Evlyn Soeleman

Transkrip Verbatim Pegawai Dinas Kehutanan Anas Mahmudi, S.Hut, M.Ma

Transkrip Verbatim Pegawai BNN Dik Dik Kusnadi dan Hendrajid Putu W

Transkrip Verbatim Tokoh Mukim Lamteuba Teuku Muslim

Transkrip Verbatim Penelitian Terdahulu

Transkrip Verbatim Akademisi Purwa Sucahya

Transkrip Verbatim Akademisi Hamdani



# BAB 1

## PENDAHULUAN

Pada Bab ini, peneliti membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Signifikasnsi Penelitian, Batasan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (narkoba) suatu kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), terorganisir (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang menimpa segenap lapisan masyarakat (Rencana Strategi BNN, 2011: 3). Di samping itu, kejahatan narkoba juga menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, hukum dan keamanan. Menurut Laenen (2008: 31):

*The drug phenomenon is multidimensional, consisting of many aspects ranging from health (e.g. epidemiology, prevention and treatment) and legal problems, drug-related crime and security issues (e.g. use of drugs in traffic and drugrelated public nuisance) to economic problems (e.g. loss of productivity and absenteeism in the workplace).*

Fenomena narkotika merupakan fenomena yang multidimensi, berkaitan ke seluruh aspek mulai dari kesehatan, hukum, kejahatan dan ekonomi. Kejahatan yang multidimensi dan transnasional layaknya efek *snowball*. Jika kejahatan narkoba tidak dihentikan maka akan berdampak hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan. Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bersepakat untuk memerangi kejahatan narkoba dengan berperan aktif dalam memberikan gambaran situasi peredaran narkoba dan upaya dalam memeranginya. Tekad kuat yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB itu tercermin dengan dilakukannya pertemuan internasional yang membuahkan perjanjian ataupun konvensi.



Pada tahun 1902, dilakukan pertemuan PBB di Shanghai, China yang dihadiri antarnegara dengan agenda pertemuan membahas bahaya dari Opium yang merugikan masyarakat China. Pada tahun 1991 dibentuk *The United Nations International Drug Control Programme* (UNDCP atau UNODC sekarang) yang bemarkas di Viena. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada tahun 2008 dengan agenda membahas capaian yang telah dilakukan antar negara untuk memutus rangkaian *demand and supply* dari narkoba (*A Century of International Drug Control* - UNODC, 2008: 10).

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang tergabung dalam PBB, mempunyai kedudukan penting dalam lalu lintas dunia internasional. Letak geografis Negara Republik Indonesia terbentang di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang keduanya memiliki posisi silang yang sangat strategis. Pada kenyataannya, posisi strategis Indonesia ini menguntungkan jalur peredaran narkoba.

Oleh sebab itu, Indonesia sebagai salah satu anggota PBB juga berperan aktif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Salah satunya pada tahun 2002 dengan membentuk suatu Lembaga non Kementerian yang diberikan tugas pokok Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), badan tersebut adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN yang berfungsi salah satunya yaitu memutuskan jaringan peredaran gelap narkoba, menjadi Lembaga non Kementerian terdepan yang dibentuk pemerintah dalam memerangi luasnya peredaran gelap narkoba.

Luasnya peredaran gelap narkoba juga memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Pasalnya, saat ini Indonesia merupakan salah satu penyalur narkoba di dunia, selain Columbia, China, Brazil, Iran, dan Mexico (Harris, para. 3). Situasi peredaran narkoba di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Melalui **Tabel 1.1** didapat gambaran jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan peningkatan. Berikut data jumlah kasus narkoba dari tahun 2006-2010 yang ditangani oleh BNN dan Polri:

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus Narkoba Tahun 2006-2010**

NO	KASUS	TAHUN					JUMLAH
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Ganja	7.257	9.123	8.459	8.722	7.092	<b>40.653</b>
2	Heroin	2.143	2.246	1.534	797	656	<b>7.376</b>
3	Hashish	5	5	5	3	9	<b>27</b>
4	Kokain	15	4	7	2	5	<b>33</b>
5	Kodein	2	2	2	-	-	<b>6</b>
6	Morfin	975	-	1	-	-	<b>976</b>
7	Ekstasi	1.548	2.381	2.094	1.403	854	<b>8.280</b>
8	Shabu	3.135	5.456	6.522	7.648	9.222	<b>31.983</b>
9	Daftar G	-	1.452	1.167	1.040	904	<b>4.563</b>
10	Benzodiazepin	-	-	-	299	132	<b>431</b>
11	Barbiturat	-	-	-	-	127	<b>127</b>
12	Ketamin	-	-	-	-	13	<b>13</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>15.080</b>	<b>20.669</b>	<b>19.791</b>	<b>19.914</b>	<b>19.014</b>	<b>94.468</b>

Sumber : telah diolah kembali dari Jurnal Data P4GN, 2011

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus narkoba yang paling banyak sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah ganja, yaitu sebesar 40.653 kasus. Perkembangan jumlah kasus ganja dari tahun 2006 hingga 2010, yaitu tahun 2006 sebanyak 7.257 kasus, tahun 2007 sebanyak 9.123 kasus, tahun 2008 sebanyak 8.459 kasus, tahun 2009 sebanyak 8.722 kasus, dan tahun 2010 sebanyak 7.092 kasus. Jumlah kasus narkoba terbanyak kedua yaitu shabu sebesar 31.983 kasus, dan terbanyak ketiga yaitu ekstasi sebesar 8.280 kasus. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ganja merupakan jenis narkoba yang paling diminati dan terbanyak dalam peredarannya di Indonesia.

Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya kuat. Ganja juga menjadi bahan pembuatan kertas yang dapat mengurangi penebangan hutan untuk mendapatkan bahan baku kertas. Biji dari tanaman ganja sendiri, memiliki gizi tinggi dengan kandungan protein lebih tinggi dari kedelai sehingga dapat menjadikannya alternatif sebagai pakan ternak (Erwin, para. 2).

Biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak, Mobil Henry Ford's pertama sekali dijalankan dengan minyak ganja (Daud, 2007: 213). Ganja juga memiliki manfaat dari sisi medis dan farmasi, terbukti dengan Goerge Washington menanam ganja (*hemp*) di areal Mt. Vernon untuk keperluan obat. *Goerge Washington cultivated a field of hemp at Mount Vernon, and there is some*

*indication that is was used for medicine as well as for making rope (Hanson, 2009: 339).*

Besarnya manfaat ganja seringkali disalahgunakan oknum tertentu sebagai sumber narkoba. Pasalnya, ganja memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dibandingkan dengan tanaman lainnya. Akan tetapi, efek yang ditimbulkan dari penggunaan tanaman ganja yang berlebihan akan merusak tubuh manusia. Oleh sebab itu, secara hukum ganja tetap dilarang dan merupakan jenis narkotika yang berbahaya. Efek dari penyalahgunaan tanaman ganja pada tingkat yang berat dapat menyebabkan gangguan jiwa karena tanaman ganja mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) (Daud, 2007: 215). Zat THC bersifat memabukkan dan memiliki efek yang sangat kompleks pada otak manusia (Narayana, Syarif dan Ronald, 11).

*The acute effects of marijuana are now known to be due to the binding of THC at special receptors in the brain (Levinthal, 2008: 186). The acute panic anxiety reaction, notes particularly when unexpectedly strong marijuana used, is the most common adverse psychological effect induced by cannabis use (Grilly, 2006: 272).* Baik Levinthal maupun Grilly menjelaskan tentang efek psikomotorik pada otak bagi pengguna ganja. McKim menambahkan, terdapat efek psikologi akibat zat THC, yaitu pendarahan mata, mata yang memerah dan keluar, detak jantung yang kencang, dan lain-lain:

*THC has several physiological effects, it causes bloodshot eyes, decreases the pressure in the eyeball, increase appetite and hearth rate, and can act as an antiemetic and anticonvulsant. At high doses, cannabis acts like a hallucinogen, but at the low doses common in North American use, the drug is reported to cause a pleasurable high (McKim, 2007: 335).*

Berdasarkan data dari Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa Provinsi Aceh tahun 2007 (**Tabel 1.2**), terdapat dua kondisi pasien akibat penyalahgunaan pemanfaatan tanaman ganja, pasien rawat jalan dengan pasien rawat inap. Sepanjang 2001-2006, sebanyak 3.065 pasien masuk dalam kategori pasien rawat jalan, sedangkan sebanyak 602 pasien masuk dalam kategori pasien rawat inap.

Total pasien akibat penyalahgunaan pemanfaatan tanaman ganja sebesar 3.667 pasien. Jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk aceh sebesar 4.235.538 berdasarkan data BPS tahun 2007 (BPS, 2010: 7), maka perbandingan antara total pasien akibat penyalah guna pemanfaatan ganja sebesar 0,08 %. Persentase tersebut cukup mengkhawatirkan untuk perkembangan masa depan generasi bangsa dikemudian hari.

**Tabel 1.2 Jumlah Pasien Jiwa Akibat Penyalahgunaan Pemanfaatan Tanaman Ganja**

No.	Kondisi Pasien	Tahun						Jumlah
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1	Rawat Jalan	835	357	544	547	338	444	<b>3.065</b>
2	Rawat Inab	59	84	65	90	160	144	<b>602</b>
<b>Jumlah</b>		<b>894</b>	<b>441</b>	<b>609</b>	<b>637</b>	<b>498</b>	<b>588</b>	<b>3.667</b>

Sumber : Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa Provinsi NAD, 2007

Oleh karena itu, tanaman ganja tetap dilarang di Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan *hasish* merupakan jenis narkotika Golongan I yang berarti satu kelas dengan opium dan kokain. Golongan I merupakan produk narkoba yang berasal dari tanaman.

*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menempatkan Indonesia, sebagai salah satu negara penyuplai ganja terbesar di kawasan Asia Tenggara, hasil ganja dari Aceh yang terbaik dan punya nilai ekonomi tinggi (Sinar ed. 4, 2010: 20). Ganja di Indonesia tidak dapat dipungkiri tidak lepas dari provinsi di sebelah barat Indonesia, yaitu Nangroe Aceh Darusalam (NAD). Kondisi geografis yang mendukung, tanah yang subur, hujan yang teratur, dan posisi pegunungan dengan iklim relatif stabil membuat ganja mampu tumbuh subur di NAD (Sinar ed. 4, 2010: 23). Hal tersebut terbukti dari hasil temuan barang bukti pohon ganja yang disita oleh Bareskrim dan BNN sejak tahun 2008-2010 (**Tabel 1.3**).

**Tabel 1.3 Jumlah dan *Ranking* Barang Bukti Pohon Ganja Tahun 2008-2010**

NO	PROVINSI	2008		2009		2010	
		JML (BTNG)	RANGKING	JML (BTNG)	RANGKING	JML (BTNG)	RANGKING
1	NAD	584.544	I	526.555	I	438.621	I
2	Sumut	13.434	II	14.358	II	24.701	II
3	Sumbar	-	-	29	III	76	VI
4	Riau	2	VII	6	VIII	199	V
5	Sumsel	51	III	11	VI	381	IV
6	Bengkulu	7	IV	-	-	1.047	III
7	Jabar	-	-	9	VII	5	VII
8	Jatim	-	-	2	IX	-	-
9	Kalbar	-	-	26	IV	3	VIII
10	Kalsel	-	-	23	V	-	-
11	Bali	5	V	-	-	-	-
12	Maluku Utara	4	VI	-	-	-	-
13	Papua	2	VII	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>598.049</b>	<b>-</b>	<b>541.019</b>	<b>-</b>	<b>465.033</b>	<b>-</b>

Sumber : telah diolah kembali dari Dir. TP. Narkoba Bareskrim Polri, 2011

Berdasarkan data tersebut di atas, Provinsi NAD menempati urutan pertama dari hasil barang sitaan yang dikumpulkan oleh Bareskrim dan BNN. Dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah barang bukti narkoba jenis ganja yang disita di NAD menunjukkan jumlah yang besar. Pada tahun 2008 jumlah sitaan narkoba jenis ganja sebesar 584.544 batang dan NAD menduduki rangking pertama. Pada tahun 2009 jumlah sitaan narkoba jenis ganja sebesar 526.555 batang dan NAD tetap menduduki rangking pertama. Pada tahun 2010 jumlah sitaan narkoba jenis ganja sebesar 438.621 batang, dimana NAD juga menduduki rangking pertama di antara Provinsi lainnya di Indonesia.

NAD sebagai salah satu provinsi di Indonesia merupakan lumbung dari tanaman ganja. Ganja Aceh tumbuh subur, walaupun jika dirunut berdasarkan sejarah bahwa tanaman tersebut tidak serta merta tumbuh dengan sendirinya. Masyarakat turut serta menanam dan memeliharanya, seperti yang disampaikan oleh Hidayat Fabanyo:

Aceh menyangang status sebagai salah satu produsen ganja di dunia karena awal mulanya tumbuh sendiri namun manakala masyarakat Aceh sudah tahu memiliki nilai ekonomi, ganja dijadikan komoditi. Masyarakat

atau petani yang lugu, diiming-imingi untuk menanam ganja secara besar-besaran oleh para sindikat di Aceh (Sinar ed. 4, 2010: 8).

Oleh karena itu, penanaman ganja Aceh sebagian besar dilakukan oleh masyarakat dan petani yang ada di Aceh dengan dorongan dari mafia yang ada di sana. Lutan menjelaskan “mereka menanam ganja sebagai sumber mata penghidupan dan untuk cepat kaya” (Sinar ed. 4, 2010: 12). Wakil Gubernur Aceh, M. Nazar menjelaskan:

Yang mendorong warga untuk menanam tanaman “haram” itu karena alasan kemiskinan, selain itu sulitnya membudidayakan tanaman produktif dan terakhir karena ada yang ingin cepat kaya dengan pohon ganja (Sinar Ed. 4, 2010: 19).

Mereka diberikan dana awal 50% untuk keluarga dan 50% untuk menanam, panen, pengepakan serta pengiriman (Wawancara Hendrajid, 9 April 2012). Oleh sebab itu, mereka selalu menanamnya walaupun mereka akan dijebloskan dalam jeruji besi serta terbelit hutang.

Jika dihitung dengan nilai ekonomis, harga ganja siap pakai dengan standar harga lokal Rp. 200.000,-/Kg, jika menyeberang ke Medan maka harga ganja melambung menjadi Rp. 700.000,-/Kg, sedangkan di Jakarta atau kota besar lainnya harga ganja Rp. 2-3,5jt /Kg (Sinar ed. 4, 2010: 24). Berdasarkan **Tabel 1.4**, NAD selalu menduduki rangking pertama dari kultivasi penanaman. Berikut data dari Rangkaian jumlah lahan ganja yang berasal dari tiga daerah di Sumatera:

**Tabel 1.4 Jumlah dan *Ranking* Lahan Ganja Tahun 2008-2010**

NO.	PROVINSI	2008		2009		2010	
		JML (HA)	RANGKING	JML (HA)	RANGKING	JML (HA)	RANGKING
1	NAD	122,00	I	236,35	I	171,65	I
2	Sumut	6,20	II	5,50	II	6,50	II
3	Sumsel	-	-	-	-	0,25	III
<b>JUMLAH</b>		<b>128,20</b>	<b>-</b>	<b>241,85</b>	<b>-</b>	<b>178,40</b>	<b>-</b>

Sumber : telah diolah kembali dari Dir. TP Narkoba Bareskrim Polri, 2011.

Berdasarkan data di atas, NAD menempati rangking pertama berturut-turut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Tahun 2008 jumlah lahan ganja yang berhasil diidentifikasi oleh Bareskrim Polri dengan BNN sebanyak 122 ha. Pada tahun 2009 jumlah tersebut bertambah dua kali lebih banyak, yaitu sebanyak 236,35 ha yang berhasil diidentifikasi sedangkan pada tahun 2010 jumlah tersebut menurun menjadi 171,65 ha. Penurunan tersebut dikarenakan adanya kesadaran dari masyarakat dengan dibantu instansi terkait bahaya dari menanam ganja.

Sumatera Utara yang menempati posisi kedua sebanyak 6,2 ha pada tahun 2008. Pada tahun 2009 mengalami penurunan 0,7 ha dengan luas area yang berhasil diidentifikasi sebesar 5,5 ha. Terakhir, pada tahun 2010 terjadi kenaikan luas lahan sebesar 1 ha dengan luas yang diidentifikasi sebesar 6,5 ha. Sumatera Selatan menempati posisi ketiga pada tahun 2010. Fenomena munculnya Sumatera Selatan dalam penanaman area lahan ganja ini dikarenakan sindikat Aceh mencoba untuk menanam ganja di luar Aceh sebagai akibat kesadaran dari beberapa masyarakat Aceh untuk tidak menanam ganja lagi.

Kasus yang terjadi di akhir Desember 2011, BNN melakukan operasi gabungan dengan Polda Aceh memusnahkan 155 ha Ladang Ganja di Aceh (Sinar ed. XII, 2011: 32). Namun dengan operasi ini tidak menghentikan laju perkembangan peredaran gelap narokoba khususnya ganja di Indonesia. Hal ini terbukti dengan penangkapan ganja kering seberat 2,8 ton di Desa Alue Buket, Lhoksukon, Kab. Aceh Utara (Kompas, Kamis, 16 Februari 2012, 12). Lalu, sebesar 111 kg pada Sabtu, 18 Februari 2012 oleh Polres Lampung Selatan (Suara Pembaruan, Sabtu, 18 Februari 2012, 14). Setelah itu, 3,5 ton di Pelabuhan Bakaheuni Lampung pada 20 Februari 2012. Hal ini menunjukkan tingkat kerawanan peredaran ganja yang berasal dari Aceh menjadi bahaya bagi Indonesia.

BNN agak kesulitan menghapus perladangan ganja di Aceh secara menyeluruh karena ganja sudah menjadi tanaman tradisional (Fabanyo, Sinar ed. 4, 8). Masyarakat diiming-imingi oleh para sindikat untuk menanam ganja secara sembunyi-sembunyi. Namun, metode yang terbaru dari menanam secara sembunyi-sembunyi dengan cara menanam satu tanaman ganja di pot-pot rumah

tangga sampai dengan yang ditanam dalam skala besar (Sinar ed. 4, 2010: 20). Ganja yang ditanam di pot-pot rumah tangga tersebut dijadikan alat ukur masa waktu dari awal pembibitan sampai dengan panen ganja untuk tanaman ganja skala besar yang disembunyikan posisinya. Pola ini menyulitkan petugas yang berwajib dalam melakukan pemberantasan ladang ganja.

Berdasarkan jumlah kasus yang sudah disajikan pada data sebelumnya serta berdasarkan jumlah sitaan yang telah dikumpulkan, dapat dipetakan bahwa pola peredaran ganja di tingkat nasional bersumber dari Aceh. Ganja tersebut dipanen dari Aceh lalu dikeringkan dan siap diedarkan. Peredaran ini bisa melalui tiga alternatif transportasi (darat, udara dan laut). Disebarkan dari Aceh – Jakarta – Bandung, Aceh – Medan – Lampung – Jakarta, Aceh – Jakarta – Batam, Aceh – Medan – Surabaya, Aceh – Jakarta – Pontianak dan Aceh – Medan – Bali (**Gambar 1.1**). Berikut data yang disajikan dalam bentuk peta persebaran narkoba jenis ganja dari Provinsi NAD.



Sumber : Jurnal Data P4GN BNN, 2010: 45.

**Gambar 1** Peta Jalur Peredaran Ganja di Indonesia

Kasus-kasus yang terjadi serta pola jalur peredaran ganja di Indonesia (berdasarkan **Gambar 1**), merupakan potret dari tingkat kerawanan yang mengkhawatirkan. Terkait dengan upaya yang perlu dilakukan agar masyarakat tidak lagi menanam ganja, Mamoto menegaskan, “BNN bersama Polda dan Pemda Aceh merencanakan kegiatan *alternative development* yang nantinya akan



mengalihkan pertanian masyarakat yang lebih baik dan tidak melanggar hukum” (Sinar ed. XII, 2011: 33). *Alternative development* yang dijalankan BNN di Aceh merupakan solusi bagi permasalahan terhadap masih terdapatnya ladang ganja di Aceh. *Alternative development* yang diterapkan oleh BNN merupakan proyek percontohan dari Doi Tung, Thailand. Doi Tung merupakan kawasan percontohan UNODC karena sukses memutus mata rantai peredaran *papaver somniferum* atau Opium (www.detiknews.com, Kamis, 16 Februari 2012).

*Alternative development ... to create the economic and social environment in which households can attain an acceptable standard of living, without the need for drug crop cultivation. The approach has encapsulated a wide array of efforts aimed at enhancing food security, promoting alternative sources of income and increasing government services in the highland areas.* (D. Mansfield, 1999: 21)

*Alternative development* dilaksanakan sebagai upaya peningkatan ekonomi dan lingkungan sosial yang baik tanpa harus kembali menanam tanaman narkotika. Pendekatan yang digunakan pemerintah adalah pemerintah dapat menciptakan alternatif sumber pendapatan, ketahanan pangan serta tingkat pelayanan dari pemerintah lebih baik lagi. Hal ini memberikan efek terhadap keinginan dari peserta program untuk beralih profesi dan lahan.

Program *alternative development* yang dilaksanakan Deputy Pemberdayaan BNN dijalankan di Mukim Lamteuba, Kecamatan Seulimeum di Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2006. Mukim Lamteuba dikenal sebagai salah satu produksi terbesar ganja di Aceh (Sinar ed. 4, 2010: 21). Provinsi ini terkenal dengan tanaman ganja yang hampir terbesar di seluruh hutan-hutan lebat di Aceh serta diisukan menjadi ladang ganja terbesar di Asia Tenggara, selain Thailand (Sinar ed. 4, 2010: 23).

*Alternative development* yang dijalankan oleh BNN merupakan program pertama yang dijalankan di Indonesia (Sinar ed. 4, 2010: 20). Program ini memberikan alternatif pemberdayaan kepada masyarakat dengan mengalihkan ladang ganja ke kunyit, nilam, dan jabon (Wawancara Hendrajid, 9 April 2012).

Sebagai salah satu upaya pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba di Indonesia, pemberdayaan alternatif ini menjadi sasaran untuk menyelaraskan keseimbangan. Fabanyo menjelaskan:

Masyarakat Aceh tidak punya tanaman *alternative* yang bisa menghasilkan uang. Kalau tanam yang lain, tidak laku karena tempatnya terisolir. Sedangkan setelah dia tanam tomat, cabe, nilainya tidak setinggi ganja. Menjualnya pun susah, karena terisolir daerah terpencil (Sinar ed. 4, 2010: 8).

Pelaksanaan program ini diawali dengan bergandengan tangan bersama yayasan *Doi Tung Development Project* yaitu dengan menurunkan tingginya wabah penyakit malaria melalui program *Malaria Preparedness* (Suara Pembaharuan, Sabtu, 18 Februari 2012). Cita-cita khusus dari Mukim Lamteuba, ditargetkan penghasilan masyarakat setempat naik dari sekitar Rp. 10.000,-/hari saat masih menanam ganja menjadi sekitar Rp. 20.000,-/hari setelah tidak menanam ganja. Jika dibandingkan dengan menanam ganja tentu berbeda kondisinya. Keuntungan yang berlipat didapatkan oleh masyarakat yang menanam ganja dibandingkan dengan menanam jabon dan nilam akan tetapi rasa takut tetap muncul jika menanam ganja dibandingkan jabon dan nilam (Wawancara Dik Dik, 9 April 2012).

Pada tahun 2010, ditetapkan indikator pencapaian program *alternative development*, sebesar tiga hektar lahan ganja beralih fungsi dan sebanyak 50 orang penanam ganja beralih usaha legal produktif (Rencana Strategis BNN Tahun 2010-2014, 2011: 41). Diakhir periode pelaporan, capaian target 2010, yaitu sebesar tiga hektar bekas lahan ganja telah beralih fungsi dan sebanyak 50 orang penanam ganja telah beralih usaha legal produktif (LAKIP BNN 2011). Hal ini mengindikasikan bahwa usaha BNN dalam mengalih fungsikan lahan serta profesi warga di Mukim Lamteuba sudah tercapai.

Fenomena menggelitik dari jalan program ini adalah program alih fungsi lahan sudah berlangsung sejak 2006 akan tetapi sampai saat ini, peredaran gelap narkoba jenis ganja dari Aceh masih ada dan terus beredar tak henti-hentinya.

Terbukti dari hasil survei yang dilakukan oleh BNN bekerja sama dengan enam Universitas di Aceh menghasilkan masih terdapatnya usaha menanam Ganja secara tersembunyi (Laporan Akhir Survey Pemetaan Wilayah dan Area Ganja di Provinsi Aceh, 2010: 212). Hal ini terjadi dikarenakan alasan ekonomi, diantaranya tingginya kesenjangan antara harga tanaman pertanian dan harga ganja, alasan kebutuhan hidup yang lebih tinggi dari pendapatan serta tawaran bandar dari luar Aceh untuk upah tinggi bagi penanam ganja.

Salah satu bukti dari belum nyatanya hasil dari program *alternative development* di Mukim Lamteuba, yaitu ditemukannya 21 Ladang Ganja di Aceh Besar (Jurnal Data P4GN BNN, 2011: 29), pada tanggal 11-23 Januari 2010 (**Tabel 1.5**). Direktorat Narkoba Polda Aceh yang berhasil menemukan ladang ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD. Tersangka dari 21 Ladang Ganja tersebut, masih dalam proses penyidikan dengan barang bukti total berjumlah 220.000 batang tanaman Ganja. Barang bukti dari ladang ganja sebagian besar dimusnahkan di TKP dan sebagian dibawa untuk dijadikan barang bukti dan bahan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

**Tabel 1.5 Kasus Ganja di Mukim Lamteuba Tahun 2010**

NO.	Tanggal	2010	
		JML (HA)	JML (Batang)
1	11-23 Januari 2010	21	220.000
2	24-29 Juni 2010	13	166.000
<b>JUMLAH</b>		<b>34</b>	<b>386.000</b>

Sumber : telah diolah kembali dari Jurnal P4GN, 2011.

Selain itu, ditemukan 13 Ladang Ganja di Aceh Besar (Jurnal Data P4GN BNN, 2011: 29), pada tanggal 24-29 Juni 2010. Direktorat Narkoba Polda Aceh memusnahkan ladang ganja dari bukit di Desa Lam Apeng (pemukiman Lamteuba), Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD. Tersangka dari kasus ini sendiri, masih dalam proses penyidikan dengan barang bukti total berjumlah 166.000 batang tanaman Ganja. Barang bukti dari ladang ganja sebagian besar dimusnahkan di TKP dan sebagian dibawa untuk dijadikan barang bukti dan bahan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Pengungkapan kasus ladang ganja di atas menjadi bukti nyata bahwa program *alternative development* alih fungsi lahan ganja ini belum nyata hasilnya. Jika melihat kondisi seperti ini menjadi keraguan bagi peneliti tentang target pencapaian program *alternative development* di Mukim Lamteuba, NAD yang dilaporkan tiap tahunnya. Di samping itu, *Grand Design* BNN tentang Indonesia khususnya Aceh Bebas dari Narkoba 2015 hanya menjadi slogan saja walaupun yang dikatakan oleh Wakil Gubernur Aceh terpilih bahwa dia optimis target pencapaian Aceh bebas narkoba 2015 (Sinar ed. 11, 2010: 18).

Persoalan Aceh terkait dengan *community development* bahwa model-model pengembangan masyarakat saat ini secara umum masih menerapkan pola-pola populer yang seringkali kurang atau tidak relevan diterapkan dalam konteks masyarakat Aceh (Chotim dan Aminah, 2009: 73). Model tersebut akan populer di masyarakat jika perencanaan yang dibuat sesuai dengan keinginan masyarakat. Menurut Avenzora (2006: 122):

jika pola pelaksanaan gagal dirancang secara efisien dan efektif maka yang akan terjadi adalah keletihan berproses yang berujung pada sikap apriori, inefisiensi biaya dan waktu, dan akan berkembang dan berubahnya situasi secara total sehingga seluruh proses harus kembali diulang dari awal.

Pada tahun 2006-2007, pelaksana program merancang program *alternative development* dilaksanakan di Mukim Lamteuba, yang ditandai dengan penyusunan program dengan Pemda NAD (dokumen Ahwil Lutan, 2008). Pada tahun 2008, *action plan* dari penyusunan program yang telah dilakukan ditandai dengan penanaman jagung di lahan warga Mukim Lamteuba dengan bantuan dari Pemerintah Thailand. Di samping itu, diresmikannya *Sustainable Alternative Live Hood Development* (SALD) oleh Gubernur Aceh dihadiri oleh Direktur Eksekutif UNODC dan Sekjen Mae Fah Luang Foundation (MFLF) serta masyarakat di Mukim Lamteuba, Seulimeum, Aceh Besar, NAD (dokumen Ahwil Lutan, 2008).

Pada awal masa penanaman jagung ini, warga Mukim Lamteuba mengalami kendala setelah masa panen. Warga mengeluhkan tidak ada pasar yang mau membeli hasil panen jagung mereka. Kendala ini menyebabkan, jagung yang dipanen semuanya busuk karena dibiarkan begitu saja oleh warga. Oleh sebab itu,

muncul kemarahan dan kekecewaan warga atas program *alternative development* yang dilaksanakan oleh BNN. Seperti yang diungkapkan oleh Tayalis, “soalnya Lamteuba ini udah pernah dijadiin tempat sandiwaranya orang dengan menanam jagung, jadi warga kecewa” (Wawancara Tayalis, 28 Mei 2012).

Pada tahun 2012 ini, pelaksana program *alternative development* merencanakan akan kembali melaksanakan program *alternative development* di Mukim Lamteuba, NAD. Program ini direncanakan akan mengalihfungsikan lahan ganja menjadi lahan nilam dan jabon. Jabon dan nilam ditetapkan sebagai tanaman pengganti tanaman ganja yang biasa ditanam oleh masyarakat di Mukim Lamteuba, NAD pada tahun 2012 (Rencana Strategi BNN, 2011). Nilam dan jabon dijadikan sebagai tanaman alternatif BNN karena mampu memberikan keuntungan bagi warga Mukim Lamteuba.

Pratiwi (2003) menjelaskan bahwa Jabon (*Anthocephalus cadamba* Miq) adalah jenis kayu cepat tumbuh, berbatang silinders, potensial untuk bahan baku industri bahan bangunan non-konstruksi, produk biokomposit (kayu lapis, papan partikel, papan semen), papan, peti pembungkus, cetakan beton, mainan anak-anak, alas sepatu, korek api, konstruksi darurat yang ringan, digunakan untuk *pulp* (Ruhendi dan Putra, 2011: 14). Jabon termasuk jenis pohon industri yang cepat tumbuh dari *famili Rubiaceae* dan memiliki banyak kegunaan. Tumbuhan ini tergolong sebagai tumbuhan cepat tumbuh.

Oleh karena jabon memiliki daur lebih pendek, sehingga menguntungkan dari segi produksi yang tinggi dalam waktu yang singkat. Jabon juga tergolong jenis pohon cahaya (*light-demanding*) dan cepat tumbuh pada usia yang masih muda (Mansur dan Surahman, 2011: 71). Buku Sejarah Kehutanan Indonesia mencatat sejak zaman kolonial Belanda kayu Jabon sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku arang terbaik untuk pabrik mesiu (Redaksi Trubus, 2010: 52).

Serangan penyakit yang terjadi pada tanaman sengon (*Falcataria moluccana*) yang membuat tanaman jabon sebagai tanaman alternatif yang populer dikalangan petani saat ini (Mansur dan Tuheteru, 2011: 17). Maka dari itu, bisnis jabon sangat menguntungkan karena modal awal membeli satu bibit jabon saat ini sekitar dua ribu rupiah. Setelah panen, dari satu tegakan jabon dapat dijual menjadi Rp. 300.000 – Rp. 600.000,- (AgroMedia, 2012: 42). Bahkan, pada

2008 karena kelangkaan pasokan, pengumpul di Jawa Tengah berani membayar hingga Rp. 900.000/kubik (Sumarno, dkk., 2012: 13).

Sedangkan tanaman nilam (*Pogostemon cablin Benth*) merupakan salah satu tanaman atsiri penghasil devisa. Sekitar 90% minyak nilam dunia dipasok dari Indonesia (Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian Vol. 27, 2005: 8). Sedangkan nilam, Aceh dinilai cukup potensial untuk mengembangkan komoditas nilam berskala besar. Kualitas nilam Aceh merupakan yang terbaik di dunia, Serambi Mekah itu juga tercatat sebagai daerah penyumbang terbesar ekspor nilam di Indonesia.

Pada tahun 1970-an, kontribusi minyak nilam dari Aceh mencapai 70% dari total produksi nilam Indonesia (Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian Vol. 27, 2005: 8). Di Indonesia terdapat tiga jenis nilam, yaitu nilam Aceh (*Pogostemon cablin Benth*), nilam Jawa (*P. heyneanus Benth*), dan nilam Lembang (*P. hortensis Benth*). Namun, yang umum dibudidayakan adalah nilam Aceh karena kadar dan mutu minyaknya lebih tinggi dibanding nilam Jawa dan nilam Lembang (Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian Vol. 27, 2005: 6).

## 1.2 Pokok Permasalahan

Keunikan yang dijabarkan di atas yang membuat dasar bagi peneliti dalam mengambil tema evaluasi program terkait dengan perencanaan program *alternative development* di Mukim Lamteuba. Hal ini terkait dengan apa yang akan dilaksanakan oleh BNN, di tahun 2012 direncanakan akan melaksanakan kembali program alih fungsi lahan, yang pada awalnya warga Mukim Lamteuba menanam ganja, diganti dengan menanam jabon dan nilam. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dengan meninjau dari sisi evaluasi perencanaan program. Adapun pokok permasalahan (*research problem*) yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana evaluasi perencanaan program *alternative development* alih fungsi lahan ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk membahas pertanyaan penelitian sesuai dengan ruang lingkup permasalahan penelitian yang diangkat, yaitu untuk menganalisis evaluasi perencanaan program *alternative development* alih fungsi lahan ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD.

### 1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

#### 1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian awal serta bahan referensi lebih lanjut bagi peneliti lainnya untuk melanjutkan penelitian mengenai evaluasi program *alternative development*. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait program pemberdayaan masyarakat di NAD.

#### 2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya BNN mengenai evaluasi program *alternative development*.

### 1.5 Batasan Penelitian

Agar penulisan tesis ini lebih terfokus pada inti permasalahan dan untuk memudahkan pengkajian dan penganalisaan maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas pada masalah, yaitu menganalisis secara dalam mengenai evaluasi suatu perencanaan program yang dilakukan oleh BNN dalam merubah profesi penanam ganja ke penanam jabon dan nilam.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar tesis ini terdiri dari enam bab. Sistematika ini dapat diuraikan sebagai berikut:

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini beserta tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang mendasari penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, narasumber/informan, proses penelitian, teknik analisa data, site penelitian, proses penelitian, validitas dan reabilitas data, dan keterbatasan penelitian.

## **BAB 4 GAMBARAN UMUM PROGRAM *ALTERNATIVE DEVELOPMENT* BNN DAN LAMTEUBA, ACEH BESAR**

Bab ini memaparkan tentang deskripsi program *alternative development* BNN.

## **BAB 5 EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM *ALTERNATIVE DEVELOPMENT* ALIH FUNGSI LAHAN GANJA DI MUKIM LAMTEUBA, KEC. SEULIMEUM, KAB. ACEH BESAR, NAD**

Bab ini memaparkan analisa penelitian evaluasi perencanaan program *alternative development* alih fungsi lahan ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, Aceh agar dapat digunakan untuk mendorong tercapainya Indonesia Bebas Narkotiba 2015 di Provinsi NAD.



## **BAB 6 PENUTUP**

Bab ini memaparkan kesimpulan dari keseluruhan rangkuman penelitian dan rekomendasi peneliti yang relevan dengan hasil penelitian.



## **BAB 2**

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Pada Bab ini, peneliti membahas mengenai Evaluasi Program, *Alternative Development*, *Feasibility Studies*, Definisi Operasional, dan Tinjauan Pustaka.

#### **2.1 Evaluasi Program**

Pada Sub Bagian Evaluasi Program, peneliti membaginya menjadi empat, yaitu pengertian evaluasi, pengertian evaluasi program, evaluasi perencanaan program, dan bentuk evaluasi. Pembagian ini dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memahami dan menguji teori.

##### **2.1.1 Pengertian Evaluasi**

Dody (2011: 45) menjelaskan, evaluasi (*evaluation*) kerap dibaurkan dengan konsep sejenis lain seperti *monitoring* atau *appraisal*. Dalam prakteknya, keseluruhan konsep tersebut memang saling berkait erat, namun akan berbeda jika dikaitkan dengan substansi yang hendak diukur. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya serta sejauh mana tujuan dicapai.

*Monitoring* merupakan penilaian berkelanjutan atas proyek atau program yang sedang berjalan, bisa setiap triwulan, semester, atau tahunan, untuk memastikan implementasi dan alokasi *resource* berjalan sebagaimana rencana dan jadwal. Adapun *appraisal* merupakan penilaian atas proposal atau usulan kegiatan, dapat berupa proyek atau program, berkenaan dengan apakah usulan tersebut layak dikerjakan baik dinilai dari *input*-nya maupun kemungkinan capaian luarannya.

Dunn (2000: 608) memberikan istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Secara konseptual Dale (2004) dalam Doddy (2011: 45), mendefinisikan evaluasi sebagai upaya menilai keseluruhan sejumlah hasil dari sebuah kegiatan atau program pembangunan. Konsep *monitoring* akan lebih spesifik memfokuskan penilaian pada hal tertentu saja seperti keadaan antar waktu saat program masih dalam proses implementasi. Jika didefinisikan, evaluasi merupakan upaya bagaimana menilai capaian tertentu sebuah program atau kegiatan pembangunan, "...*assessing the value of...*". Capaian kegiatan bisa berupa kegiatan proyek atau program, baik di pertengahan maupun di akhir program.

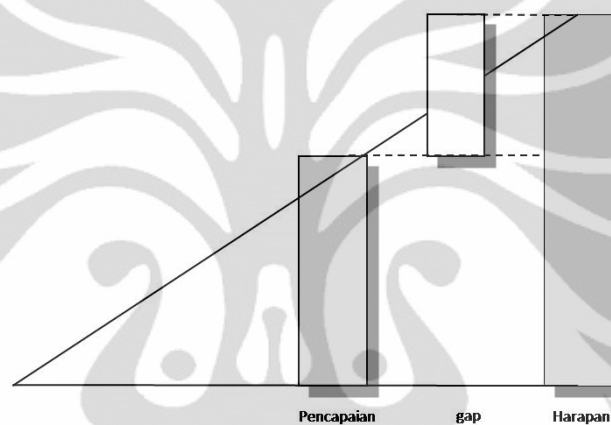
Evaluasi adalah aktivitas menilai, mengukur, dan menimbang suatu tujuan atau manfaat dari sebuah kebijakan. Evaluasi kebijakan publik seringkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan (Dwijowijoto, 2003: 183-4). Sriboonruang dalam Sanong (2002: 43) pengertian evaluasi, yaitu:

*Evaluation is a field of applied science that seeks to understand how successful the projects are and to what extent they fulfill the objectives. The information collected during mid-term evaluation will also allow the project manager to make informed decision concerning a project's worth and provide the opportunity to capitalize on project strengths. In addition, the feedback process that occurs during evaluation will allow the project manager to finetune the project and make it more effective.*

Evaluasi merupakan ilmu aplikasi dalam memahami bagaimana suatu proyek itu sukses dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama melakukan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa program yang dilakukan berjalan sebagaimana rencana yang dibuat serta sesuai dengan tujuan akhir yang hendak dicapai. Mark, Henry dan Julnes (2000: 1) menjelaskan *the ultimate goal of evaluation is social betterment, to which evaluation can contribute by assisting democratic institutions to better select, oversee, improve, and make sense of social programs and policies*. Variabel utama yang perlu dinilai dalam evaluasi mengacu kepada variabel tujuan program atau proyek dan kemudian

mengukurnya seberapa jauh capaian program menurut indikator tujuan dimaksud. *Monitoring* merupakan penilaian saat tertentu saja atas program atau proyek yang masih sedang berjalan, “*frequent assessment of output or outcome...*” (Dale, 2004: 131)

Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk masalah dan rekomendasi. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan” seperti yang digambarkan berikut ini (**Gambar 2.1**):



Sumber: Riant Nugroho, 2003: 183

**Gambar 2.1 Tujuan Evaluasi**

Dari gambar tersebut tampak bahwa tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan (Riant Nugroho, 2006: 183-184).

Dunn (2000: 609) menyatakan bahwa evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi

sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Pada penelitian ini, evaluasi yang dimaksudkan adalah evaluasi atas perencanaan program alih fungsi lahan ganja ke lahan nilam dan jabon yang dilakukan oleh BNN di Mukim Lamteuba, Aceh Besar, NAD. Program ini ada sebagai upaya dari BNN untuk menurunkan angka kejahatan narkoba (*supply side*) khususnya ganja dari Provinsi NAD.

### **2.1.2 Pengertian Evaluasi Program**

Di atas sudah dijelaskan tentang definisi terkait dengan evaluasi. Disinggung pada bagian awal bahwa evaluasi yang dimaksud di dalam penelitian ini, yaitu evaluasi program. Maka perlu dijelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan evaluasi program. Posavac dan Carey (1980: 3) menjelaskan bahwa evaluasi program biasanya dilaksanakan pada Organisasi Non Profit (NGO) dan lembaga pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh Wholey, dkk. (2010: 5), bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah:

*Program evaluation is the application of systematic methods to address questions about program operations and result. It may include ongoing monitoring of a program as well as one-shot studies of program process or program impact. The approaches used based on social science research methodologies and professional standards.*

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa evaluasi program merupakan suatu aplikasi sistematis untuk menjelaskan beroperasinya suatu program dan hasil dari program tersebut. Termasuk di dalam terkait dengan proses *monitoring program* yang sedang berjalan yang berkaitan dengan proses suatu program atau imbas dari program. Biasanya digunakan sebagai metode penelitian atau sebagai aplikasi standar profesional. Langbein dan Felbinger (2006: 3) menjelaskan:

*Program evaluation is the application of empirical social science research methods to the process of judging the effectiveness of public policies,*

*programs, or projects, as well as their management and implementation, for decision-making purposes.*

Evaluasi program merupakan aplikasi dari metode penelitian ilmu sosial empirik yang memberikan arti terhadap efektivitas kebijakan suatu organisasi, program atau proyek seperti yang telah disepakati dan diimplementasikan untuk ditujukan sebagai pembuatan tujuan keputusan. Menurut Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004: 16) dalam Holden dan Zimmerman (2009: 1), evaluasi program melibatkan kegunaan metode penelitian sosial untuk secara sistematis menginvestigasi keefektifan program penekanan sosial dimana disesuaikan dengan lingkungan politik dan organisasi dan dirancang untuk memberitahu aksi sosial bagi peningkatan kondisi sosial.

Pada penelitian ini, evaluasi program yang dimaksudkan adalah evaluasi atas perencanaan program alih fungsi lahan ganja ke lahan nilam dan jabon yang dilakukan oleh BNN di Mukim Lamteuba, Aceh Besar, NAD. Program ini ada sebagai upaya dari BNN untuk menurunkan angka kejahatan narkoba (*supply side*) khususnya ganja dari Provinsi NAD. Penelitian ini menjelaskan bagaimana program tersebut berjalan, apa hasil yang dicapai dari program tersebut, dan seberapa besar kesenjangan antara program yang diharapkan dan hasil yang hendak dicapai.

### **2.1.3 Evaluasi Perencanaan Program**

Menurut Debra J. Holden dan Marc Zimmerman (2009: 2), untuk melakukan evaluasi perencanaan program terdapat lima langkah *Evaluation Planning Incorporating Context* (EPIC) model, yaitu: “(1) *assess context*, (2) *gather reconnaissance*, (3) *engage stakeholders*, (4) *describe the program*, and (5) *focus the evaluation*” (**Gambar 2.2**).

#### 1. *Assess Context* (Penilaian Hubungan)

Pada langkah pertama, terdapat pentingnya pengevaluasi dalam memahami pengaruh lingkungan dan orang pada program serta bagaimana mereka berpengaruh pada informasi kritis tentang program. Hal ini termasuk mendefinisikan hubungan antara pengevaluasi dengan pihak

yang membiayai (sponsor) dan penentuan level evaluasi. Pengevaluasi menjalankan rencana dan implementasi evaluasi secara mandiri dari pihak sponsor. Di saat evaluasi dilakukan oleh pengevaluasi pada organisasi, maka orang tersebut tetap berlaku objektif selama proses perencanaan dan tidak membebankan agendanya pada perencanaan akhir.

2. *Gather Reconnaissance* (Mengumpulkan Tinjauan)

Pada langkah kedua, dilakukan mengaitkan pemahaman dan pengenalan seluruh orang yang terlibat di dalam rencana evaluasi. Sebagai pengevaluasi, dia harus mengerti keterkaitan hubungan seluruh orang yang terlibat, dan menentukan semua cara yang seharusnya digunakan dalam melakukan evaluasi. Kemudian, pengevaluasi mengakui perspektif pada pihak sponsor untuk meredam konflik pengharapan, menghubungkan komitmen manajemen pada evaluasi, dan mengkonfirmasi pemahaman parameter evaluasi.

3. *Engage Stakeholder* (Keterkaitan Stakeholder)

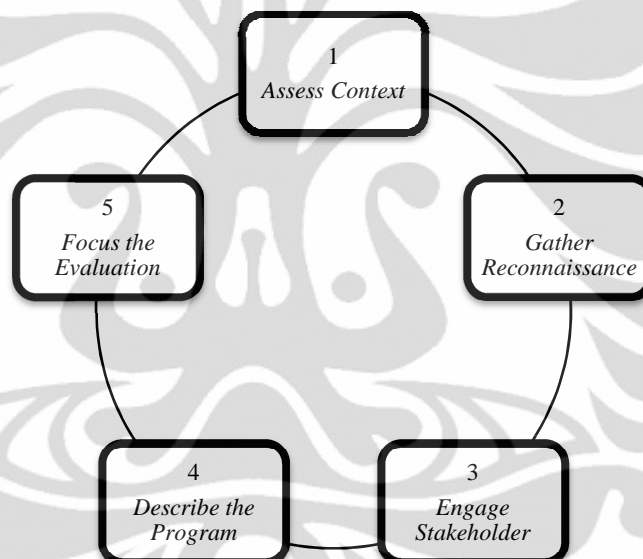
Selama proses evaluasi program, pengevaluasi mengidentifikasi *stakeholder* potensial untuk menghubungkannya ke dalam evaluasi. Walaupun pihak sponsor mempunyai daftar orang yang terlibat dalam *stakeholder*, pengevaluasi tetap mengidentifikasi yang lain yang termasuk ke dalam proses perencanaan. *Stakeholder* kemungkinan termasuk dalam pengambil keputusan yang memutuskan apakah program tetap dilanjutkan setelah terlihat hasilnya. Setelah para *stakeholder* ditemukan, pengevaluasi perlu bekerjasama dengan pihak sponsor untuk mengetahui peraturan *stakeholder* di dalam proses perencanaan dan menyusun proses untuk memperoleh pemakaian sistematis dan waktu.

4. *Describe the Program* (Mendeskripsikan Program)

Pada langkah keempat, melibatkan seluruh aspek program dan mengidentifikasi dasar konsep di balik tujuan program. Pengevaluasi dapat meningkatkan alat untuk menyampaikan maksud dari program tersebut, seperti matriks perencanaan evaluasi, spesifikasi pertanyaan evaluasi, dan mengkorespondensi manfaat dan sumber data.

### 5. *Focus the Evaluation* (Fokus pada Evaluasi)

Pada langkah kelima, pengevaluasi memimpin proses untuk mengakhiri rencana evaluasi. Pada langkah ini, pengevaluasi harus mempunyai daftar pertanyaan evaluasi komprehensif yang potensial dan manfaat untuk dimasukkan ke dalam rencana evaluasi akhir. Pada proses ini, jarang melibatkan *stakeholder*. Faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan dalam memprioritaskan pertanyaan evaluasi yaitu kemungkinan data kolektor dan apakah menjatuhkan beban yang tidak semestinya pada staf program, terlalu lama mengadakan atau menjawab pertanyaan penting pada pihak sponsor dan *stakeholder*.



Sumber: Diolah kembali dari Debra J. Holden dan Marc Zimmerman, 2009: 2.

**Gambar 2.2 EPIC Model**

Masing-masing model pada EPIC Model ini penting digunakan pada perencanaan untuk evaluasi program pada setiap keadaan, tetapi waktu yang dibagikan untuk melakukan evaluasi perencanaan akan berpengaruh besar kepada pengevaluasi yang berhasil menyelesaikan seluruh fase evaluasi.

#### 2.1.4 Bentuk Evaluasi

Berkaitan dengan konsep evaluasi, terdapat tiga bentuk evaluasi, yakni *formative evaluation*, *summative evaluation*, dan *empowerment evaluation* (Dale,



2004: 33). Pertama, evaluasi formatif (*formative evaluation*) merupakan penilaian untuk meningkatkan kinerja atau kinerja program, biasanya dilakukan saat program masih atau sedang berjalan. Evaluasi seperti ini banyak dilakukan di pertengahan program, dimaksudkan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan jadwal sehingga tujuan dapat tercapai tepat waktu.

Kedua, evaluasi sumatif (*summative evaluation*) adalah evaluasi di akhir program untuk memastikan bahwa program yang dijalankan berhasil atau gagal menurut tujuan program. Penilaian seperti ini diperlukan untuk memastikan bahwa jika program yang sama diterapkan di tempat lain yang konteksnya relatif sama maka akan diperoleh tingkat keberhasilan yang sama pula. Oleh sebab itu, dalam evaluasi sumatif, penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap elemen perencanaan dan variabel tujuan yang hendak dicapai.

Ketiga, evaluasi pemberdayaan (*empowerment evaluation*) adalah penilaian untuk melihat tingkat keberhasilan kegiatan atau program menurut ukuran pemberdayaan, seperti *capacity building*, kemampuan mengelola organisasi, peningkatan kesadaran pemanfaat serta aspek lain terkait dengan konsep pemberdayaan. Dengan tujuan program seperti ini, maka penilaian hasil program berbeda dengan bentuk evaluasi lainnya, yakni menilai seberapa besar tingkat kemandirian penerima jika program sepenuhnya dilaksanakan mereka.

Suharto (2005: 45) menjelaskan terdapat tiga bentuk evaluasi, pertama evaluasi tahap perencanaan, adalah evaluasi yang dilakukan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Kedua, evaluasi tahap pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan *monitoring*. Ketiga, evaluasi tahap pasca pelaksanaan yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan *monitoring* bertujuan melihat pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.

Model evaluasi program *Provus's Discrepancy Model*, yaitu model evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesesuaian atau kesenjangan (*discrepancy*) antara standar yang ditentukan dalam program dengan faktual dari suatu program dengan tahapan:

1. Tahapan penyusunan (*disain*)

Pada tahap ini dilakukan kegiatan merumuskan standar dalam bentuk rumusan menunjukkan pada suatu yang dapat diukur. Rumusan standar ini merupakan acuan yang digunakan evaluator dalam membandingkan antara *performances* dengan standar.

2. Tahap pemasangan instalasi (*installation*)

Pada tahap ini dilakukan pengecekan kelengkapan instalasi, apakah sesuai dengan yang diperlukan atau belum. Konkritnya pada tahapan ini dilakukan tahapan peninjauan kembali ketepatan standar, peninjauan kembali isi program yang akan dievaluasi.

3. Tahap Proses (*process*)

Pada tahap ini melakukan evaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan.

4. Tahap pengukuran tujuan (*product*)

Mengadakan analisis data sejauh mana keberhasilan tujuan program tercapai.

5. Tahap perbandingan (*comparison*)

Tahapan ini berisi tentang semua temuan tentang kesenjangan.

## **2.2 Feasibility Studies**

Pada hakekatnya *feasibility study* (studi kelayakan) adalah suatu metode penjajakan dari suatu gagasan usaha untuk menilai kemungkinan layak tidaknya

gagasan usaha tersebut dilaksanakan. Wolfe berpendapat, *a feasibility study looks at the viability of an idea with an emphasis on identifying potential problems and attempts to answer one main question: Will the idea work and should you proceed with it?* (womeninbusiness.about.com). Studi kelayakan dapat pula diartikan sebagai penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil.

Kriteria keberhasilan/kelayakan suatu proyek tergantung sudut pandang dari pihak yg berkepentingan terhadap keberadaan suatu proyek; dapat dalam pengertian yg luas tapi dapat pula terbatas. Bagi pengusaha, kriteria keberhasilan/kelayakan proyek lebih difokuskan pada manfaat ekonomis suatu investasi, tapi dari pihak pemerintah (lembaga non profit) kriteria keberhasilan/kelayakan proyek dapat diartikan yg relatif lebih luas, karena dapat dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya yang berlebih di suatu tempat, penghematan devisa ataupun penambahan devisa. Masur dan Posner (2010: 657) menjelaskan bahwa studi tentang feasibility cara pemerintah untuk melakukan evaluasi peraturan dengan menggunakan metode analisis biaya dan manfaat, *a method of evaluating government regulations, has emerged as the major alternative to cost-benefit analysis (CBA)*.

Studi kelayakan pada intinya merupakan pengkajian yang bersifat menyeluruh dan mencoba menyoroti segala aspek untuk menetapkan pentingnya suatu usulan proyek serta menilai kelayakan pelaksanaan suatu proyek. Seperti yang diungkapkan oleh Urkiagaa, dkk. (2006: 264), *feasibility is defined as an evaluation or analysis of the potential impact of a proposed project or program. It is conducted to assist decision-makers in determining whether or not to implement a particular project or program*. Studi kelayakan dibutuhkan karena secara umum, semua proyek investasi yang akan dijalankan butuh dana dalam implementasinya.

Proyek investasi akan mempengaruhi operasi organisasi di masa yang akan datang, untuk itu perlu hati-hati dalam keputusan untuk pelaksanaan suatu proyek. *It will contain extensive data related to financial and operational impact and will include advantages and disadvantages of both the current situation and the proposed plan* (Urkiagaa, dkk., 2006: 264). Salah satu kegagalan proyek

bersumber dari kesalahan dalam keputusan dan penilaian alternatif usulan proyek, di samping karena kesalahan dalam pengelolaan proyek ketika sudah berjalan dan karena faktor yang sulit dikendalikan seperti kondisi ekonomi, lingkungan yang berubah, politik, sosial dan faktor lain di luar dugaan.

Tujuan studi kelayakan, yaitu mempelajari dan menilai suatu gagasan usaha/proyek dari segala aspek secara profesional agar setelah gagasan usaha/proyek tersebut diterima dan dilaksanakan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan serta tidak mengalami kegagalan. *The purpose of a Feasibility Study is to identify the likelihood of one or more solutions meeting the stated business requirements. The outcome of the Feasibility Study is a confirmed solution for implementation* (<http://www.method123.com/feasibility-study.php>). Studi kelayakan tidak hanya dibutuhkan pada gagasan usaha/proyek yang butuh dana investasi yang sangat besar (proyek raksasa) tapi setiap rencana usaha/proyek harus melaksanakan studi kelayakan, termasuk usaha kecil atau proyek yang sederhana. Perbedaan studi kelayakan pada tiap proyek terletak pada kedalaman analisis (*magnitude*) yg dibutuhkan yaitu menyangkut ruang lingkup aspek yang dikaji, sistem manajemen, disiplin ilmu, dan teknik atau metodologi yg digunakan.

Manfaat studi kelayakan secara umum, yaitu memberikan informasi yang memadai untuk pelaksanaan proyek (sebagai bahan input dalam pengambilan keputusan tentang kelangsungan suatu usulan proyek); memberikan kesempatan untuk penyusunan/desain proyek agar sesuai dan tepat dengan lingkungan fisik dan sosial di mana proyek akan beroperasi; serta memberikan kepastian bahwa proyek akan memberikan hasil yg optimal. Manfaat secara khusus, yaitu manfaat ekonomis bagi proyek itu sendiri (manfaat finansial), apakah proyek dipandang cukup menguntungkan bila dibandingkan dengan risiko yg akan dihadapi. Manfaat ekonomis bagi negara tempat proyek beroperasi (manfaat ekonomi nasional), apakah proyek memberi manfaat bagi ekonomi makro suatu negara. Manfaat sosial proyek, apakah proyek memberi manfaat bagi masyarakat sekitar proyek.

<b>GDV</b>	<b>-</b>	<b>Total Costs</b>	<b>=</b>	<b>Site Value</b>
<b>Gross Development Value:</b> Value of completed development		All construction costs including interest payable on short-term funds, sales/letting fees, developer's profit and professional fees		<b>Net Residual Value:</b> Maximum bid for site including acquisition fees, taxes and interest on money borrowed for site purchase

Sumber: French dan Gabrielli, 2005

### Gambar 2.3 Cara Sederhana dalam Menghitung Keuntungan Masa Depan

Faktor-faktor penentu intensitas studi kelayakan, yaitu besarnya dana yang diinvestasikan, umumnya semakin besar jumlah dana yg ditanamkan, semakin mendalam studi yang perlu dilakukan. Tingkat ketidakpastian proyek, semakin sulit dalam memperkirakan penghasilan penjualan, aliran kas, biaya proyek dan sebagainya, semakin hati-hati dalam melakukan studi kelayakan. Kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek, semakin banyak unsur yang mempengaruhi keberadaan suatu proyek, semakin mendalam dan hati-hati studi kelayakan yang harus dilakukan. Namun secara sederhana, studi kelayakan dapat dihitung berdasarkan keuntungan yang didapat dikurangi dengan biaya yang ditanggung sehingga menghasilkan keuntungan nilai akhir (**Gambar 2.3**). Seperti yang dijelaskan oleh Nick dan Gabrielli (2006: 50),

*In principle, the method of approach is to ascertain the present capital value of an estimated future income (the gross development value, or GDV), and then to deduct from that the cost of all works needed to complete the development to a standard able to command such a future income, the residual figure representing the developer's maximum bid for the site question.*

Ada pun tahap-tahap studi kelayakan, yaitu:

1. Identifikasi kesempatan berusaha/investasi. Sponsor proyek melihat adanya kesempatan investasi yang mungkin menguntungkan. Pengamatan dilakukan terhadap lingkungan untuk memperkirakan kesempatan dan ancaman dari suatu usaha/investasi.

2. Perumusan, yaitu menerjemahkan kesempatan investasi ke dalam suatu rencana proyek yang konkrit dengan penjelasan pada faktor-faktor yang penting secara garis besar.
3. Pengkajian/penilaian pendahuluan, yaitu melakukan analisis dan penilaian terhadap beberapa aspek yang penting (pasar, teknis, keuangan, manajemen, dsb).
4. Melakukan pemilihan dan membuat kerangka acuan (tor) yang memuat rumusan pokok tujuan dan lingkup gagasan investasi sebagai hasil dari tahap 3 yang dituangkan dalam bentuk tertulis (dokumentasi).
5. Menyusun desain pendahuluan (*preliminary design*), yaitu desain dari studi kelayakan yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan spesifik dari suatu proyek.

### **2.3 Alternative Development**

Pada kerangka pemikiran *Alternative Development*, peneliti membaginya menjadi empat, yaitu pengertian *alternative development*, tujuan dan sasaran *alternative development*, konsep evaluasi kerja *alternative development*, dan kualitatif evaluasi program *alternative development*. Pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami teori yang kemudian dapat digunakan untuk membantu menguji teori.

#### **2.3.1 Pengertian *Alternative Development***

Pada awalnya, pembangunan alternatif merupakan konsep dalam pemberantasan narkoba jenis opium dan kokain. Seperti yang diungkapkan oleh Kanok Rerkasem dalam Sanong (2002: 9), yaitu:

*Alternative development is a recent development paradigm and the term was, perhaps, introduced by UNODC in the middle of 1990s. The root of the AD concept may be dated back to late 1940s when the Chinese Government had successfully eliminated the cultivation of illicit opium*

*poppy in the major growing area such as in the southwestern part of the Mainland China, i.e., Yunnan province (McCoy 1972 and Rerkasem 2000).*

Konsep *alternative development* merupakan konsep yang dibuat oleh UNODC dipertengahan tahun 1990-an. Konsepnya diadopsi dari cerita kesuksesan China dalam melakukan penghentian penanaman opium.

Namun, saat ini tidak hanya opium dan kokain yang dijadikan sebagai proyek utama di dalam *alternative development*, akan tetapi ganja juga termasuk didalamnya. Pemberantasan yang dilakukan dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di daerah terpencil tempat ditanamnya opium, kokain dan ganja. Penyebab masyarakat menanam kokain, opium, dan ganja karena faktor kemiskinan. Kramer (2010: 3) menjelaskan *poverty remains the key factor driving opium cultivation in Laos and Myanmar*. Dibutuhkan usaha melalui pendekatan secara integral terhadap permasalahan tersebut, seperti yang dipaparkan di dalam makalah European Union dalam Kramer (2010: 3):

*Illicit drug crop cultivation is concentrated in areas where conflict, insecurity and vulnerability prevail. Poor health, illiteracy and limited social and physical infrastructure reflect the low level of human development experienced by the population in these areas. These conditions constrain the implementation of programmes designed to reduce illicit drug crop cultivation and improve the lives and livelihoods of farmers.*

Pemutusan mata rantai penanaman opium, kokain dan ganja difokuskan di area konflik, tidak aman dan miskin. Tingkat kesehatan yang buruk, terbatasnya akses sosial dan infrastruktur yang rendah menjadi ciri bahwa *human development* di daerah tersebut masih rendah. Maka dari itu, dibutuhkan implementasi program yang sengaja didisain untuk memutus mata rantai penanaman opium, kokain dan ganja serta didisain agar mampu meningkatkan taraf hidup petani.

Hasil dari sidang pertemuan The United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) pada tanggal 8 s.d. 10 Juni 1998 (UNDCCP, 2001: 7) menyepakati bahwa definisi dari *alternative development* berdasarkan resolution S-20/4 E, yaitu:

*as a process to prevent and eliminate the illicit cultivation of plants containing narcotic drugs and psychotropic substances through specifically designed rural development measures in the context of sustained national economic growth and sustainable development efforts in countries taking action against drugs, recognizing the particular sociocultural characteristics of the target communities and groups, within the framework of a comprehensive and permanent solution to the problem of illicit drugs (UNDCCP, 2001: 3).*

Secara konseptual, yang dimaksud dengan pembangunan alternatif adalah upaya suatu proses yang dilakukan oleh lembaga dalam mengurangi peredaran gelap narkoba dengan memberikan pembangunan alternatif di tempat penanaman narkoba dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi komunitas, sosial budaya dan dijalankan secara berkesinambungan (*sustainable*) (UNDCCP, 2001: 4). Khamer (2010: 5) mendefinisikan bahwa *alternative development is a comprehensive approach to improving community livelihood options; it is not limited to the reduction of illicit crop production*. Diketahui bahwa *alternative development* merupakan suatu pendekatan secara komprehensif untuk membangun kehidupan dari masyarakat.

*Alternative development* adalah suatu langkah untuk mencegah dan memusnahkan penanaman gelap tanam-tanaman yang mengandung narkotika melalui kebijakan pembangunan yang didesain khusus dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Laporan Penelitian Aceh, 2010: 4). Hal ini dapat dikatakan bahwa program *alternative development* adalah suatu langkah untuk mencegah dan memusnahkan penanaman gelap, tanaman-tanaman yang mengandung narkotika melalui kebijakan pembangunan yang didesain dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Renard, 2007: 18).



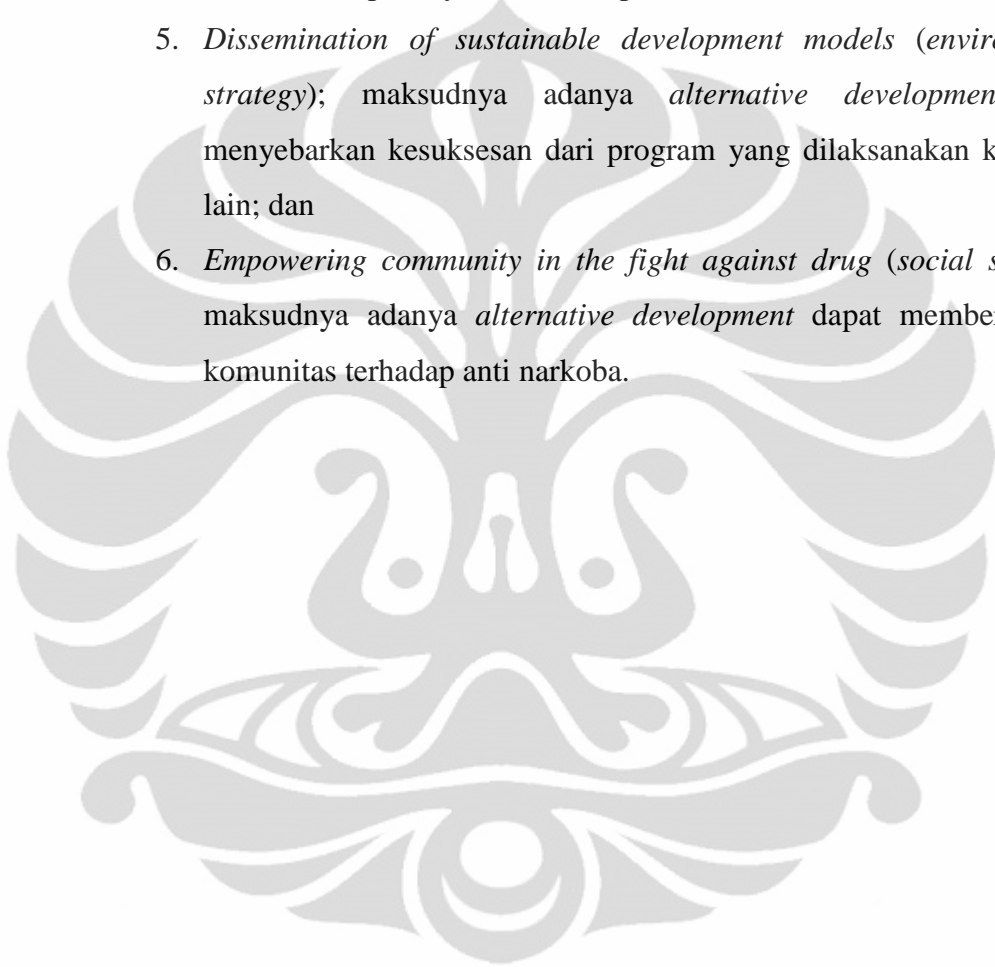
Pembangunan alternatif dalam penelitian ini merupakan bagian dari strategi memberantas tanaman ganja, dengan memperhatikan secara khusus karakter sosial budaya masyarakat setempat. Program *alternative development* dilakukan secara terpadu dengan langkah penegakan hukum dapat memberikan dampak optimal dalam menghilangkan kegiatan bertanam ganja oleh sebagian petani di Aceh.

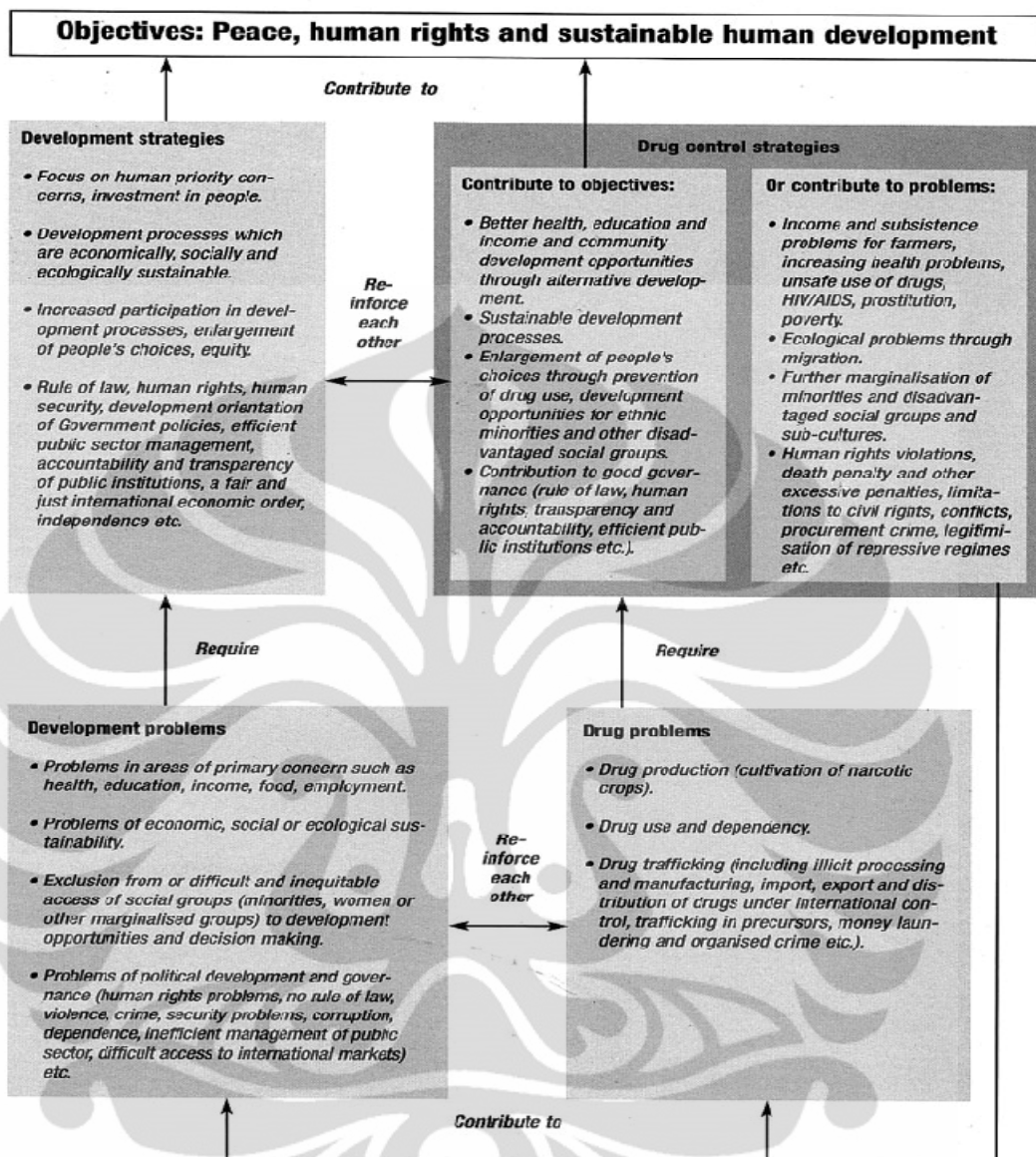
### 2.3.2 Tujuan dan Sasaran *Alternative Development*

Kanok Rerkasem dalam Sanong (2002: 21) memberikan penjelasan terdapat dua yang menjadi tujuan dari *alternative development*, yaitu:

- a. *To reduce the supply of raw materials for drug production*, di bagian ini ditekankan agar dilaksanakannya *alternative development*, sebagai upaya untuk mengurangi penawaran dari produksi narkoba. Dengan kata lain, bahwa *alternative development* memberikan efek yang positif bahwa narkoba mampu dihentikan melalui *alternative development*.
- b. *To consolidate a licit economy, allowing regions to return to the mainstream economic and social development of the country*. Bagian ini memberikan penekanan bahwa *alternative development* agar pembangunan ditekankan pada aspek ekonomi dan sosial. Hal ini disebabkan keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan menjadi faktor penyebab tumbuhnya narkoba. Adapun komponen strategi yang ditekankan untuk mencapai *alternative development* yang sesuai dengan harapan, yaitu:
  1. *Income substitution (economic and productive strategy)*, maksudnya adanya *alternative development* dapat mengalihkan profesi ilegal yang selama ini mereka tekuni ke profesi legal;
  2. *Establishment of conditions of peace and legality (political strategy)*; maksudnya adanya *alternative development* dapat menjamin keamanan untuk tidak terjadi penangkapan terhadap petani yang belum alih profesi;

3. *Strengthening farmers' organizations (organizational strategy)*; maksudnya adanya *alternative development* dapat mendukung jalannya organisasi pertanian di daerah setempat;
4. *Improving quality of life of the people involved (social strategy)*; maksudnya adanya *alternative development* dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat;
5. *Dissemination of sustainable development models (environmental strategy)*; maksudnya adanya *alternative development* dapat menyebarkan kesuksesan dari program yang dilaksanakan ke daerah lain; dan
6. *Empowering community in the fight against drug (social strategy)*; maksudnya adanya *alternative development* dapat memberdayakan komunitas terhadap anti narkoba.





Sumber: Berg, 1998: 74

### Gambar 2.4 Konsep Kerja *Alternative Development* untuk Asia Tenggara

Konsep kerja dari *alternative development*, antara lain Kanok Rerkasem dalam Sanong (2002: 22), menjelaskan:

1. Pembangunan didasarkan kepada *sustainable human development*, yang memiliki tahap-tahap pekerjaan, yaitu:
  - a. *Focus on people priority and their basic needs;*
  - b. *Ensuring ecological but also social and cultural sustainability;*
  - c. *Participation in and equitable access of people to economic, social, cultural and political processes that affect their lives;* dan

- d. *The need for good governance*. Pemerintah yang dimaksud di sini adalah pemerintah yang memiliki ciri menekankan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektif dan ekuitas, dan mampu menjunjung penegakan hukum dan HAM.
2. *Development* dijadikan sebagai alat untuk mengontrol narkoba (*development as a tool for drug control*), seperti *alternative development* sebagai upaya untuk memperkecil penawaran (*supply reduction*), *demand reduction*, dan *law enforcement*.
3. Menjadikan pencegahan narkoba sebagai alat untuk pembangunan (*drug control as a tool for development*), di antaranya *a measurable impact on basic needs and human priority*, *measurable impact on social, economic and ecological sustainability*, *measurable impact on participation and equitability*, dan *measurable impact on good governance*

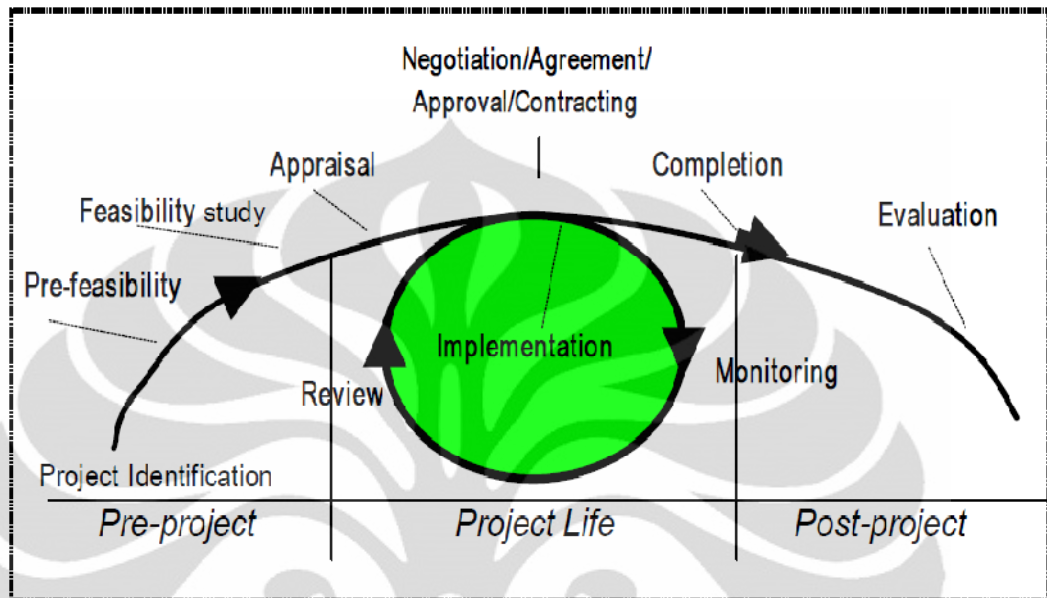
Mansfield (1999: 26) menjelaskan terdapat ukuran yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan alternatif, yaitu

1. Peralatan bercocok tanam. Peralatan bercocok tanam ini disediakan agar dapat digunakan untuk pengolahan lahan setelah petani narkoba berganti profesi cocok tanamnya.
2. Ketersediaan lahan garapan. Ketersediaan lahan untuk dipergunakan sebagai lahan pengganti tanaman narkoba.
3. Petani. Petani yang mau mengerjakan lahan garapan yang telah disediakan.
4. Lembaga Simpan-pinjaman. Lembaga ini diperuntukkan bagi petani yang membutuhkan modal dalam menggarap ladang yang akan diolahnya.
5. Lalu lintas perdagangan. Lalu lintas ini ada sebagai jawaban atas pasar yang dapat diambil oleh petani setelah panen. Sehingga tidak lagi harus memikirkan berapa harga jual dan kepada siapa hasil panen ini akan dibeli.

### 2.3.3 Konsep Evaluasi Kerja *Alternative Development*

Sebelum masuk ke dalam mengenai konsep evaluasi kerja, terdapat siklus proyek yang harus dipahami dalam mengkaji *alternative development* (**Gambar 2.5**). Terdapat tiga fase dalam pembentukan sebuah proyek, yaitu fase *Pre-Project*, *Project Life*, dan *Post-Project* (Sanong, 2002: 32). Pada penelitian ini,

masuk dalam fase *Post-Project*. Hal ini dikarenakan fase *alternative development* alih fungsi lahan di Mukim Lamteuba, Aceh Besar sudah berlangsung lebih dari 2-3 tahun berjalan, yang artinya dapat dilakukan evaluasi.



Sumber: Satiean Sriboonruang and Chaiwat Roongruengsee dalam Sanong, 2002.

**Gambar 2.5 Siklus Proyek**

Terdapat konsep kerja dalam melakukan evaluasi *alternative development* yang dijelaskan oleh Satiean Sriboonruang dalam Sanong (2002: 47) *the evaluation of the AD project is actually intended to be both formative and summative*. Penggunaan teori yang tepat dalam melakukan evaluasi *alternative development* adalah dengan menggunakan evaluasi formatif dan sumatif. Hal ini dikarenakan dapat memberikan gambaran khususnya *outcome* yang berguna bagi pimpinan proyek dalam mengambil kebijakan. Di samping itu juga, berguna bagi *stakeholders*, masyarakat atau individu yang tertarik dengan *alternative development* karena memiliki informasi yang akurat dan tepat, informasi terkait dengan hasil pekerjaan yang dibutuhkan lembaga simpan-pinjam untuk mengevaluasi keuangan yang telah diserap.

### 2.3.4 Kualitatif Evaluasi Program *Alternative Development*

Sriboonruang dalam Sanong (2002: 48) memberikan penjelasan bahwa terdapat dua metode dalam mengevaluasi *alternative development*, yaitu kuantitatif dengan kualitatif. Sriboonruang (2002) dalam mengevaluasi *alternative development* dengan menggunakan metode kualitatif terdapat tiga indikator yang dievaluasi, yaitu input, proses, dan output. Indikator input yang dievaluasi (Sanong, 2002: 48), antara lain:

1. Motivasi petani ikut serta dalam program *alternative development*;
2. Jumlah petani yang ikut serta dalam program *alternative development*;
3. Pendapat petani terkait dengan pelatihan yang diselenggarakan;
4. Kualitas dari bahan baku produksi yang diberikan kepada petani;
5. Sosial-ekonomi dan karakter demografi dari petani (contoh: jumlah dalam satu keluarga, besar-kecilnya ukuran ladang serta bagaimana lokasinya, tipe pertanian yang dikuasai dan kemampuan asesmen dari pelatihan yang diikuti).

Sedangkan indikator proses yang dievaluasi, antara lain:

1. Frekuensi dan durasi dari informasi terkait dengan sistem bercocok tanam yang tepat serta teknologi yang terkait;
2. Kualitas dari pengetahuan petani (indikator input) terkait dengan penggunaan teknologi;
3. Kemampuan beradaptasi atau berkolaborasi dengan petani di luar wilayahnya (*difficulties encountered by farmers including frequency and duration of collaboration with other farmers within and outside their own village*);
4. *Types of activities performed in the field*;
5. Kondisi organisasi dari petani;
6. Faktor kontribusi sebagai pendukung terhadap kesuksesan partisipasi;
7. *The changes in pedagogical processes due to introducing alternative High Yield Variety (HYV) cash crops to villagers in each area.*

Terakhir, indikator output yang dievaluasi, antara lain:

1. Kepuasan petani;
2. *Ability to transform marketing information and to represent it dynamically;*
3. *Farmers' ability and willingness to share resources and work collaboratively.*

## 2.4 Definisi Operasional

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi perencanaan program yang dikemukakan oleh Debra J. Holden dan Marc Zimmerman (2009: 2). Peneliti menggabungkan beberapa teori yang dikemukakan oleh D. Mansfield (1999: 26), Dale (2004: 33) dan Sriboonruang (2002: 29) sehingga dapat dirumuskan dalam definisi operasional berikut ini (**Tabel 2.1**):

**Tabel 2.1 Definisi Operasional**

Variabel	Definisi
Evaluasi Perencanaan Program	<p>(1) <i>assess context</i>,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dari pengetahuan petani (indikator input) terkait dengan penggunaan teknologi;</li> <li>2. <i>Types of activities performed in the field;</i></li> <li>3. Faktor kontribusi sebagai pendukung terhadap kesuksesan partisipasi;</li> <li>4. Peralatan untuk bercocok tanam, ketersediaan lahan, petani, lembaga simpan pinjam, dan lalu lintas (akses) perdagangan hasil dari usaha para petani.</li> </ol> <p>(2) <i>gather reconnaissance</i>,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi petani ikut serta dalam program <i>alternative development</i>;</li> <li>2. Jumlah petani yang ikut serta dalam program <i>alternative development</i>;</li> </ol> <p>(3) <i>engage stakeholders</i>,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat dapat menjalankan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang terbentuk</li> <li>2. Minimnya keterlibatan pemerintah/NGO dalam organisasi bentukan rakyat</li> </ol> <p>(4) <i>describe the program</i>, dan <i>Feasibility Studies</i></p> <p>(5) <i>focus the evaluation</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program berjalan sesuai rencana dan jadwal</li> <li>2. Program yang dijalankan sesuai dengan tujuan program <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>to reduce the supply of raw materials for drug production</i></li> <li>2. <i>to consolidate a licit economy, allowing regions to return to the mainstream economic and social development of the country</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Income substitution (economic and productive strategy)</i></li> <li>2. <i>Establishment of conditions of peace and legality (political strategy)</i></li> <li>3. <i>Improving quality of life of the people involved (social strategy)</i></li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. <i>Capacity building</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Strengthening farmers' organizations (organizational strategy)</i></li> <li>2. <i>Empowering community in the fight against drug (social strategy)</i></li> </ol> </li> </ol>

## 2.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini termasuk dalam bidang administrasi publik karena secara spesifik meneliti dimensi-dimensi utama yang langsung dalam evaluasi program yang dilakukan oleh pemerintah/birokrasi. Hal ini diperuntukkan agar sebuah program yang dijalankan oleh pemerintah/birokrasi dapat tercapai tujuannya. Sebagai bahan rujukan, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti mengambil tujuh penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang kurang lebih relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti berharap dapat memberikan informasi yang lebih dalam mengenai topik penelitian yang akan dilakukan.

Rujukan yang pertama diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Sudhiani Pratiwi (Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)) dengan judul penelitian *Local Community Participation in Ecotourism Development: a Critical Analysis of Selected Published Literature*. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2006 dan dipublikasikan di Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. XII No. 2: 69-77. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah Fenomenologi dengan tujuan dan manfaat penelitian, yaitu menganalisis masyarakat lokal dalam berpartisipasi atau dilibatkan dalam pengembangan ekowisata melalui identifikasi proses penetapan tujuan pengembangan ekowisata dan level partisipasi dimana masyarakat terlibat atau dilibatkan. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang merupakan tujuan dari kebanyakan pengembangan ekowisata adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal. Tujuan kegiatan ini umumnya ditetapkan oleh pihak luar (*outsider driven*) dan masyarakat lokal hanya dilibatkan hanya pada level pelaksanaan (*process nominal and action initiation*).

Rujukan penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Jan Nederveen Pieterse (Dosen di *Institute of Social Studies, Hague, Netherlands*) dengan judul penelitian *My Paradigm or Yours? Alternative Development, Post-Development, Reflexive Development*. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 1998 dan dipublikasikan di Jurnal *Development and Change* Vol. 29 (1998), 343-373. *Institute of Social Studies 1998 Blackwell Publishers Ltd, 108 Cowley Rd,*



*Oxford OX4 IJF, UK*. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah *criticivism* dengan tujuan dan manfaat penelitian, yaitu menjelaskan tentang makna dari *alternative development* yang berkembang, apakah konsep ini menjelaskan tentang kritik, model pembangunan, model dari agen pembangunan, metodologi, atau epistemologi. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya yaitu *alternative development* merupakan suatu paradigma berkembang. *Post-development* bisa diinterpretasikan sebagai reaksi *neo-traditionalist* melawan *modernity*. Sedangkan *reflexive development*, yang merupakan bagian dari kritik sosial memiliki pandangan sebagai bagian dari politik pembangunan.

Rujukan penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Dody Prayogo (Dosen dan Peneliti di Departemen Sosiologi Universitas Indonesia) dengan judul penelitian *Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development pada Industri Tambang dan Migas*. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2011 dan dipublikasikan di Jurnal Makara, Sosial Humaniora, vol. 15, No. 1, Juli 2011: 43-58. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan dan manfaat penelitian mendeskripsikan korporasi telah melaksanakan program *Cooperate Social Responsibility (CSR)* dan *Community Development (CD)* secara baik.

Hasil dari penelitiannya adalah korporasi telah melaksanakan program CSR dan CD secara baik. Terdapat tiga aspek penting terkait dengan hasil evaluasi program CSR dan CD yang baik, yakni pertama, berkenaan dengan *business performance*; kedua, berkenaan dengan *social legitimacy*; dan ketiga, *legal compliance*. Ketiga aspek ini sangat penting bagi keberhasilan baik korporasi secara khusus maupun industri tambang dan migas secara umum. Dalam aspek kinerja bisnis terdapat dua hal penting, yakni *corporate social performance*, kinerja yang berkait-erat dengan perilaku korporasi terhadap pemangku kepentingan sosial seperti terhadap komunitas lokal dan masyarakat umum, namun penting bagi pemangku kepentingan bisnis mereka.

Rujukan penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Ricardo Vargas (Asosiasi *Transnational Institute* of Amsterdam) dengan judul penelitian *Development Programs Strategies for Controlling the Drug Supply: Policy Recommendations to Deal with Illicit Crops and Alternative*. Penelitian tersebut

dilakukan pada tahun 2005 dan dipublikasikan di *Journal of Drug Issues: Florida State University College of Criminology and Criminal Justice*, 2005 35: 131-150. Penelitian ini menggunakan pendekatan *constructivism* dengan tujuan dan manfaat penelitian menguji aspek-aspek yang digunakan serta mencari alternatif strategi di dalam menjalankan kebijakan *alternative development*.

Hasil dari penelitiannya, terdapat dua aspek dalam melaksanakan program *alternative development*, yaitu kooperatif dari pihak pemerintah negara dengan pihak internasional dalam menjaga stabilitas pembimbingan. Kooperatifnya pihak pemerintah ditandai dengan konsistensi dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuatnya tanpa ada unsur politik yang bermain di dalam menjalankan program. Sedangkan dari aspek internasional ditekankan untuk melakukan pendekatan lebih dalam dengan mengutamakan keberlanjutan dari supervisi yang ditetapkan.

Rujukan penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Ricky Avenzora (Dosen di Studio Rekreasi Alam dan Ekowisata Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor) dengan judul penelitian *Nanggroe Aceh Darussalam Menuju Provinsi Hijau: Peluang dan Tantangan*. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2006 dan dipublikasikan di *Media Konservasi* Vol. XI, No. 3 Desember 2006 : 115 – 123.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan tujuan dan manfaat penelitian melakukan ulasan beberapa dinamika penting dari setiap elemen dan *stakeholder* yang sangat potensial dan harus bahu membahu dalam mewujudkan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai *Green Province* pertama di Indonesia, yaitu masyarakat, institusi kehutanan, dan lembaga swadaya kehutanan. Hasil dari penelitiannya adalah untuk mewujudkan NAD menjadi provinsi hijau yang maju dan sejahtera maka diperlukan kerja keras dalam memperkuat dan membudayakan potensi alam dan modal sosial yang dimiliki masyarakat Aceh. Selain itu juga perlu meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan serta memperluas *networking*.

Rujukan penelitian keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Susan J. Curry, Robin J. Mermelstein, Amy K. Sporer, Sherry L. Emery, Michael L. Berbaum, Richard T. Campbell, Charles Carusi, Brian Flay, Kristie Taylor, and Richard B. Warnecke (Mahasiswa dan Peneliti di *Public Health, University of Iowa, Iowa City, IA, USA; Institute for Health Research and Policy, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA; Westat, Rockville, MD, USA; dan Health and Human Sciences, Oregon State University, Corvallis, OR, USA*) dengan judul penelitian *A National Evaluation of Community-Based Youth Cessation Programs: Design and Implementation*. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2010 dan dipublikasikan di *Evaluation Review: Sage Publication*, 2010 34: 487-512.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif*. Tujuan dan manfaat melakukan identifikasi dan penggambaran program pengurangan tembakau di kalangan remaja Amerika dan melakukan evaluasi terhadap program komunitas pengurangan rokok sebagai upaya untuk memahami sukses tidaknya program pengurangan ini. Hasil dari penelitiannya adalah penelitian ini menggambarkan bahwa kesuksesan dari jalannya program komunitas pengurangan tembakau di kalangan remaja Amerika yaitu dengan mengikutsertakan partisipasi aktif dari objek program tersebut. Di samping itu, agar program ini berhasil maka dibutuhkan suatu usaha untuk menciptakan evaluasi program yang kontiniu dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan perubahan perkembangan atau dengan kata lain efektivitas dari program ini terlihat jelas trend perkembangannya.

Rujukan penelitian ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh D. Mansfield (Peneliti Ahli di bidang *Alternative Development* pada UNODC) dengan judul penelitian *Alternative Development: The Modern Thrust of Supply-Side Policy*. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 1999 dan dipublikasikan di dalam *Bulletin on Narcotics* vol. LI, Nos. 1 and 2, 1999 *Occasional Papers*. Tujuan dan manfaat penelitian penerapan AD diharapkan dapat memberikan dampak mampu mengurangi pertumbuhan ladang narkoba (Opium dan Kokain) di level lokal.

Hasil dari penelitiannya adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada trend agregat di dalam mengurangi ladang Opium dan Kokain di tingkat nasional,

regional dan desa khususnya aspek penekanan yang diambil adalah masalah sosial-ekonomi, budaya dan iklim/cuaca yang mempengaruhi kesuburan untuk penanaman ladang tersebut, yang nantinya akan menjadi dasar desian terhadap proyek AD. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk menciptakan kebijakan AD yang efektif, efisien serta berkelanjutan dibutuhkan pemahaman terhadap aspek multi fungsi sosial-ekonomi seperti kemampuan petani (*man power*), akses perbankan (simpan-pinjam) dan kerja sama dengan penegak hukum. Secara singkat ketujuh penelitian di atas dapat dilihat di tabel berikut (**Tabel 2.2**):



Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian

Perbandingan Peneliti	Konsep	Pendekatan	Tujuan dan Manfaat Penelitian	Hasil
<b>Sudhiani Pratiwi</b>	<i>Local Community Participation</i> dan <i>Ecotourism Development</i>	Fenomenologi	Menganalisis masyarakat lokal berpartisipasi atau dilibatkan dalam pengembangan ekowisata melalui identifikasi proses penetapan tujuan pengembangan ekowisata dan level partisipasi dimana masyarakat terlibat atau dilibatkan	Tujuan dari kebanyakan pengembangan ekowisata adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal. Namun, tujuan kegiatan ini umumnya ditetapkan oleh pihak luar ( <i>outsider driven</i> ) dan masyarakat lokal hanya dilibatkan hanya pada level pelaksanaan ( <i>process nominal and action initiation</i> )
<b>Jan Nederveen Pieterse</b>	<i>Alternative Development</i> , <i>Post-Development</i> dan <i>Reflexive Development</i>	<i>Criticivism</i>	Menjelaskan tentang makna dari <i>alternative development</i> yang berkembang, apakah konsep ini menjelaskan tentang kritik, model pembangunan, model dari agen pembangunan, metodologi, atau epistemologi.	<i>Alternative development</i> merupakan suatu paradigma berkembang. <i>Post-development</i> bisa diinterpretasikan sebagai reaksi <i>neo-traditionalist</i> melawan <i>modernity</i> . Sedangkan <i>reflexive development</i> , yang merupakan bagian dari kritik sosial memiliki pandangan sebagai bagian dari politik pembangunan.
<b>Dody Prayogo</b>	Evaluasi Program (Formative, Sumative dan Empowerment Evaluaiton) , CSR dan CD.	<i>Post-Postivism</i>	Mendeskripsikan korporasi telah melaksanakan program CSR dan CD secara baik	Korporasi telah melaksanakan program CSR dan CD secara baik. Terdapat tiga aspek penting terkait dengan hasil evaluasi program CSR dan CD yang baik, yakni pertama, berkenaan dengan <i>business performance</i> ; kedua, berkenaan dengan <i>social legitimacy</i> ; dan ketiga, <i>legal compliance</i> . Dalam aspek kinerja bisnis terdapat dua hal penting, yakni <i>corporate social performance</i> , kinerja yang berkait-erat dengan perilaku korporasi terhadap pemangku kepentingan sosial seperti terhadap komunitas lokal dan masyarakat umum, namun penting bagi pemangku kepentingan bisnis mereka.
<b>Ricardo Vargas</b>	<i>Strategi Controlling Drug Supply</i>	<i>Construtivism</i>	Menguji aspek-aspek yang digunakan serta mencari alternatif strategi di dalam menjalankan kebijakan <i>alternative development</i>	Terdapat dua aspek dalam melaksanakan program <i>alternative development</i> , yaitu kooperatif dari pihak pemerintah negara dengan pihak internasional dalam menjaga stabilitas pembimbingan. Kooperatifnya pihak pemerintah ditandai dengan konsistensi dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuatnya tanpa ada unsur politik yang bermain di dalam menjalankan program. Sedangkan dari aspek internasional ditekankan untuk melakukan pendekatan lebih dalam dengan mngutamakan keberlanjutan dari supervisi yang ditetapkan.

(sambungan)

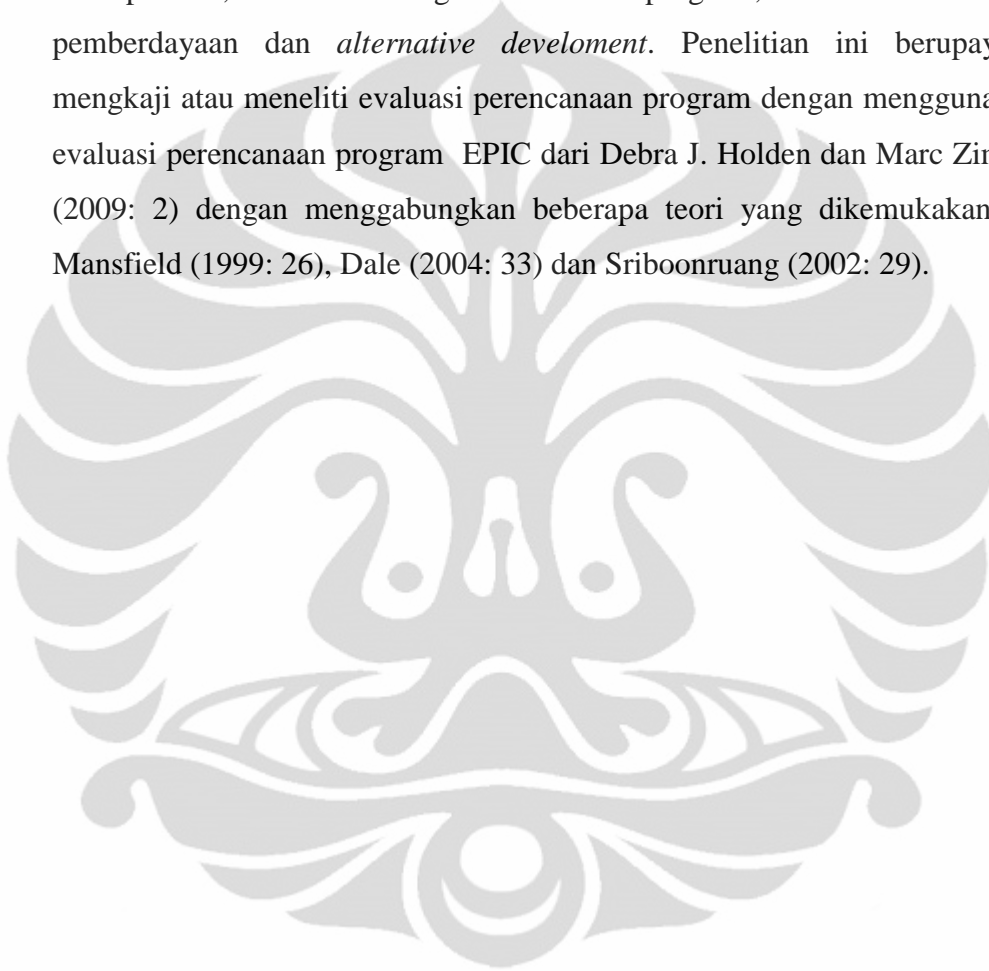
Perbandingan Peneliti	Konsep	Pendekatan	Tujuan dan Manfaat Penelitian	Hasil
<b>Ricky Avenzora</b>	Provinsi Hijau, NAD, dan Peluang-Tantangan	Kualitatif	Melakukan ulasan beberapa dinamika penting dari setiap elemen dan <i>stakeholder</i> yang sangat potensial dan harus bahu membahu dalam mewujudkan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Green Province pertama di Indonesia, yaitu masyarakat, institusi kehutanan, dan lembaga swadaya kehutanan	Mewujudkan NAD menjadi provinsi hijau yang maju dan sejahtera maka diperlukan kerja keras dalam memperkuat dan membudayakan potensi alam dan modal sosial yang dimiliki masyarakat Aceh. Selain itu juga perlu meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan serta memperluas <i>networking</i>
<b>Susan J. Curry, dkk</b>	<i>Evaluation dan Community-Based Youth Cessation Programs</i>	Kuantitatif	Melakukan identifikasi dan penggambaran program pengurangan tembakau dikalangan remaja Amerika dan melakukan evaluasi terhadap program komunitas pengurangan rokok sebagai upaya untuk memahami sukses tidaknya program pengurangan ini	Menggambarkan bahwa kesuksesan dari jalannya program komunitas pengurangan tembakau dikalangan remaja Amerika yaitu dengan mengikutsertakan partisipasi aktif dari objek program tersebut. Di samping itu, agar program ini berhasil maka dibutuhkan suatu usaha untuk menciptakan evaluasi program yang kontiniu dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan perubahan perkembangan atau dengan katalain efektivitas dari program ini terlihat jelas trend perkembangannya
<b>D. Mansfield</b>	<i>Alternative Development</i>	Kualitatif	Penerapan AD diharapkan dapat memberikan dampak mampu mengurangi pertumbuhan ladang narkoba (Opium dan Coca) di level lokal.	Penelitian yang dilakukan berfokus pada trend agregat di dalam mengurangi ladang Opium dan Coca di tingkat nasional, regional dan desa khususnya aspek penekanan yang diambil adalah masalah sosial-ekonomi, budaya dan iklim/cuaca yang mempengaruhi kesuburan untuk penanaman ladang tersebut, yang nantinya akan menjadi dasar desian terhadap proyek AD. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk menciptakan kebijakan AD yang efektif, efisien serta berkelanjutan dibutuhkan pemahaman terhadap aspek multi fungsi sosial-ekonomi seperti kemampuan petani ( <i>man power</i> ), akses perbankan ( <i>simpan-pinjam</i> ) dan kerja sama dengan penegak hukum.

Sumber: data diolah kembali dari penelitian.

Ketujuh penelitian sebelumnya menjadi bahan perbandingan terhadap penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada evaluasi

perencanaan program alih fungsi lahan di Mukim Lamteuba, Kec. Seulemeum, Kab. Aceh Besar, NAD. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menjadi acuan peneliti dalam membuat penelitian ini.

Melalui tinjauan kepustakaan terhadap ketujuh jurnal tersebut, diperoleh beberapa pengetahuan mendasar terkait dengan rencana penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terutama mengenai evaluasi program, model evaluasi program pemberdayaan dan *alternative development*. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji atau meneliti evaluasi perencanaan program dengan menggunakan teori evaluasi perencanaan program EPIC dari Debra J. Holden dan Marc Zimmerman (2009: 2) dengan menggabungkan beberapa teori yang dikemukakan oleh D. Mansfield (1999: 26), Dale (2004: 33) dan Sriboonruang (2002: 29).



## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *positivist*. Schrag (1992: 5) menjelaskan bahwa pendekatan *positivist* bermaksud untuk menyederhanakan bermacam interaksi manusia ke dalam bagian kecil variabel yang mudah. Penelitian ini berangkat dari teori mengenai evaluasi perencanaan program *alternative development*, dengan variabel *assess context*, *gather reconnaissance*, *engage stakeholders*, *describe the program*, dan *focus the evaluation*. Penelitian yang diangkat saat ini mencoba untuk melakukan evaluasi perencanaan program *alternative development* alih fungsi lahan ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul evaluasi perencanaan program *alternative development* alih fungsi lahan ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar, NAD, yaitu berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan sifat satu keadaan yang sementara berjalan saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu (Sevilla dkk., 1993: 71). Adapun penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskripsi karena penelitian ini mencoba memaparkan evaluasi perencanaan program *alternative development* dilihat dari *assess context*, *gather reconnaissance*, *engage stakeholders*, *describe the program*, dan *focus the evaluation*.

Penelitian ini menyajikan gambaran yang lengkap tentang program *alternative development* alih fungsi lahan ganja di Mukim Lamteuba, Aceh yang dilaksanakan oleh BNN, proses jalannya perencanaan program tersebut, serta analisa rencana program yang akan dilaksanakan di tahun 2012. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini adalah tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas (Prasetyo dan Jannah, 2005: 42).



Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni yang memiliki orientasi akademis dan ilmu pengetahuan yang dilakukan untuk memperdalam pengetahuan tentang teori evaluasi perencanaan program dan tanpa adanya tuntutan dari pihak sponsor. Bailey dalam Ranjit Kumar (1999: 8) mendefinisikan penelitian murni, *...involves developing and testing theories and hypotheses that are intellectually challenging to the researcher but may not have practical application at the present time or in the future...* . Penelitian murni memiliki pendekatan yang dibangun dan menguji suatu teori atas dasar intelektualitas dari peneliti bukan atas dasar penelitian aplikasi praktis.

Penelitian ini merupakan penelitian murni dikarenakan atas pemenuhan keinginan dan kebutuhan peneliti sehingga peneliti bebas menentukan tema penelitian dan dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan (Prasetyo dan Jannah, 2005: 45). Penelitian ini menggunakan teori evaluasi perencanaan. Selain itu, penelitian ini mencoba untuk melakukan *feasibility studies* terhadap rencana program alih fungsi lahan ganja ke tanaman jaboro dan nilam sehingga didapat gambaran yang komprehensif terhadap rencana pelaksanaan program yang akan dilaksanakan di tahun 2012..

Berdasarkan dimensi waktunya, jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian *cross sectional*, dimana penelitian ini hanya dilakukan pada satu waktu tertentu. Penelitian yang dimaksud bukan hanya satu hari saja, namun dilakukan dalam beberapa hari, minggu, dan bulan karena berbagai situasi dan keadaan untuk mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Penelitian ini dimulai sejak Januari sampai dengan Juni 2012, pengumpulan data di Aceh selama bulan Mei 2012 sedangkan pengumpulan data di Jakarta sejak Januari hingga Juni 2012.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk *field research*. *Field research* merupakan penelitian yang instrumennya menggunakan pedoman wawancara (Prasetyo dan Jannah, 2005: 38). Peneliti juga akan terjun langsung dalam kasus yang diteliti, yaitu mengumpulkan data mengenai *alternative development* alih fungsi lahan ganja di Mukim Lamteuba, Aceh. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang memiliki kompetensi dalam menjawab pertanyaan penelitian.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data sebagai kelengkapan dari penelitian, peneliti memperoleh informasi, data, petunjuk, dan bahan-bahan pendukung lainnya dengan menggunakan beberapa sumber data, baik berupa data primer maupun data sekunder. Umar (1997: 64) menyatakan data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan di dalam penelitian. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer atau orang lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Supramono dan Sugiarto, 1993: 99).

Terdapat empat tipe yang digunakan dalam pengumpulan data di penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara, *review* dokumen (studi kepustakaan), dan materi suara atau gambar (Creswell, 2003: 185-8). Kekuatan data hasil *indepth-interview* terletak pada peran dan posisi pemberi informasi (informan). Semakin relevan peran dan posisi informan dengan informasi yang dimaksud maka semakin kuat datanya. Kekuatan data hasil observasi terletak pada objekobjektivitas dan ketelitian dari keadaan atau kejadian yang dicatat dan difoto. Terkadang memang diperlukan interpretasi hasil catatan observasi karena data tidak bersifat fisik melainkan perilaku.

Berikut **tabel 3.1** yang memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan	Data Primer		Data Sekunder
	<i>Indepth</i>	Observasi	
Mencari data terkait dengan <i>Assess Context</i>	Alat: pedoman wawancara. Substansi: seluruh informasi berkaitan kultur, dinamika sosial, pola bertani di Mukim Lamteuba. Informan: tokoh masyarakat, ulama, dan akademisi. Pemilihan informan: <i>purposif</i> dan <i>snowball</i> .	Alat: pedoman observasi, dan foto. Cara kerja: catat dan foto kegiatan, kejadian dan bukti fisik terkait. Substansi: informasi lain yang relevan dengan sosio-kultur Mukim Lamteuba.	Alat: <i>list</i> kebutuhan data sekunder. Substansi: data-data penunjang berkenaan organisasi kemasyarakatan Mukim Lamteuba dan potensi daerah. Sumber: rumah kepala Mukim.
Mencari data terkait dengan <i>Gather Reconnaissance</i>	Alat: pedoman wawancara. Substansi: seluruh informasi berkaitan dengan motivasi petani ikut program <i>alternative development</i> . Informan: tokoh masyarakat dan BNN. Pemilihan informan: <i>purposif</i> dan <i>snowball</i> .	Alat: pedoman observasi, dan foto. Cara kerja: catat dan foto kegiatan, kejadian dan bukti fisik terkait. Substansi: informasi lain yang relevan dengan motivasi petani ikut dalam <i>alternative development</i> .	Alat: <i>list</i> kebutuhan data sekunder. Substansi: data-data penunjang berkenaan jumlah petani yang ikut <i>alternative development</i> . Sumber: BNN
Mencari data terkait dengan <i>Engage Stakeholders</i>	Alat: pedoman wawancara. Substansi: seluruh informasi berkaitan dengan organisasi bentukan masyarakat. Informan: tokoh masyarakat dan BNN. Pemilihan informan: <i>purposif</i> dan <i>snowball</i> .	Alat: pedoman observasi, dan foto. Cara kerja: catat dan foto kegiatan, kejadian dan bukti fisik terkait. Substansi: informasi lain yang relevan dengan organisasi kemasyarakatan mukim Lamteuba.	Alat: <i>list</i> kebutuhan data sekunder. Substansi: data-data penunjang berkenaan organisasi bentukan pemerintah dan masyarakat. Sumber: Kepala Mukim Lamteuba.
Mencari data terkait dengan <i>Describe The Program</i>	Alat: pedoman wawancara. Substansi: seluruh informasi berkaitan dengan rencana alih fungsi ganja ke jabon dan nilam. Informan: petani ganja, dinas kehutanan, NGO Caritas budidaya Nilam Aceh. Pemilihan informan: <i>purposif</i>	Alat: pedoman observasi, dan foto. Cara kerja: catat dan foto kegiatan, kejadian dan bukti fisik terkait. Substansi: informasi lain yang relevan dengan rencana program alih fungsi lahan jabon dan nilam.	Alat: <i>list</i> kebutuhan data sekunder. Substansi: data-data penunjang berkenaan cara menanam ganja, nilam dan jabon. Sumber: dinas kehutanan, kantor NGO dan BNN.
Mencari data terkait dengan <i>Focus The Evaluation</i>	Alat: pedoman wawancara. Substansi: seluruh informasi berkaitan dengan kinerja BNN dalam menjalankan program <i>alternative development</i> di Mukim Lamteuba. Informan: tokoh masyarakat, akademisi, dan BNN. Pemilihan informan: <i>purposif</i> dan <i>snowball</i> .	Alat: pedoman observasi, dan foto. Cara kerja: catat dan foto kegiatan, kejadian dan bukti fisik terkait. Substansi: informasi lain yang relevan dengan program <i>alternative development</i> .	Alat: <i>list</i> kebutuhan data sekunder. Substansi: data-data penunjang berkenaan rencana kerja yang dibuat. Sumber: BNN .

### 3.4 Narasumber/Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sejumlah informan yang potensial untuk dijadikan sebagai sumber informasi di dalam penyusunan rancangan penelitian ini. Seperti yang dijelaskan oleh Maykut dan Morehouse (1994: 40) bahwa informan dipilih secara selektif dan dipilih berdasarkan kemampuannya menjadi sampel penelitian. Untuk memenuhi keterwakilan dan kelengkapan informasi mengenai Program *alternative development*, maka peneliti mengambil perwakilan dari masing-masing pihak yang terlibat. Para informan tersebut diantaranya berasal dari:

1. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN,  
Informan ini dapat memberikan gambaran secara lengkap terkait proses pembentukan rencana program *alternative development*.
2. Kelompok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN,  
Informan ini memberikan pengetahuan terhadap peneliti terkait dengan cita-cita dasar pembentukan program *alternative development*.
3. Pelaksana Program *Alternative Development*,  
Informan ini memberikan kontribusi terkait dengan kondisi lapangan dalam pelaksanaan program *alternative development* di Mukim yang menjadi objek program.
4. Tokoh Masyarakat Mukim Lamteuba dan Masyarakat Peserta Program *Alternative Development*,  
Informan yang ada di tempat program ini dilaksanakan, merupakan informan yang memiliki dampak secara langsung atas program baik yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan atau program yang akan dilaksanakan.
5. Dinas Kehutanan, dan  
Informan dari dinas terkait, memberikan masukan kepada peneliti terkait dengan hal-hal yang sudah dikerjakan tetapi tidak berhasil ataupun rencana saling bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama.

## 6. Akademisi.

Pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh akademisi terkait dengan bantuan-bantuan di Aceh menjadi tolok ukur terhadap keberlanjutan program yang direncanakan oleh BNN itu sendiri. Hal ini khususnya terkait dengan hambatan internal ataupun eksternal yang menentukan berhasil atau tidaknya program yang nantinya akan dijalankan oleh BNN.

### 3.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi kepada informan berdasarkan ketentuan teknik analisis yang digunakan. Hal yang terpenting dalam pengolahan data ini adalah pemahaman tentang karakteristik data yang digunakan, yaitu data kualitatif yang tidak memiliki unsur nominal. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif tipe *path dependency*. Neuman (2006: 452) mengungkapkan *path dependency* digunakan untuk menjelaskan permulaan yang khas dan menentukan dari suatu rangkaian peristiwa yang kemudian mempengaruhi rangkaian peristiwa berikutnya. Dengan kata lain, untuk menjelaskan suatu realita sosial, penelitian ini memulai penjelasannya dari proses awal dari rangkaian kegiatan yang bersifat kontingensi.

**Tabel 3.2 Analisis Data**

Teknik	Data Primer		Data Sekunder
	Hasil <i>Indepth</i>	Hasil Observasi	
<b>Alat Kerja</b>	Matriks dengan meringkas substansi pokok hasil wawancara.	Matriks dan tabulasi hasil catatan observasi serta pengelompokan foto terkait dengan masing-masing variabel evaluasi.	Matriks dan tabel hasil tabulasi angka, serta untuk kesimpulan penting data sekunder kualitatif.
<b>Cara Kerja</b>	Formulasi matrik hasil wawancara dengan melakukan silang antara informan dengan variabel atau substansi hasil wawancara.	Meringkas dan memilah berdasarkan substansi hasil catatan observasi dan foto.	Memilih data yang terkumpul.
<b>Cara Memahami Data</b>	Melihat penonjolan informasi jawaban informan. Kekuatan dan kualitas data informasi ditentukan oleh posisi dan peran informan.	Melihat catatan dan hasil foto dengan mengkaitkan dengan variabel yang dimaksud.	Intepretasi penonjolan informasi dan mengkaitkan dengan data lain (primer dan sekunder).

### 3.6 Hipotesa Kerja

Pada penelitian ini, hipotesis yang dikembangkan dan diuji perencanaan program *alternative development* alih fungsi lahan ganja di Mukim Lamteuba, Aceh berjalan dengan baik.

### 3.7 Site Penelitian

Site Penelitian dalam penelitian ini adalah BNN sebagai instansi yang melaksanakan program *alternative development* alih fungsi lahan ganja di Mukim Lamteuba, NAD serta Mukim Lamteuba, Aceh Besar, NAD.

### 3.8 Keterbatasan Penelitian

Di dalam penelitian ini, terdapat beberapa kendala yang peneliti dihadapi, kendala-kendala tersebut antara lain:

a. Data

Sulitnya mendapatkan data mengenai Laporan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh BNN bekerja sama dengan Universitas-universitas di Aceh. Hal tersebut berkaitan dengan pemetaan potensi tanaman yang dapat digunakan oleh peneliti dalam melakukan studi kelayakan tiap tanaman yang cocok untuk ditanam di Mukim Lamteuba.

b. Narasumber

Posisi Mukim Lamteuba yang sulit dijangkau membuat peneliti kesulitan untuk mencari narasumber yang dituju. Dalam mengatasinya, peneliti terus berupaya dalam mencari narasumber yang dituju dengan cara turut serta dalam mengikuti rapat internal yang dilaksanakan oleh BNN dan Warga Masyarakat Mukim Lamteuba yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2012. Di samping itu, kendala lain dalam melakukan *in-depth interview*, kendala bahasa daerah membuat penyampaian yang sering kali tidak dipahami baik warga masyarakat maupun peneliti. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti melakukan *probing* atas pertanyaan penelitian yang dimaksud dan menyewa penerjemah.

## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM PROGRAM *ALTERNATIVE DEVELOPMENT* BNN DAN LAMTEUBA, ACEH BESAR**

Pada Bab ini, peneliti membahas mengenai Sejarah BNN, Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN dan *Alternative Development*, dan Periodisasi Program *Alternative Development*.

#### **4.1 Sejarah BNN**

Sejarah perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dunia internasional hingga masuknya peredaran di Indonesia menuntut pemerintah RI untuk melakukan langkah-langkah penanganan secara hukum. Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara maka penyalahgunaannya memerlukan pendekatan komprehensif multidisiplin, koordinasi dan keterpaduan lintas sektor, serta partisipasi masyarakat. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka P4GN.

Sejak tahun 1971 pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 dengan membentuk Badan Koordinasi. Badan tersebut terkenal dengan nama BAKOLAK Inpres Nomor 6 Tahun 1971. Sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, seperti pemberantasan uang, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan penyalahgunaan bahaya narkotika, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat dan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 54 maka pada Tahun 1999, pemerintah membentuk lembaga baru melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan tugas pokok menetapkan kebijaksanaan dan strategi serta mengkoordinasikan semua Lembaga Departemen dan Non-Departemen. Pada periode ini dirasakan struktur organisasi belum berjalan dengan baik dan koordinasi hanya sebatas administrasi sedang operasionalisasi masih

sporadis dan sektoral pada masing-masing anggota Departemen/Lembaga BKNN (Tabel 4.1).

**Tabel 4.1 Sejarah Pendirian BNN**

<b>Peraturan</b>	<b>Peristiwa</b>
Inpres No. 6 Tahun 1971	Ketua Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Intruksi Presiden (Bakolak Inpres) No. 6 Tahun 1971 untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol.
Keppres No. 116 Tahun 1999	Dibentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sebagai upaya penanggulangan atas meledaknya permasalahan narkoba dan dibarengi krisis moneter.
Keppres No. 17 Tahun 2002	Terbentuknya UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengubah BKNN menjadi BNN. Hal ini sebagai upaya untuk mengembangkan kinerja terhadap penanggulangan narkoba secara serius.
PP No. 83 Tahun 2007	Keberdaan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika belum mengatur secara tegas mengenai kelembagaan yang bertugas untuk menangani masalah Narkoba secara efektif. Naka dari itu dikeluarkan PP ini. Berdasarkan PP ini selain dibentuk BNN dibentuk pula BNP dan BNK/Kota yang diketuai oleh Kapolri dan mempunyai anggota sebanyak 28 instansi pemerintah.
PP No. 23 Tahun 2010	Terbentuknya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997 yang dinilai tidak efektif dalam penanganan masalah narkoba. Selain itu, BNN tidak lagi dikepalai oleh Kapolri melainkan BNN berdiri dan terbentuk secara resmi dikepalai oleh Kepala BNN. BNP diubah menjadi BNNP dan BNK/Kota diubah menjadi BNNK/Kota yang mengisyaratkan bahwa BNNP dan BNNK/Kota menjadi instansi vertikal dari BNN.

Sumber: telah diolah kembali dari Profile BNN 2011.

Berdasarkan Inpres RI Nomor 3 Tahun 2002, setiap instansi pemerintah harus melakukan upaya P4GN berdasarkan bidang kerja masing-masing. Dalam pelaksanaannya kegiatan P4GN di masing-masing instansi telah dilaksanakan dengan SDM dan biaya dari anggaran masing-masing instansi tersebut. Pada tahun 2002, BKNN diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

BNN dibentuk berdasarkan Keppres RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang BNN yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 83 Tahun 2007 tentang BNN, BNP dan BNK/Kota. Visinya adalah terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Tahun 2015. BNN adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung



jawab kepada Presiden. BNN diketuai oleh Kapolri dan mempunyai anggota sebanyak 28 instansi pemerintah.

Berdasarkan PP tersebut, BNN, BNP dan BNK/Kota, BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN serta membentuk satuan tugas (Satgas) yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Dalam menjalankan Inpres, tugas dan fungsi tersebut serta untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Pada tanggal 31 Desember 2004 kepala BNN mengeluarkan suatu kebijakan dengan Surat Keputusan (Skep) Nomor Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional P4GN yang memuat garis-garis besar arah kebijakan dan strategi BNN dalam melaksanakan misi, program dan kegiatan untuk mencapai visi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan yang terjadi di dalam kelembagaan pemerintah ini, mengisyaratkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi isu dan masalah utama. Terbentuknya BNN sebagai lembaga yang merupakan bagian dari tata pemerintahan mengisyaratkan bahwa peredaran gelap narkoba harus segera diberantas bukan menjadi bagian dari pembagian kekuasaan dari Presiden. Di samping itu, keberadaan BNN juga merupakan bentuk dari upaya pemerintah agar lembaga ini mampu untuk memberantas hingga akar-akarnya.

Produk terbaru dari lahirnya P4GN adalah Skep 92. Sepanjang berlakunya Skep tersebut pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba seolah tidak lagi dapat menyentuh sampai dalam. Peran pemberantasan di dalam organisasi BNN sebagai lini terdepan dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba. Peran ini sudah menghabiskan anggaran begitu besar akan tetapi anggaran yang begitu besar ini, belum bisa menanggulangi peredaran gelap narkoba tetapi justru setiap tahunnya semakin bertambah. Oleh sebab itu, persoalan pemberantasan dalam Kebijakan P4GN menjadi isu utama.

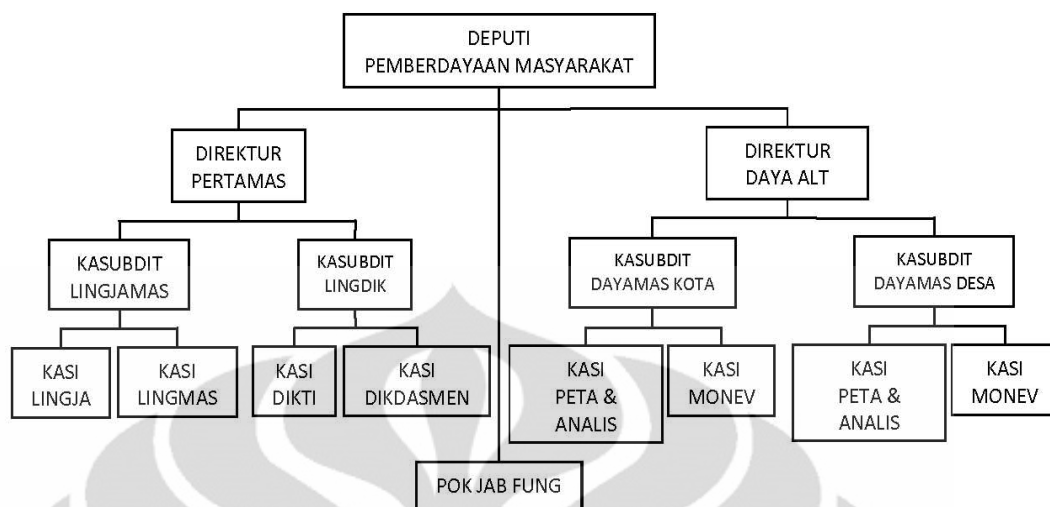
Saat ini BNN tidak lagi dijabat oleh Kalakhar tetapi BNN saat ini sudah menjadi badan yang secara murni menjadi sebuah institusi yang berdiri sendiri. Perubahan kebijakan pun saat ini mungkin terjadi, namun, kebijakan makro berupa P4GN tetap berdiri tegak walaupun perubahan institusi terjadi di

dalamnya. Hal ini menjadi batu loncatan bahwa kebijakan P4GN yang memiliki masa dari tahun 2005 sampai dengan 2009 ini akan diperpanjang menjadi kebijakan hingga tahun 2015.

#### **4.2 Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN**

Berdasarkan PP RI Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010, tentang BNN pada bagian Kelima Pasal 14 diuraikan bahwa Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi bidang pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Deputi. Peran pemberdayaan masyarakat juga tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan pemberantasan.

Adapun tugas pokok deputi bidang pemberdayaan masyarakat BNN adalah melaksanakan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat. Fungsi dari pemberdayaan masyarakat, antara lain (1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; (2) penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; (3) pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; (4) pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat; (5) pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN; (6) pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; (7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.



Sumber: Profil BNN 2011

#### Gambar 4.1 Struktur Organisasi Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN

Dalam struktur organisasi BNN, deputy bidang pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Deputy yang membawahi 2 (dua) Direktur, yaitu: Direktur Peran Serta Masyarakat (Dir Pertamas) dan Direktur Pemberdayaan Alternatif (Dir Daya Alt) (**Gambar 4.1**). Dimana masing-masing direktur membawahi dua kepala sub direktorat (kasubdit) dan begitu juga masing-masing kasubdit membawahi dua kepala seksi (kasi).

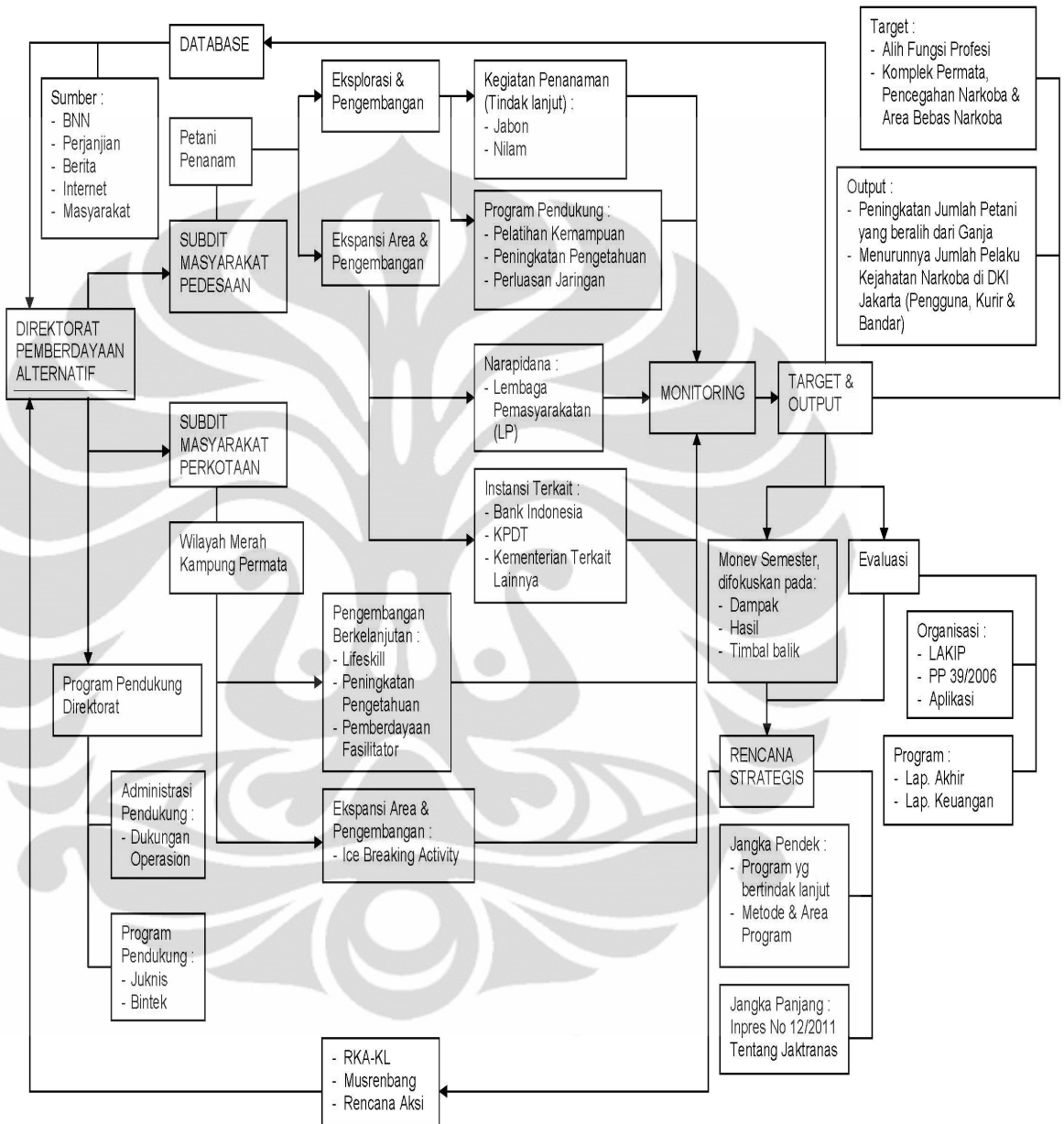
#### 4.3 Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN dan *Alternative Development*

Garis besar program kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari direktorat pemberdayaan alternatif, sesuai dengan amanat Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) P4GN, terbagi atas tiga besaran program kegiatan, yakni:

- a. Program alih profesi petani penanam ganja ke usaha yang legal dan produktif, serta
- b. Program Dukungan Operasional Direktorat Pemberdayaan Alternatif.

Besaran Program a dan b merupakan besaran program guna menjabarkan program dan pencapaian target sesuai dengan Jakstranas P4GN bidang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh direktorat pemberdayaan

alternatif. Besaran program dilaksanakan untuk mendukung implementasi program dan kegiatan yang dibutuhkan direktorat pemberdayaan alternatif.



Sumber: Rencana Strategis BNN, 2010

**Gambar 4.2 Alur Kerja Deputy Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Alternatif**

#### 4.3.1 Program Alih Profesi Petani Penanam Ganja ke Usaha yang Legal dan Produktif

Program alih profesi petani penanam ganja ke usaha yang legal dan produktif merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Propinsi Aceh dengan maksud meningkatkan jumlah petani penanam ganja yang beralih kepada usaha alternatif yang legal dan produktif. Program ini tersusun atas dua besaran kegiatan, yakni:

1. Eksplorasi dan pengembangan potensi masyarakat

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan potensi masyarakat merupakan kegiatan yang mengidentifikasi, menggali kebutuhan dan implementasi program alih profesi petani ganja ke usaha legal dan produktif serta pembinaan kelompok tani. Di samping itu, juga dilaksanakan pengembangan program pemberdayaan alternatif sebagai perluasan kegiatan alih profesi petani. Kegiatan alih profesi petani penanam ganja ke usaha legal produktif, pada tahun 2012 direncanakan untuk dilaksanakan kegiatan:

- a. Pengembangan Komoditas Tanaman Jabon,
- b. Pengembangan Komoditas Tanaman Nilam, dan
- c. Penyelarasan Program Pemberdayaan Alternatif dengan lintas kementerian terkait (Kementerian Pembangunan dan Daerah tertinggal atau KPDT, Bank Indonesia, dan *stakeholder* lainnya)

Kegiatan pendukung dalam pembinaan dan alih profesi petani penanam ganja ke usaha legal dan produktif, yaitu kegiatan yang mendukung program alih profesi petani penanam ganja dengan kegiatan sosialisasi informasi dan peningkatan keterampilan yang mendukung pengembangan komoditas. Pada tahun 2012 direncanakan kegiatan pembinaan keterampilan pendukung pengembangan komoditas alternatif yang terdiri atas:

- a. Pembinaan keterampilan *Good Agricultural Process* (GAP), dan
- b. Pembinaan keterampilan Pengolahan Hasil Komoditas.

## 2. Pengembangan wilayah pemberdayaan alternatif di Propinsi NAD

Kegiatan pengembangan wilayah pemberdayaan masyarakat di Propinsi NAD merupakan kegiatan yang memetakan aktivitas pengembangan program alih profesi pelaku tindak pidana narkoba ke usaha legal dan produktif serta pembinaan kelompok pemuda. Kegiatan ini mencoba untuk membuka potensi pengembangan dari aktivitas pembinaan orang yang terkait kasus tindak pidana narkoba dan *stakeholder* yang berpotensi melakukan pembinaan tersebut. Rencana kegiatan 2012 berkenaan dengan pengembangan wilayah pemberdayaan alternatif di propinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan warga mantan narapidana kasus narkoba di tiga wilayah pada Propinsi NAD.
- b. Pembinaan pemuda melalui pelatihan persiapan kerja di Propinsi NAD.

### 4.3.2 Program Dukungan Operasional Direktorat Pemberdayaan Alternatif

Program dukungan operasional direktorat pemberdayaan alternatif dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan target capaian sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jakstranas. Program ini terbagi atas dua bagian, yakni program dukungan administratif dan program dukungan implementasi kegiatan.

#### 1. Program dukungan administratif,

Program dukungan administratif direktorat pemberdayaan alternatif merupakan aktivitas yang mendukung kelancaran administrasi perkantoran di direktorat pemberdayaan alternatif. Pada tahun 2012 direncanakan untuk dilaksanakan kegiatan dukungan operasional kegiatan pemberdayaan alternatif.

#### 2. Program Dukungan Implementasi Kegiatan.

Program ini merupakan program dukungan direktorat pemberdayaan alternatif dalam rangka penyamaan persepsi, penyatuan visi dan gerak langkah dari *stakeholder* pemberdayaan alternatif, serta *capacity building* pelaksana program pemberdayaan alternatif. Dukungan ini

terbagi atas dua bagian, yakni dukungan teknis program pemberdayaan alternatif dan dukungan infrastruktur implementasi program.

Dukungan teknis pemberdayaan alternatif merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menggalang penyamaan persepsi, penyatuan visi dan gerak langkah dari *stakeholder* pemberdayaan alternatif. Sosialisasi program, pembuatan kebijakan dan perencanaan program serta bimbingan kepada *stakeholder* pemberdayaan alternatif diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta memberikan semangat tersendiri dalam pembuatan perencanaan, kebijakan dan implementasi program teknis di lapangan. Pada tahun 2012, berkenaan dengan dukungan teknis dimaksud, direncanakan kegiatan:

- a. Penyusunan Petunjuk Teknis GAP Komoditi Nilam dan Jabon di Propinsi NAD, dan
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis GAP Olahan Hasil Komoditas Tanaman Alternatif di Propinsi NAD.

Berbeda dengan dukungan teknis pemberdayaan alternatif, dukungan infrastruktur merupakan dukungan program dan kegiatan pemberdayaan alternatif di Propinsi NAD yang ditujukan untuk memudahkan tim pelaksana program melaksanakan kegiatannya di lapangan. Dukungan ini berupa infrastruktur yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu penunjang pelaksanaan program pemberdayaan alternatif di lapangan. Pada tahun 2012, berkenaan dengan dukungan infrastruktur direncanakan kegiatan posko pelaksana teknis direktorat pemberdayaan alternatif di Provinsi NAD.

#### **4.3.3 Perencanaan Program Pemberdayaan Alternatif**

Perencanaan program pemberdayaan alternatif yang digunakan adalah perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Direktorat pemberdayaan alternatif yang merupakan bagian dari BNN, memiliki perencanaan jangka panjang, yaitu mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba. Perencanaan tersebut tertuang dalam *Benchmark* direktorat

pemberdayaan alternatif yang berada dalam domain pemberdayaan masyarakat mewujudkan masyarakat bebas narkoba.

Dalam upaya mencapai situasi akhir dari perencanaan jangka panjang, kemudian disusun strategi perencanaan jangka menengah yang dilaksanakan secara bertahap, terarah dan berkelanjutan. Dalam perencanaan jangka pendek, dilakukan *monitoring* dan evaluasi program dan capaian pelaksanaan kegiatan direktorat pemberdayaan alternatif sesuai dengan amanat Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jakstranas P4GN bidang Pemberdayaan Alternatif. Hal tersebut tertuang dalam dokumen laporan pencapaian target Jakstranas yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan BNN. Perencanaan jangka pendek merupakan analisa dan pengolahan data serta informasi dari evaluasi yang telah dilaksanakan.

Perencanaan jangka pendek ini dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan penyusunan perencanaan deputy pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan BNN yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan BNN. Perencanaan jangka pendek program pemberdayaan alternatif secara spesifik membahas mengenai keberlangsungan program pemberdayaan alternatif pada wilayah sasaran dan juga pengembangan metode dan strategi program yang akan datang. Hal tersebut akan tertuang dalam rencana program kerja direktorat pemberdayaan alternatif tahun anggaran yang akan datang.

Pada Tahun 2012, direncanakan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Bidang Pemberdayaan Alternatif Tahun 2013 sebagai awalan dari penyusunan aplikasi RKAKL Direktorat Pemberdayaan Alternatif 2013. Pemberdayaan alternatif yang dikelola oleh Direktorat Pemberdayaan Alternatif selanjutnya akan terus menjalani siklusnya dalam sebuah mata rantai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi organisasi dan juga program pada siklus jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di masa selanjutnya.

#### **4.3.4 *Monitoring*/Pemantauan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Alternatif**

*Monitoring*/pemantauan pelaksanaan program pemberdayaan alternatif merupakan aktivitas yang tidak terlepas dalam rantai manajemen *project*



pemberdayaan alternatif. Pemantauan ini tidak hanya terkait dengan teknis pelaksanaan program, tetapi juga pencapaian tujuan utama dari pelaksanaan program pemberdayaan alternatif, pencapaian target dan juga penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pemberdayaan Alternatif sebagai pelaksana kebijakan pemberdayaan alternatif sebagaimana amanat Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jakstranas P4GN.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan alternatif, mata rantai kegiatan yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan dipantau dengan mempertimbangkan *impact*, *outcome* dan *feedback* dari kegiatan. Hal tersebut dalam rangka menyelaraskan mata rantai antar kegiatan yang dilaksanakan dengan IKU dari direktorat pemberdayaan alternatif yang terdiri atas:

1. Area Lahan Ganja yang beralih fungsi;
2. Jumlah kawasan rawan penyalahgunaan dan persedaran gelap narkoba yang dibina melalui pemberdayaan alternatif;
3. Jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif; dan
4. Jumlah pelaku tindak kejahatan narkoba yang beralih ke usaha legal produktif.

Indikator kinerja kegiatan jumlah lingkungan masyarakat pedesaan yang mendapat program pemberdayaan alternatif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2012 direncanakan kegiatan pemantauan:

1. Laporan Semester Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat melalui Pengembangan Keterampilan dan Komoditas Alternatif di Propinsi NAD, dan
2. Laporan Semester Pelaksanaan Program Pengembangan Komoditas Alternatif di Propinsi NAD.

Hasil kegiatan *monitoring*/pemantauan pelaksanaan program pemberdayaan alternatif digunakan sebagai bahan *updating database* dan juga masukan evaluasi pelaksanaan program dan direktorat pemberdayaan alternatif.

#### **4.3.5 Evaluasi**

Evaluasi program pemberdayaan alternatif merupakan kegiatan dalam menilai pelaksanaan program pemberdayaan alternatif dari target capaian yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan direktorat pemberdayaan

alternatif terbagi atas dua kegiatan, yaitu Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif dan Evaluasi Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif.

Pada tahun 2012, evaluasi program pemberdayaan alternatif direncanakan kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pemberdayaan Alternatif dan Studi Ekskursi Prototipe Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan ini merupakan evaluasi akhir dari pelaksanaan program pemberdayaan alternatif yang bersifat teknis dan metodologis. Selain itu, juga dilakukan penyusunan laporan keuangan yang bersifat administratif.

Di samping pelaksanaan evaluasi program, juga dilaksanakan evaluasi organisasi Direktorat Pemberdayaan Alternatif. Evaluasi ini dimaksudkan agar kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif sebagai institusi pelaksana program dapat berjalan dengan baik, mengetahui peta kekuatan organisasi (analisis *SWOT*) dan juga perbaikan organisasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan alternatif pada tahun anggaran mendatang. Hasil dari Evaluasi pelaksanaan program dan Direktorat Pemberdayaan Alternatif kemudian menjadi bahan masukan dalam penyusunan perencanaan program pemberdayaan alternatif.

#### **4.4 Periodisasi Program *Alternative Development***

Pada subbab ini peneliti membagi periode dalam menjelaskan pelaksanaan dari program *alternative development*. Periodisasi ini membantu dalam menggambarkan apa saja yang selama ini terjadi dalam proses pelaksanaan program *alternative development*. Dalam penelitian kali ini, peneliti membagi dalam tiga periodisasi perubahan dalam pelaksanaan program *alternative development*. Periodisasi perubahan dalam pelaksanaan program *alternative development* antara lain Periode 2005-2008, Periode 2009-2010, dan Periode 2011-2012. Berikut ini penjabaran dari masing-masing fase perubahan:

##### **4.4.1 Periode 2005-2008**

Pada periode ini, merupakan awal terbentuknya tim *desk* untuk penanganan *alternative development*. Tim tersebut terbentuk atas prakarsa seminar tentang *Alternative Development for Cannabis* yang digagas oleh Departemen Luar Negeri (saat ini menjadi Kementerian Luar Negeri) di Medan dimana seminar tersebut berkaca dari permasalahan peredaran ganja Aceh.

Setelah itu, hasil seminar ini ditindaklanjuti dengan penyusunan program *alternative development* ganja di Aceh tahun 2006-2012, yang mendapat dukungan dari Gubernur Aceh terpilih pada tahun 2006 (**Tabel 4.2 *Grand Design Program Alternative Development***). Pada tahun 2005, juga mendapat dukungan dari UNODC untuk program *alternative development* di Aceh dalam sidang *Commission National Drugs* ke-49 & 50 di Vienna, Austria.

Di samping itu, dilakukan kerja sama dengan Doi Tung (Mae Fah Luang Foundation (MFLF)) pada tahun 2005. Kerja sama yang dilakukan antara lain, studi banding tokoh masyarakat Aceh ke Doi Tung *Project*, Thailand hingga kepala desa (dibiayai MFLF) (**Gambar 4.3**); dilakukan Survei di daerah *Pilot Project* (Lamteuba, Aceh); pemberantasan malaria; dan pelatihan SDM (**Gambar 4.4**). Proyek yang pertama di sana itu kita mengecek kesehatan masyarakat, khususnya yang terjangkit malaria, jadi mereka tuh terjangkit sehingga kita dibantu banyak oleh proyeknya Thailand, untuk memberantas malaria (Wawancara Ahwil Lutan, 2 Mei 2012).

Melihat perkembangan dari program *alternative development*, membuat tim *desk* untuk melakukan gebrakan dengan melobi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memasukkan *alternative development* di dalam *blue print* kebijakan nasional. Seperti yang diungkapkan Ari, lobi yang dilakukan Ahwil Lutan disambut baik oleh pihak Bappenas sehingga hal ini memberikan kemudahan kepada tim *desk* untuk melakukan pekerjaan ini. Selain itu, anggaran dalam melaksanakan program ditambah karena masuk dalam *blue print* kebijakan nasional. Seperti yang diungkapkan Ari:

Selain itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) setuju bahwa *alternative development* menjadi Program Nasional. “yang jelas dari pihak Pemerintah sendiri khususnya Bappenas sangat mendukung karena kan kebetulan pada saat itu juga sekretaris, orang kepercayaan Bappenas itu masih saudara juga dengan Pak Awil. Seperti itu. Nama belakangnya Lutan-Lutan juga tapi saya lupa. Makanya dukungan anggaran ditambah akhirnya” (Wawancara Ari Lispriyanto, 3 Mei 2012).



Sumber: dokumen Ari Lispriyanto, 2008

**Gambar 4.3 Studi Banding Tokoh Masyarakat ke Doi Tung, Thailand**



Sumber: dokumen Ari Lispriyanto, 2008

**Gambar 4.4 Tes Kesehatan dan Pencegahan Malaria**

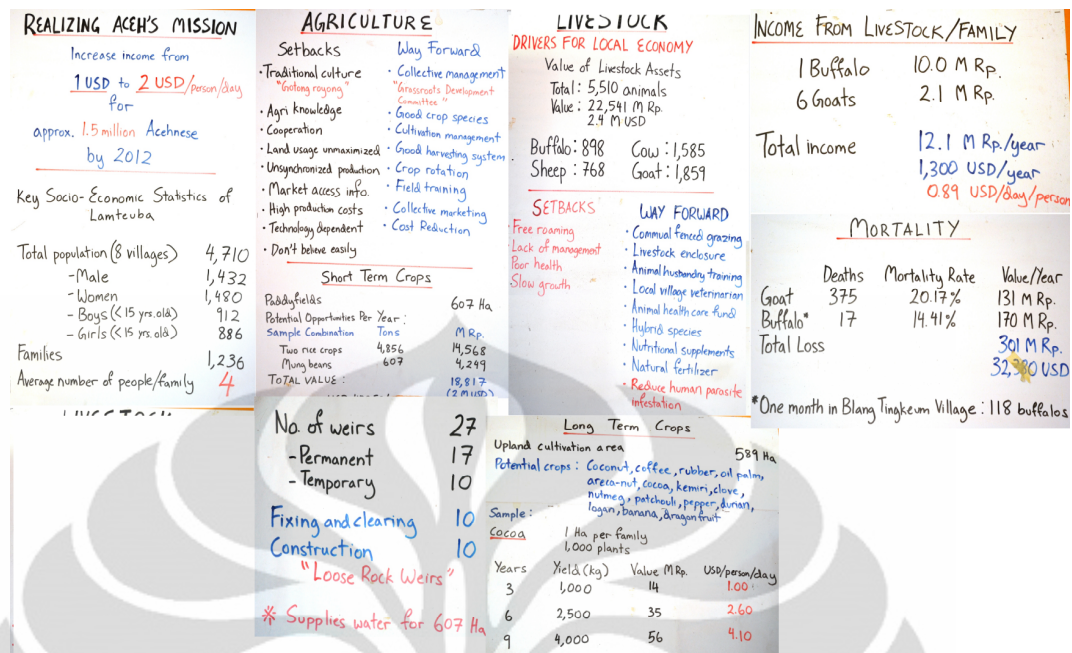
Pada tahun 2007, program *alternative development* mendapat dukungan dari *Director Executive UNODC* (Mr. Antonio Maria Costa) dengan menyusun suatu survei bersama antara UNODC dan BNN tentang Pemetaan Ladang Ganja dan Demografi Petani Penanam Ganja. Lalu pada tahun 2007, kunjungan Sekretaris Jendral (Sekjen) MFLF, Mr. Disnadda Diskul ke Aceh untuk melakukan advokasi, observasi dan survei ke lapangan dengan hasilnya mendapatkan informasi faktual dan aktual tentang kondisi Aceh, (**Gambar 4.5**).



Sumber: dokumen Ari Lispriyanto, 2008

#### **Gambar 4.5 Kunjungan Sekjen Mr. Disnadda Diskul**

Di samping itu, tim ini membawa *expert* dari berbagai bidang: ONCB, Ahli kesehatan, ahli perikanan dan peternakan, ahli pertanian, dll (**Gambar 4.6**). Lalu, membawa bantuan peralatan: pembuatan kaki palsu dan pemberantasan malaria. Terakhir, menjajaki potensi SDA dan SDM di beberapa wilayah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang bisa dikembangkan untuk mendukung program *alternative development*, seperti Sabang, Lamteuba, dan Biereuen.



Sumber: observasi di Basecamp MFLF di Lamtaeba, 2012

#### Gambar 4.6 Hasil Pemetaan dari Tim MFLF Tahun 2007

Pada tahun 2008, kunjungan Direktur Eksekutif UNODC Mr. Antonio Maria Costa ke Aceh, observasi, dan survei proyek percontohan *Sustainable Alternative Development Programme* di Lamteuba hasilnya adalah mendapatkan informasi faktual dan dukungan dari UNODC tentang program *alternative development* di NAD (**Gambar 4.7**). Kunjungan ini untuk melihat percontohan air dan pertanian yang memanfaatkan sumberdaya setempat guna mempercepat perkembangan kemandirian masyarakat setempat dengan cara gotong-royong. Selain itu, UNODC dan BNN mengundang MFLF untuk membantu memecahkan persoalan narkoba dan kejahatan khususnya penanaman ganja dengan mengatasi kemiskinan dan kurangnya kesempatan pasca konflik dan Tsunami.



Sumber: dokumen Ari Lispriyanto, 2008

**Gambar 4.7 Kunjungan Direktur Eksekutif UNODC  
Mr. Antonio Maria Costa ke Aceh**

Lokakarya percepatan program *alternative development* di gedung RRI Banda Aceh. Lokakarya ini diisi oleh pembicara dari tokoh masyarakat dan dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat. Di samping itu, diresmikan *Sustainable Alternative Live Hood Development* (SALD) oleh Gubernur Aceh dan dihadiri oleh Dir. Eksekutif UNODC dan Sekjen MFLF serta masyarakat di Desa Lamteuba, Seulimeum, Aceh Besar (**Gambar 4.8**).



Sumber: dokumen Ari Lispriyanto, 2008

**Gambar 4.8 Peresmian SALD di Lamteuba, Aceh Besar**

Uraian di atas dapat digambarkan melalui tabel berikut ini (**tabel 4.2**):

**Tabel 4.2 Pencapaian Program *Alternative Development* di Aceh 2005-2008**

Tahun	Pencapaian Program <i>Alternative Development</i>
2005	- Seminar tentang <i>Alternative Development for Cannabis</i> yang digagas oleh Deplu di Medan berkaca dari permasalahan peredaran ganja Aceh.
2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Program <i>Alternative Development</i> ganja di Aceh tahun 2006-2012, yang mendapat dukungan dari Gubernur Aceh terpilih.</li> <li>- UNODC mendukung program <i>Alternative Development</i> dalam sidang <i>Commission National Drugs</i> ke-49 &amp; 50 di Vienna, Austria.</li> <li>- Kerja sama dengan Doi Tung (Mae Fah Luang Foundation):               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi Banding Tokoh Masy. Aceh ke Doi Tung <i>Project</i> (Thailand) hingga kepala desa (semua dibiayai MFLF)</li> <li>2. Dilakukan Survei di daerah <i>Pilot Project</i> (Lamteuba, Aceh)</li> <li>3. Pemberantasan Malaria</li> <li>4. Pelatihan SDM</li> </ol> </li> <li>- Kepala Bappenas setuju bahwa <i>Alternative Development</i> menjadi Program Nasional</li> </ul>
2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapat Dukungan dari <i>Director Executive</i> UNODC (Mr. <i>Antonio Maria Costa</i>) dengan menyusun suatu survei bersama antara UNODC &amp; BNN ttg Pemetaan Ladang Ganja dan Demografi Petani Penanam Ganja</li> <li>- Kunjungan Sekjen MFLF, Mr. <i>Disnadda Diskul</i> ke Aceh, melakukan advokasi, observasi dan survei ke lapangan dengan hasilnya mendapatkan informasi faktual dan aktual tentang kondisi Aceh → utk melanjutkan program AD</li> <li>- Membawa <i>expert</i> dari berbagai bidang : ONCB, Ahli kesehatan, ahli perikanan &amp; peternakan, ahli pertanian, dll</li> <li>- Membawa bantuan peralatan: pembuatan kaki palsu dan pemberantasan malaria</li> <li>- Menjajaki potensi SDA&amp;SDM di beberapa wilayah di Prov. NAD yang bisa dikembangkan untuk mendukung program <i>Alternative Development</i>, seperti: Sabang, Lamteuba, dan Biereuen</li> </ul>
2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan Direktur Eksekutif UNODC Mr. <i>Antonio Maria Costa</i> ke Aceh, observasi &amp; survei proyek percontohan <i>Sustainable Alternative Development Programme</i> di Lamteuba hasilnya adalah mendptkan informasi faktual dan dukungan dari UNODC tentang program <i>Alternative Development</i> di NAD               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan ini untuk melihat percontohan air dan pertanian yg memanfaatkan sumberdaya setempat guna mempercepat perkembangan kemandirian masyarakat setempat dengan cara gotong-royong</li> <li>2. UNODC &amp; BNN mengundang MFLF utk membantu memecahkan persoalan narkoba dan kejahatan khususnya penanaman ganja dengan mengatasi kemiskinan dan kurangnya kesempatan pasca konflik dan Tsunami</li> </ol> </li> <li>- Lokakarya percepatan program <i>alternative development</i> di gedung RRI banda Aceh diisi oleh pembicara dari tokoh masyarakat dan dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat</li> <li>- Diresmikannya <i>Sustainable Alternative Live Hood Development</i> (SALD) oleh Gub. Aceh dihadiri oleh Dir. Eksekutif UNODC dan Sekjen Mae Fah Luang Foundation (MFLF) serta masyarakat di Desa Lamteuba, Seulimeum, Aceh Besar.</li> </ul>

Sumber: telah diolah kembali dari dokumen Ahwil Lutan, 2005

Pada periode ini, tim *alternative development* dibentuk layaknya satuan tugas (satgas) yang tidak memiliki struktural di dalam BNN. “Kita belum punya rumah. Masih di sekretaris jamannya dulu alm. Pak Sugiarto. Segala bentuk pertanggung jawaban keuangan, administrasi, diketahui Pak Ahwil, baru pimpinan” (Wawancara Ari Lispriyanto). Apa yang diprioritaskan dalam program



alternative development pada periode ini adalah memperbanyak sosialisasi, seperti yang dikatakan oleh Ari Lispriyanto:

Memang kita kan waktu itu nggak putus-putusnya sosialisasi. Setelah kita diterima kita masuk dan adakan sosialisasi. Apa sih itu AD. Sasarannya kan seperti itu. Sampai di situ mereka menerima sangat. Justru mereka berharap ini jangan pernah putus, jangan pernah cuma ngomong sampai di sini, besoknya putus. Bahkan harus ditingkatkan. Mau itu pengganti pimpinan, kek, mau apa. Disana yang ngomong. “Kami ini kan kalo sekarang udah putus kan sudah selesai, besok ganti pimpinan putus juga, Pak”.

#### 4.4.2 Periode 2009-2010

Pada tahun 2009, dilakukan penyerahan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) demi percepatan program *alternative development* di Kabupaten Aceh Besar serta Kota Banda Aceh (**Gambar 4.9**). Selain itu, dilakukan pertemuan sosialisasi pencegahan malaria, dalam rangka eliminasi penyakit masyarakat. Lalu, lokakarya membahas tentang upaya P4GN termasuk di dalamnya program *alternative development* (*Koordinator Departemen Luar Negeri*) yang diperuntukkan dalam menyamakan persepsi tentang program *alternative development* sebagai tanggung jawab bersama.



Sumber: dokumen Ari Lispriyanto, 2008

**Gambar 4.9 Penyerahan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)**

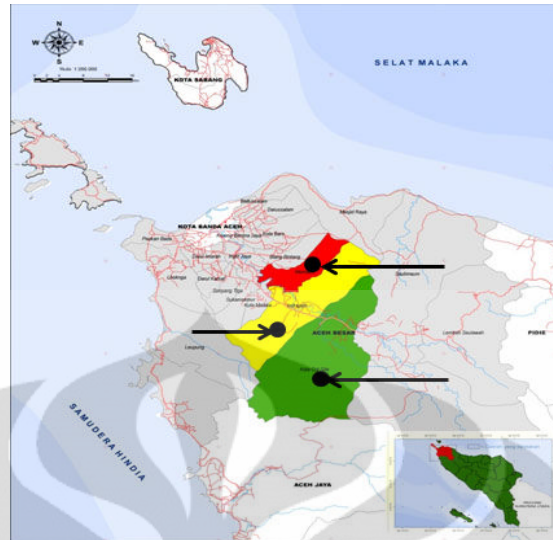
Pada tahun 2010, dilakukan MoU (kerja sama) antara BNN dengan perguruan tinggi dan Universitas se-Provinsi NAD, yaitu: Unsyiah, IAIN Ar-Raniry, Universitas Teuku Umar, Universitas Samudra Langsa, Universitas Muhammadiyah untuk melakukan survei pemetaan wilayah dan area ganja (**Gambar 4.10**). Hasil dari survei pemetaan wilayah dan aera ganja tersebut antara lain:

- a. Teridentifikasi dari 23 Kab./Kota di Aceh, 8 kabupaten sebagai basis penanaman liar Ganja, yaitu: Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie dan Bireuen (**Gambar 4.11**);
- b. Terdapat potensi tanaman, sumber mineral, keterampilan keluarga tani yang sangat prospektif untuk dikembangkan dengan program *alternative development*; dan
- c. Kemiskinan dan minimnya akses pasar serta investasi yang membuat warga terpuruk dan selalu menanam ganja diperlukan investasi dan uluran CSR.



Sumber: hasil penelitian perguruan tinggi dan universitas se-Aceh, 2010

**Gambar 4.10 Survei Pemetaan Wilayah dan Area Ganja**



Sumber: hasil penelitian perguruan tinggi dan universitas se-Aceh, 2010

#### Gambar 4.11 Hasil Pemetaan Wilayah dan Area Ganja

Selain itu, pada tahun ini dilakukan Rapat Penyusunan Program *Alternative Development* 2011 di Jakarta, lintas kementerian, pemda dan *stakeholder alternative development* di Aceh, sehingga program ini dapat berjalan efektif. Lalu, sosialisasi dan *workshop* pendampingan tanaman nilam bagi eks petani ganja di area 3 Ha di Lamteuba (**Gambar 4.12**).



Sumber: Lakip Pemberdayaan Alternatif, 2011

#### Gambar 4.12 Sosialisasi dan *Workshop* Pendampingan Tanaman Nilam bagi Eks Petani Ganja, Desa Lamteuba, Aceh Besar

Uraian di atas dapat digambarkan melalui tabel berikut ini (**tabel 4.4**):

**Tabel 4.4 Pencapaian Program *Alternative Development* di Aceh 2009-2010**

Tahun	Pencapaian Program <i>Alternative Development</i>
2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerahan media Komunikasi Informasi &amp; Edukasi (KIE) demi percepatan program <i>alternative development</i> di Kabupaten Aceh Besar &amp; Kota Banda Aceh</li> <li>- Pertemuan Sosialisasi Pencegahan Malaria, dalam rangka eliminasi penyakit masyarakat (malaria) → Aceh dinilai berprestasi dlm pengentasan Malaria (<i>Koordinator Depkes</i>)</li> <li>- Lokakarya membahas tentang upaya P4GN termasuk di dalamnya program <i>alternative development</i> (<i>Koordinator Deplu</i>)</li> <li>- Pelaksanaan Rakor Bidang <i>Alternative Development</i>, guna peningkatan koordinasi dan penyamaan persepsi tentang program <i>alternative development</i> sebagai tanggung jawab bersama</li> </ul>
2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan MoU (kerjasama) antara BNN dengan Perguruan Tinggi dan Universitas se-Provinsi NAD, yaitu: Unsyiah, IAIN Ar-Raniry, Univ. Teuku Umar, Univ. Samudra Langsa, Univ. Muhammadiyah untuk melakukan Survei pemetaan Wilayah dan Area Ganja:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasi dari 23 kab/kota di Aceh, 8 kab sebagai basis penanaman liar Ganja, yaitu: Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie dan Bireuen</li> <li>2. Namun, teridentifikasi jg di lokasi-lokasi tersebut terdapat potensi tanaman, sumber mineral, keterampilan keluarga tani yang sangat prospektif untuk dikembangkan dengan program <i>alternative development</i></li> <li>3. Intinya, kemiskinan dan minimnya akses pasar serta investasi yang membuat mereka terpuruk dan selalu menanam Ganja → perlu investasi &amp; uluran CSR</li> </ol> </li> <li>- Rapat Penyusunan Program <i>Alternative Development</i> 2011 di Jakarta, lintas kementerian, pemda &amp; stake holder AD di Aceh, sehingga program AD efektif</li> <li>- Sosialisasi &amp; workshop pendampingan tanaman Nilam bagi eks petani Ganja di area 3 Ha di Lamteuba:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilam sangat prospektif, mudah &amp; cepat memberikan hasil.</li> <li>2. di Lamteuba ber hektar-hektar lahan bekas Ganja &amp; puluhan petani produktif → menunggu investor utk agroindustri, berbagai komoditi sayuran &amp; tanaman industri</li> </ol> </li> </ul>

Sumber: diolah kembali dari dokumen Ahwil Lutan, 2011

#### 4.4.3 Periode 2011-2012

Pada tahun 2011, dilakukan lagi pertemuan dan kunjungan lembaga keuangan dan perbankan se-Aceh dalam rangka CSR bagi program *alternative development* untuk pengembangan. Pertemuan itu menghasilkan rumusan aksi menanam jabon dan nilam di Desa Lamteuba. Pada tahun 2012, dijadwalkan dimulainya program alih fungsi lahan ganja ke jabon dan nilam. Oleh karena ini disiapkan lahan yang akan dipergunakan untuk alih fungsi lahan beserta kelompok tani yang akan menggarapnya (**Gambar 4.13**).



Sumber: Observasi, 2012

**Gambar 4.12 Lahan yang Disiapkan Warga Desa Lamteuba untuk Jabon dan Nilam**

Uraian di atas dapat digambarkan melalui tabel berikut ini (tabel 4.5):

**Tabel 4.5 Pencapaian Program *Alternative Development* di Aceh 2011-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Pencapaian Program <i>Alternative Development</i></b>
2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan &amp; kunjungan lembaga keuangan &amp; perbankan se-Aceh dalam rangka CSR bagi program <i>alternative development</i> utk pengembangan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peternakan dgn SPT-TL di Maheung &amp; Penanaman Nilam &amp; Pohon Sengon di Lamteuba</li> <li>2. Tujuan dari kegiatan ini, utk meningkatkan kepedulian dgn pemberdayaan bagi mantan petani Ganja &amp; area bekas Ganja melalui CSR perusahaan → meningkatkan kesejahteraan &amp; mengikis lahan Ganja</li> </ol> </li> </ul>
2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan lahan yang akan dipergunakan dalam program alih fungsi lahan di Desa Lamteuba</li> </ul>

Sumber: telah diolah kembali dari dokumen Ahwil Lutan, 2007

## **BAB 5**

### **EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM *ALTERNATIVE DEVELOPMENT* ALIH FUNGSI LAHAN GANJA DI MUKIM LAMTEUBA, KEC. SEULIMEUM, KAB. ACEH BESAR, NAD**

Pada Bab ini, peneliti membahas mengenai *Assess Context, Gather Reconnaissance, Engage Stakeholders, Describe The Program, dan Focus The Evaluation.*

#### **5.1 Assess Context**

Pada Sub Bagian *Asses Context*, peneliti membahas mengenai Kualitas dari Pengetahuan Petani Terkait dengan Penggunaan Teknologi, Tipe Aktivitas dalam Bekerja di Lahan, Faktor Kontribusi sebagai Pendukung terhadap Kesuksesan Partisipasi, serta Peralatan, Lahan, Lembaga Simpan Pinjam, dan Akses Perdagangan.

##### **5.1.1 Kualitas dari Pengetahuan Petani terkait dengan Penggunaan Teknologi**

Tingkat pengetahuan petani di bidang pertanian di Mukim Lamteuba, Aceh Besar bisa dikatakan minim. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam mengolah lahan yang selalu mereka lakukan. Mereka tidak mengandalkan peralatan-peralatan yang berteknologi, melainkan mereka hanya menggunakan alat-alat pertanian sederhana. Kemiskinan yang membuat mereka tidak dapat mengakses penggunaan teknologi dalam pertanian mereka.

Determinasi kemiskinan ini yang tidak memberikan ruang gerak bagi petani di Mukim Lamteuba. Hal ini mengisyaratkan bahwa pertanian di Provinsi NAD masih menggunakan peralatan tradisonal. Di samping itu, menjadi bahan pertimbangan bagi *stakeholder* pertanian untuk mensosialisasikan penggunaan peralatan pertanian yang berbasis teknologi. Hal tersebut perlu dilakukan segera, agar petani memiliki daya saing dalam proses produksi.



Sumber: observasi, 2012

**Gambar 5.1 Pertanian di Mukim Lamteuba**

Dalam proses peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap teknologi pertanian, tidak harus dilakukan oleh instansi yang fokus terhadap masalah itu saja tetapi seluruh elemen dari instansi pemerintah dapat melakukannya bersama. Jangan sampai permasalahan koordinasi kembali lagi terjadi. Hal ini terjadi di lingkup BNN itu sendiri, dimana program *alternative development* ini juga memiliki konflik internal di dalamnya.

Purwa menjelaskan bahwa antara BNN dengan BNNP Aceh tidak memiliki sama visi, mereka menganggap bahwa Lamteuba adalah proyek pusat sedangkan BNNP Aceh juga harus mencari proyek di daerah lain. Jadi tidak muncul satu kesatuan yang utuh dalam pelaksanaannya. Seperti yang dikatakan Purwa, “jangan sampai di sana kita tarik-tarikan program. Jadi antara orang pusat dan orang provinsi. Orang provinsi merasa itu kan kerjaan orang pusat, sehingga terjadi konflik internal”.

### **5.1.2 Tipe Aktivitas dalam Bekerja di Lahan**

Aktivitas dalam bekerja di Lahan, seperti yang diungkapkan oleh Hamdani bahwa etos kerja yang dimiliki oleh mereka masih kurang jika dibandingkan dengan pekerja dari luar tanah Aceh. Terlihat ketika mereka menggarap lahan, mereka lebih sering pulang ke rumah dibandingkan dengan tetap konsentrasi pada

pekerjaannya. “etos kerja kita masih kurang. Kalau orang Medan kerjanya fokus. Sedangkan, orang kita di sini, suka pulang sebentar”.

Rencana program alternative development adalah alih fungsi lahan ke tanaman jabon dan nilam. Masyarakat di sana menginginkan pola kerja yang diterapkan seperti layaknya buruh tani. Setiap tahap dijelaskan dengan se jelas-jelasnya sehingga mereka akan tau keuntungan yang didapatkan oleh mereka baik penggarap lahan atau pekerja panen.

Sebagai contoh adalah pertanian nilam, warga menginginkan agar mereka mendapatkan bantuan sejak menanam hingga penyulingan. Intinya adalah bagaimana mereka tidak merasakan kelaparan selama mengikuti program yang diberikan pemerintah. Ukuran keberhasilan yang mereka tetapkan terhadap bantuan dari pemerintah adalah bagaimana mereka tidak kehabisan gula dan kopi di rumah. Seperti yang dijelaskan oleh Hamdani:

Ya akan dibantu mencapai penyulingan . Nanti ongkos kerja masyarakat kalau yang susah sekali ada mungkin sedikit untuk minum kopi. Jangan sampai dia lapar selama bekerja enam bulan itu, jangan sampai gak beli gula. Kalau nanti beli gula 500 berarti selama enam bulan sudah ada 3 juta. Yang lain sudah keluarkan tenaga mereka, inisiatif mereka, pikiran mereka. Itu lah keberhasilan.

Hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Evlyn, bahwa masyarakat Aceh memiliki *pride* terhadap kesukuannya yang begitu tinggi. Hal ini menyebabkan mereka tidak mau mengerjakan hal-hal yang dianggap mereka rendah. *Pride* yang begitu tinggi menyebabkan mereka malas dalam melakukan apa-apa. Evlyn menjelaskan:

dia punya ego yang tinggi menurut saya, sehingga dia merasa ‘ah masa gue harus ngerjain itu sih, itu kan bukan level gue buat ngerja-ngerjain kaya gitu’ misalnya kaya gitu, jadi dia engga mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah



### 5.1.3 Faktor Kontribusi sebagai Pendukung terhadap Kesuksesan Partisipasi

Tanggapan warga Mukim Lamteuba atas program *alternative development* memiliki sinyal positif untuk dilaksanakan. Pasalanya mereka masih mau menerima rencana program yang akan dilaksanakan ini, seperti yang diungkapkan oleh Hamdani setelah mereka melihat kesuksesan di Thailand mereka menanyakan “Pak saya punya lahan” Ada ngga orang kerja sama saya?. Hal ini pertanda bahwa masyarakat mau melaksanakan program. Meskipun, program yang dulu sempat dilaksanakan di Mukim ini tidak berhasil.

Ketidakberhasilan program sebelumnya memberikan dampak, berubah pola kehidupan sosial mereka. Purwa menjelaskan, ketika program penanaman jagung yang gagal, masyarakat semakin kecewa. Puncak kekecewaan warga Mukim Lamteuba berakhir pada kejenuhan program yang ditawarkan oleh pemerintah, seperti lebih baik uangnya diberikan dibandingkan harus dijalankan. “Masyarakat jenuh, jenuh karena Thailand. Sudah kecewa seperti yang saya bilang tadi. Dia sudah kecewa makanya, kalau ada rapat. “Ya sudah, sini uangnya berapa Kamu mau kasih, nanti dikerjain”, penjelasan Purwa kepada peneliti.

Luka lama ini yang tiba-tiba saja menganga kembali ketika masyarakat akan mendapatkan bantuan program. Mereka termotivasi untuk mendapatkan dana yang ditawarkan tetapi dibalik motivasi itu, warga tidak memikirkan kesuksesan program yang dirancang. Kejadian jagung mungkin salah satu kejadian yang sangat membekas di dalam Mukim Lamteuba. Pasalnya, kejadian jagung itu bermula ketika mereka diiming-imingi akan kaya ketika menanam jagung. Hasilnya akan ditampung oleh pengepul dan dengan harga bersaing.

Kenyataannya, justru kebalikan dari itu semua. Jagung yang diharapkan setelah panen justru tidak ada yang mau membeli. Perusahaan pengepul tersebut sudah memiliki agen yang akan memberikan sumber jagung dari masyarakat di luar Lamteuba. Lalu, kalau mereka mau menjual kepada agen tersebut maka harga produksi dengan harga jualnya terdapat perbedaan yang besar.

Pendekatan sepertinya sudah bagus cuma ketika dia sudah... suruh nanam jagung, nanam jagung semuaaaaaaaa... ketika jagung panen ga ada yang beli. Terus tanem apalagi, jahe atau apa... Kan jadi masalah.... Dulu

dijanjikan adab poh pohan apa... buat olah-olah, buat makanan apa gitu... Makanan ternak.. Namun setelah diproduksi, pabrik itu ga mau beli. Karena pabrik ini sudah punya distribusi yang lain. Jadi ketika orang ini membawa, gak boleh langsung mesti lewat sini. Sementara satu labu ini harganya lebih rendah daripada harga produksinya.

#### 5.1.4 Peralatan, Lahan, Lembaga Simpan Pinjam, dan Akses Perdagangan

Merujuk atas apa yang dijelaskan oleh Mansfield (1999) tentang ketersediaan alat pertanian, maka adanya alat pertanian berupa cangkul merupakan bagian dari pencapaian program alternative development di Mukim Lamteuba. Suasana warga Lamteuba bersemangat saat pembagian cangkul yang diberikan oleh BNN (**Gambar 5.2**).



Sumber: observasi, 2012

**Gambar 5.2 Suasana Pembagian Cangkul kepada Petani Program *Alternative Development***

Peralatan yang warga Mukim Lamteuba miliki hanya peralatan sederhana saja. Tidak banyak yang terlihat menggunakan peralatan berteknologi tinggi. Semua dikerjakan rata-rata menggunakan cangkul, sabit, dan tangan. Ketika membajak biasanya menggunakan hewan yang dipelihara oleh sebagian warga Mukim Lamteuba.

Lahan sendiri seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, diketahui bahwa masyarakat telah menyiapkan lahan untuk rencana program alih

fungsi lahan 2012 ini. Setiap lahan yang telah disiapkan ini, kepemilikannya ditanggung oleh masing-masing kelompok tani. Luasnya lahan yang akan dijadikan sebagai *sample* keberhasilan program rata-rata sebesar 2 ha.

Keberadaan lembaga simpan pinjam di Mukim Lamteuba sendiri sampai saat ini tidak ada. Ketiadaan lembaga simpan pinjam ini dikarenakan daerahnya yang jauh dari kota, sehingga lembaga simpan pinjam yang dapat membantu petani pada rencana program tidak mungkin bisa menjangkau sampai daerah terpencil seperti Mukim Lamteuba. Fenomena ini yang Nugroho (2010: 118) jelaskan, lembaga formal perbankan masih enggan untuk mendanai usaha-usaha skala kecil masyarakat.

Akses perdagangan sebagai salah satu pendongkrak perekonomian agar petani mau beralih profesi juga belum terlihat di Mukim Lamteuba. Perencanaan yang holistik terhadap akses perdagangan ini belum terealisasi. Hal ini dikarenakan, pasar jaban maupun nilam di NAD belum ramai. Di samping itu, keyakinan akan keberlanjutan program ini pula yang belum bisa dijadikan kepercayaan bagi investor yang mau membeli hasil nilam maupun jaban.

## **5.2 Gather Reconnaissance**

Pada Sub Bagian *Gather Reconnaissance*, peneliti membahas mengenai Motivasi Petani ikut serta dalam Program *Alternative Development* dan Jumlah Petani yang ikut serta dalam Program *Alternative Development*.

### **5.2.1 Motivasi Petani ikut serta dalam Program *Alternative Development***

Jika merujuk pada motivasi petani ikut serta dalam program *alternative development* maka dapat dikatakan bahwa motivasi di Mukim Lamteuba masih berdasarkan uang dan apa yang akan diberikan oleh penyelenggara kegiatan. Seperti yang dijelaskan oleh Hendrajid bahwa ketika tim BNN datang ke Mukim Lamteuba, mereka sudah senang. Senang yang dimaksud di sini adalah, mereka akan diundang untuk hadir dan ketika hadir mereka akan mendapatkan uang. Hal tersebut selalu seperti itu, seperti layaknya Pilkada yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat, yang membedakan hanya setiap bulan tim BNN memberikan uang kepada mereka.

Waktu kita datang itu ya, mereka sudah mulai ada kegiatan. Ada undangan lagi. wah ada 50 ribu lagi, masih seperti itu di sana. Bagaimana pun peredaran uang kan begitu susah di daerah itu. Trus menunggu hasil tanaman yang mereka cangkul tiap hari juga masih lama. Walalupun persis kaya, PILKADA 5 tahunan ya. Datang tuh trus ada bagi-bagi. Kita per bulan, PILKADA bulanan.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kedatangan mereka setiap penyelenggaraan program *alternative development* ini hanya sebatas untuk mendapatkan uangnya saja. Sedangkan ilmu dan perubahan yang diberikan tidak diserap atau tidak dikerjakan sama sekali. Seperti yang terlihat dari **Gambar 5.3**,



Sumber: observasi, 2012

**Gambar 5.3 Suasana Pembagian Uang Saku kepada Peserta Pelatihan**

Suasana tersebut muncul ketika penyelenggaraan pembekalan atau pelatihan saja. Ketika pelatihan telah usai dan ingin dipanggil masyarakat yang ikut serta secara sukarela, mereka justru tidak ada. Konsep yang dipakai oleh warga Mukim Lamteuba, yaitu konsep bantuan. Ketika ada bantuan maka tidak perlu ada kompensasi atas bantuan yang diberikan. Seperti yang dikatakan oleh Purwa, “waktu bantuan Thailand mereka mintanya bergulir gitu kan, tapi masyarakatnya gak mau. Dia nganggap kalau dibantuin ya udah, jadi semangatnya kurang gitu”.

Belum lagi ketika rencana program ini dilaksanakan, warga Mukim Lamteuba yang sudah berubah budayanya justru secara terang-terangan menginginkan agar dana yang akan dibantu untuk diberikan kepada warga saja. Argumen yang digunakan mereka karena perbedaan yang jauh membuat dana bantuan itu tidak tersalurkan kepada warga yang berhak.

Mereka tetap berkonsep seperti dulu, bahwa dana itu didrop di Lamteuba. Akan tetapi menurut saya, individu-individu sekarang tidak amanah. Kalau seandainya dana ini nanti bisa diubah menjadi swakelola. Dana ini akan kita salurkan melalui kecamatan. Itu lebih bagus, karena kontrolnya lebih bagus. Tapi kalau diberikan kepada kelompok, katakanlah ada KUD, tapi badan KUD itu tidak jelas

Seperti penjelasan Hamdani di atas, dapat diketahui bahwa timbul kekhawatiran dari Hamdani terkait dengan rencana BNN untuk menjalankan program ini. Jalan pintas yang ingin dilalui warga Mukim Lamteuba yang menjadi pokok keprihatinan Hamdani. Perilaku tidak amanah terhadap dana bantuan yang diberikan memicu terjadinya penyelewengan terhadap program bantuan.

### **5.2.2 Jumlah Petani yang ikut serta dalam Program *Alternative Development***

Berdasarkan jumlah petani yang ikut serta dalam program *alternative development*, warga Mukim Lamteuba berpartisipasi sebanyak 32 orang (**Gambar 5.4**). Selama pengamatan peneliti di Mukim Lamteuba, petani yang turut serta bukanlah petani ganja. Akan tetapi, mereka adalah warga Mukim Lamteuba yang mau dimanfaatkan lahan yang dimilikinya untuk ikut dalam program pemerintah. Fenomena ini seperti yang diungkapkan oleh Purwa Suahya bahwa mereka yang menanam ganja bukanlah warga Mukim Lamteuba, melainkan mereka yang tinggal di desa lain. “Mereka itu bukan penanam ganja, yang menanam ganja adalah mereka yang tinggal di desa lain. Jadi bisa dikatakan program yang mereka bentuk itu salah sasaran”.



DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK, PEMILIK, SERTA LUAS LAHAN PERTANIAN



NO	PERSONIL	JABATAN	KELOMPOK	TANAMAN	LUAS LAHAN	PEMILIK LAHAN	KESIAPAN LAHAN	LOKASI GAMPOENG
1	BAHRUN	KETUA		KUNYIT	4 Ha	MILIK PRIBADI	90%	LAMTEUBA DROE
2	IBRAHIM	ANGGOTA						
3	USMAN	ANGGOTA						
4	SOU MIRAMADHAN	ANGGOTA						
5		ANGGOTA						
1	FAHRULRAZI	KETUA		KUNYIT NILAM	4 Ha	MILIK PRIBADI	85%	PULO
2	MUNIR	ANGGOTA						
3	HALIM	ANGGOTA						
4	BUKHARI	ANGGOTA						
5		ANGGOTA						
1	SAMIN	KETUA		KUNYIT NILAM	4 Ha	MILIK PRIBADI	0%	LAMPANTE
2	SATID	ANGGOTA						
3	AKARIM	ANGGOTA						
4	USMAN	ANGGOTA						
5		ANGGOTA						
1	M DAUD	KETUA		NILAM KUNYIT KUNYIT	4 Ha	MILIK PRIBADI	0%	MEURAH
2	ADNAN	ANGGOTA						
3	MURHIBBAR	ANGGOTA						
4	MUSLEM	ANGGOTA						
5		ANGGOTA						
1	M THAHIR	KETUA		NILAM KUNYIT KUNYIT	4 Ha	MILIK PRIBADI	50%	BLANGTINGKEUM
2	MUNAWAR	ANGGOTA						
3	MUKTAR	ANGGOTA						
4	FUADI	ANGGOTA						
5		ANGGOTA						
1	HELM	KETUA		NILAM	4 Ha	MILIK PRIBADI	80%	ATELIK
2	M JAMIN	ANGGOTA						
3	HERY	ANGGOTA						
4	HASAN BASRI	ANGGOTA						
5		ANGGOTA						
1	YUSRI	KETUA		NILAM NILAM KUNYIT KUNYIT	4 Ha	MILIK PRIBADI	90%	LAMBADA
2	HAMDANI	ANGGOTA						
3	KHAMARUZZAMAN	ANGGOTA						
4	ZAKIYUDDIN	ANGGOTA						
5		ANGGOTA						
1	FALIZAN	KETUA		KUNYIT NILAM NILAM	4 Ha	MILIK PRIBADI	90%	LAM APENG
2	BUSSAIRI	ANGGOTA						
3	NAZARUDDIN	ANGGOTA						
4	MURHIBUDIN	ANGGOTA						
5		ANGGOTA						

ETERANGAN :  
TANAMAN JABON/COKLAT BERGABUNG DALAM 1 (SATU) LAHAN DENGAN KUNYIT SEBAGAI TANAMAN TUMPANG SARI

LAMTEUBA, MARET 2012

PENYULUH / PENDAMPING :

  
 LLY A.S. AMd
   
 THAYALIS AMd

Sumber: observasi, 2012

**Gambar 5.4 Daftar Petani Nilam Program *Alternative Development* BNN**

Peneliti menemukan fenomena kegagalan dalam pelaksanaan konsep indikator kinerja. Laporan yang dibuat oleh pelaksana program hanya berdasarkan jumlah peserta yang ikut pembekalan atau pelatihan bukan berdasarkan pemetaan awal warga. Hal ini didapatkan dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika mengikuti perjalanan bersama tim BNN. Jadi capaian angka yang ditulis di dalam LAKIP, itu hanya sebatas uraian data peserta yang ikut pelatihan bukan penanam ganja di Mukim Lamteuba.

Purwa Sucahya menjelaskan bahwa sebenarnya mereka belum melakukan pemetaan terhadap petani ganja. Jika merujuk dari apa yang disampaikan oleh Dale terkait dengan apakah program dijalankan sesuai dengan tujuan program, melihat penyimpangan yang terjadi sudah dapat dikatakan bahwa program ini berjalan menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Dale terkait dengan petani ganja dapat beralih profesi ke petani yang menanam tanaman legal produktif, maka yang sesungguhnya terjadi adalah tidak tercapai. Pasalnya pemetaan terhadap jumlah petani ganja belum dilakukan di Mukim Lamteuba sedangkan nilam dan jabon merupakan tanaman yang hadir bukan atas dasar keinginan dari warga Mukim Lamteuba. Jika hal ini dibiarkan maka yang terjadi adalah penghabisan anggaran negara untuk hal-hal yang tidak memiliki capaian kinerja.

### **5.3 Engage Stakeholders**

Pada Sub Bagian *Engage Stakeholders*, peneliti membahas mengenai Kelompok Sosial Masyarakat yang Terbentuk, Keterlibatan Pemerintah/NGO dalam Organisasi Bentukan Warga, dan Identifikasi *Stakeholder* Proses Perencanaan Program *Alternative Development*.

#### **5.3.1 Kelompok Sosial Masyarakat yang Terbentuk**

Kelompok masyarakat yang terbentuk dari program *alternative development* direncanakan merupakan kelompok yang mampu memberikan dorongan terhadap kesuksesan program ini. Selama proses pengumpulan data di lapangan, peneliti menemukan satu kelompok kepemudaan Mukim Lamteuba. Kelompok ini berperan dalam memberikan masukan kepada Kepala Mukim Lamteuba. Masukan-masukan yang dimaksud terkait dengan sosial kemasyarakatan di Mukim Lamteuba.

Terkait dengan program *alternative development*, organisasi ini juga memberikan masukan kepada Kepala Mukim. Salah satu adalah dengan mengirim partisipan penyuluh pertanian dari Mukim Lamteuba. Penyuluh ini diminta oleh BNN agar mau membantu untuk mengontrol rencana program alih fungsi lahan tanam jabon dan nilam berhasil dilaksanakan. Kesalahan program alih fungsi lahan sebelumnya dikarenakan tidak ada yang melakukan supervisi terhadap program yang dilaksanakan sehingga tidak ada hasilnya.

Tayalis menjelaskan bahwa sebagai seorang penyuluh lapangan memiliki tantangan terberat. Tantangan itu berhubungan dengan masyarakat yang memiliki pemikiran berbeda-beda. Di samping itu, selama dua tahun sejak kelulusan dari

perguruan tinggi, dia bersama temannya sudah tidak bisa mencari pekerjaan lain selain menjadi penyuluh. Hal ini dirasa berat oleh keduanya, pasalnya tidak ada mata pencaharian lain selain itu.

Sekarang kaya gini, jabatannya kami sekarang kedepannya tuh gak jelas, sekarang aja di Balai Penyuluhan Pertanian, statusnya gak jelas. Sekarang gimana sih namanya juga ini ada ongkos, perlu uang juga, makanya udah berapa kali kita ke Pemda langsung tapi gak ada respon apa-apa. Padahal, kami ngabdinya udah hampir 2 tahun.

BNN sendiri yang meminta bantuan dari kedua penyuluh ini belum memberikan status kepada mereka. Hampir satu tahun, keduanya menjadi penyuluh untuk pertanian bagi BNN, tetapi gaji untuk mereka belum diberikan. Seperti yang dijelaskan oleh Tayalis, “katanya status dari BNN sih dikontrak tapi sampai sekarang belum nerima gitu, cuma omongan aja kalo itu bakalan dikontrak sama BNN”. Hamdani mencoba mengkalkulasikan berapa total pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh BNN, “gaji seorang penyuluh katakan kalau per bulan Rp. 1,5 juta berarti satu tahun Rp. 18 juta berarti untuk dua orang penyuluh Rp. 36 juta yang harus dikeluarkan oleh BNN”.

### **5.3.2 Keterlibatan Pemerintah/NGO dalam Organisasi Bentukan Warga**

Keterlibatan pemerintah dalam organisasi bentukan warga Mukim Lamteuba, tidak ada. Akan tetapi, terkait dengan program bantuan, fenomena menarik dari warga adalah membentuk organisasi yang memang akan diberikan bantuan pemerintah. Seperti yang terjadi di Mukim Lamteuba itu sendiri, ketika akan dilaksanakan program alih fungsi lahan ke jabon dan nilam, tiba-tiba terbentuk kelompok-kelompok tani.

Fenomena ini terjadi karena orientasi mereka masih berdasarkan bantuan yang akan diberikan pemerintah kepada kelompok tani tersebut. Hamdani menjelaskan ketika direncanakan tahun 2012 ini akan ada program bantuan jabon dan nilam sebesar Rp. 15 juta per kelompok, tiba-tiba saja mereka membentuk



kelompok-kelompok tani. Mereka ini membentuk karena mau merebut uang Rp 15 juta tersebut bukan untuk kesuksesan program yang direncanakan pemerintah.

bukan masalah program ini, barusan saya melihat yang saya terus berpikir, kelompok-kelompok ini hanya berpikir yang 15 juta itu. Itu yang ngeri... Karena orang bagaimana merebut yang 15 juta ini. Saya harus dapat, bapak harus dapat, kemudian masalah program usaha ga berhasil ga masalah karena ini kan bantuan pemerintah.

Pola ini yang diungkapkan oleh Purwa maupun Evlyn sebagai bagian dalam pembentukan proses perubahan sosial masyarakat di Aceh setelah bencana tsunami. Hal tersebut bisa merubah paradigma mereka karena sejak bencana tsunami mereka sudah terbiasa mendapatkan bantuan sosial. Paling utama dari kegiatan bantuan adalah yang penting mereka merasakan dulu bantuan yang diberikan pemerintah tanpa harus meminta timbal baliknya. “Ya sudah, sini uangnya berapa, kamu mau kasih? nanti dikerjain. Kan ini hibah. Semenjak ada tsunami kebudayaannya sudah habis” (Wawancara Purwa Sucahya, 1 Juni 2012).

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Sidu dan Sugihen (2007: 13), diketahui bahwa

tingkat keberdayaan masyarakat memiliki korelasi positif dan cukup kuat dengan ... kemampuan pelaku pemberdayaan dalam mengenal kondisi sosial masyarakat sasaran dan perencanaan partisipatif serta proses pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara efektif

Hal ini yang sebisa mungkin dapat dikembangkan oleh pelaksana program alternative development di Mukim Lamteuba. Jika kemampuan pelaksana program tidak mengenal kondisi sosial masyarakat maka tujuan dan sasaran tidak akan tercapai.

### 5.3.3 Identifikasi *Stakeholder* Proses Perencanaan Program *Alternative Development*

Adapun *stakeholder* yang dapat diidentifikasi dari hasil observasi lapangan, antara lain:

1. Direktorat Jendral (Dirjen) Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian;
2. Dirjen Bina Produksi Hortikultura Kementerian Pertanian
3. Dirjen Pengolahan Lahan dan Air Kementerian Pertanian
4. Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan
5. Dirjen Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan
6. Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan
7. Dirjen Bina Penta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dirjen Bina Marga Kementerian PU
9. Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial
10. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial
11. Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian
12. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri
13. Dirjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM
14. Dirjen Bina Produksi Peternakan Kementerian Pertanian
15. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian Negara Koperasi dan UKM
16. Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak
17. Deputi Bidang Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya KPDT

*Stakeholder* yang dipetakan di atas, merupakan *stakeholder* yang mampu membantu BNN dalam merencanakan dan melaksanakan program *alternative development* di Mukim Lamteuba. Kejadian yang pernah dialami oleh BNN terkait program *alterntaive development* setidaknya tidak terulang kembali. Koordinasi antar instansi terkait menjadi modal dasar dalam meraih kesuksesan program yang direncanakan.

#### 5.4 Describe The Program

Rencananya, program *alternative development* yang akan dilaksanakan oleh pelaksana program, yaitu rencana alih fungsi lahan ganja ke tanaman jabon dan nilam. Alih fungsi lahan jabon dan nilam ini diharapkan mampu untuk menarik perhatian masyarakat agar mau menjadikan tanaman alternatif pengganti ganja. Nilam dan jabon dijadikan sebagai tanaman alternatif BNN karena mampu memberikan keuntungan bagi warga Mukim Lamteuba, namun sebelum hal tersebut dilaksanakan maka diperlukan analisis *feasibility* dari tanaman pengganti tersebut.

##### 5.4.1 Ganja

Ganja menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh karena ganja menjadi roda penggerak kehidupan. Ganja juga menjadi barang yang *illegal* untuk ditanam di Dunia walaupun ganja digolongkan *soft drugs* jika dibandingkan heroin, kokain dan opium (*hard drugs*). Seperti yang dijelaskan oleh Ahwil “Ganja ini kalo di dunia internasional ini termasuk *soft drugs* sedangkan *hard drug* itu adalah heroin, morfin, kokain”.

Di Aceh, ganja menjadi komoditas yang menguntungkan bagi warga masyarakat. Pasalnya, ganja membuka lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Amin yang berprofesi sebagai penanam ganja, “kami menanam ganja karena tidak punya pekerjaan”. Berprofesi sebagai petani ganja dapat memberikan keuntungan yang cepat dan modalnya mudah. Amin dan Saidin yang juga berprofesi sebagai penanam ganja menjelaskan, “Hasil ganja tidak banyak. Kita mau kerja lain tetapi tidak ada modal. Kalau tanam ganja tidak perlu modal besar, modal didapat dari agen/toke, kita kerja saja dan makan ditanggung”.

Ketika melakukan observasi ke Mukim Lamteuba, peneliti mencoba mendalami seberapa jauh seorang petani ganja mendapatkan keuntungan dari menanam ganja. Setibanya datang di Mukim Lamteuba, peneliti melihat beberapa kendaraan keluaran tahun 2011 yang bisa dikatakan merupakan kendaraan mewah seperti Panther *Touring* dan Innova G *Serries*. Saat ini pasaran harga mobil

tersebut sekitar Rp. 150-200jt. Menjadi pertanyaan dalam diri peneliti, di daerah yang terpencil seperti ini terdapat mobil mewah seperti itu.



Sumber: data primer hasil observasi, 2012

**Gambar 5.5 Kehidupan di Mukim Lamteuba, Aceh Besar, Aceh  
Kepala Mukim Lamteuba, Tim BNN, dan Peneliti**

Seperti yang diungkapkan oleh Tayalis, bahwa mobil-mobil yang lalu lalang (tidak terdokumentasikan oleh peneliti) tersebut merupakan mobil yang dibeli dari hasil menanam ganja, “hehehe... mobil-mobil mewah juga lumayan lah di sini lewat walau pun perkampungan pedalaman gitu”. Penghasilan yang didapat dari mana, Tayalis menyampaikannya tidak secara lugas dan jelas, “kalo penghasilannya, kemarin kan dari BNN, ini kan apa siy kayak membasmi Narkotika”. Peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam lagi kepada informan bahwa warga masyarakat Mukim Lamteuba masih ada yang menanam ganja dan disetujui oleh Tayalis. Jadi, terlihat bahwa warga masyarakat di Mukim Lamteuba mendulang kesuksesan dari menanam ganja.

Padahal, posisi Mukim Lamteuba (**Gambar 5.6**) sendiri merupakan mukim yang posisinya di kaki Gn. Api Seulawah Agam (**Gambar 5.7**). Jika peneliti bandingkan dengan kehidupan di kaki Gn. Semeru, Jawa Timur, kehidupan di sini lebih sukses. Oleh sebab itu, peneliti mencoba untuk menganalisis seberapa besar keuntungan yang didapatkan petani ganja di sini.



Sumber: Pemetaan Wilayah MFLF, 2007

**Gambar 5.6 Peta Wilayah Mukim Lamteuba, Aceh Besar**



Sumber: data primer hasil observasi, 2012

**Gambar 5.7 Gn. Api Seulawah Agam, Mukim Lamteuba, Aceh Besar**

Tayalis menyebutkan biasanya petani ganja untuk menanam per lahan ada yang satu hektar dan ada yang dua hektar. Lalu, ketika menanam biasa dilakukan per kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Hutan dibuka atau ditebang dan dijadikan lahan baru. Status lahannya adalah milik kelompok yang membuka lahan tersebut. Biasanya petani ganja menanam jauh dari rumah dan menginap di hutan tempat mereka menanam.

... untuk nanam itu per lahan itu ada yang satu hektar, ada yang dua hektar. Biasanya per kelompok itu dibukanya adari lahan baru. Jadi itu kan 5 orang, lebih dari 2-3 orang. Itu nebang. Pembukaan lahan baru. Itu lahannya ya milik orang berlima itu. dari pembukaan. Biasanya kan yang didaerah sini kan agak jauh dari rumah gitu. bisa ada yang nginep di hutan” (Wawancara Tayalis, 28 Mei 2012).

Tayalis menjelaskan bahwa setiap hektarnya, petani ganja dapat menghabiskan biaya sebesar lima juta ke atas. Biaya tersebut dipergunakan dari awal sampai dengan siap panen. Jika mengikuti masa tanam maka menanam ganja membutuhkan waktu selama 6 bulan. “Kalo satu hektar itu perlu dana itu semuanya sampai siap panen (6 bulan) tuh sekitar 7 jutaan. Pokoknya 5 juta ke atas”, ucapnya.

Peneliti mencoba lebih dalam lagi dalam menanyakan kepada informan mengenai tahapan menanam ganja yang dilakukan oleh petani ganja. Tayalis menceritakan, bahwa pembibitan dilakukan selama 15 hari dan membutuhkan biaya lebih dari Rp. 2-3 juta. Biaya tersebut dipergunakan untuk makan selama membuka lahan dan menginap 15 hari. Namun ada pula yang hanya membersihkan bekas lahan yang pernah digunakan sebelumnya (intensifikasi lahan). “kalo bibitnya itu sekitar 15 hari. Tadi kan bedengan geng gitu, apa tuh tabor benih kayak gitu buat makan, sekitar 2 adalah ya bahkan bisa lebih kalau boros”.

Selepas fase penanaman selama 15 hari maka petani masuk ke fase berikutnya, yaitu fase perawatan. Pada fase perawatan ini petani tidak terlalu sulit karena dapat ditinggal. Proses perawatan ini dikerjakan hanya beberapa kali naik ke ladang yang dikerjakan hanya untuk melihat perkembangan tanaman. Biasanya proses ini dilakukan dua minggu sekali selama satu bulan. Biaya yang dikeluarkan untuk fase perawatan ini  $\geq$  Rp. 7 juta.

Perawatannya itu engga terlalu susah, paling juga kita berapa minggu naik sekali untuk liat perkembangannya. Biasanya sekitar 2 minggu sekali gitu, perawatan itu ini 7 juta tuh paling irit gitu tapi kalo misalnya kalo dibawah

7 juta tuh gada tapi kalo di atas 7 juta sampe 10 juta itu ada(Wawancara Tayalis, 28 Mei 2012).

Sucahya dalam diskusi yang dilakukan via telepon memberikan keterangan bahwa satu hektar ladang ganja dapat menghasilkan 9.000 pohon. Setiap pohon ganja yang ditanam oleh petani ganja dapat menghasilkan tujuh kilogram. Sedangkan harga jual ditingkat petani ganja saat ini sebesar Rp. 50.000 – 100.000,-. Seperti yang diungkapkan oleh Sucahya, “1 ha ladang ganja dapat menghasilkan 9.000 pohon, 1 pohon dapat 7 Kg totalnya dikali aja. Sedangkan harga ditingkat petani antara Rp. 50.000 - 100.000,-/kg”.

Peneliti mencoba untuk mengasumsikan keuntungan dari menanam ganja pada bagian ini. Jenis tanaman adalah ganja Aceh. Jumlah bibit tiap hektarnya 10.000 bibit dengan asumsi setelah penjarangan maka yang tersisa sebanyak 9.000 pohon. Umur panen yang pada umumnya adalah 6 bulan sekali jika lebih dari itu maka hasilnya kurang bagus, seperti yang diungkapkan oleh sucahya, “umur panen ganja itu 6 bulan kalau lebih biasanya tidak ada yang mau beli”.

Perhitungan biaya perawatan yang diungkapkan oleh Tayalis di atas, sebesar Rp. 7.000.000,- dikurangi dengan biaya pembukaan lahan sebesar Rp. 3.000.000,- maka didapat angka sebesar Rp. 4.000.000,- (Biaya perawatan per masa tanam). Dari angka tersebut dipecah menjadi 5 bulan, maka di dapat biaya perbulan fase perawatan sebesar Rp 800.000,-. Peneliti mencoba untuk mengasumsikan jika pembukaan lahan ganja membutuhkan biaya yang besar dengan pola hidup boros dari petani pembuka lahan, maka didapatkan angka sebesar Rp. 150.000,-. Penetapan angka sebesar itu dikarenakan petani harus makan di hutan, menginap, dan upah per harinya.

Setelah itu, masuk pada fase panen dari ladang ganja ini, keuntungan maksimal akan didapatkan petani ketika satu hektar menghasilkan 9.000 pohon yang ditanam sejak awal. Akan tetapi, perlu diingat bahwa terdapat operasi yang biasa dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, walaupun operasi ini tidak mampu memberantas seluruh ladang. Kontribusi dari operasi pemberantasan dari 9.000 pohon ganja maka 3.500 pohon disisakan untuk dijadikan barang bukti operasi aparat penegak hukum (**Gambar 5.8**). Angka ini didapat dari rata-rata

jumlah barang bukti yang disita oleh Polda Aceh yang sudah diuraikan di Bab sebelumnya. Berikut perhitungan kelayakan usaha ganja (**Tabel 5.1**):

**Tabel 5.1 Analisis Kelayakan Ganja**

Hasil Wawancara Mendalam dengan Tayalis dan Purwa Kurnia Sucahya	
Asumsi	
Jenis	Ganja Aceh
Jumlah Bibit	10.000/ha
Jarak Tanam	1 x 1 m <sup>2</sup>
Jumlah Pohon Ganja siap panen umur 6 bulan	9.000 pohon
Jumlah Pohon yang mati	1.000 pohon
Jumlah Pohon yang disisakan untuk operasi gabungan	3.500 pohon
Jumlah Kilogram Ganja tiap 1 pohon	7 Kg
Umur Panen	6 bulan
Harga ditingkat petani	Rp. 50.000/Kg
Penggarap Lahan	5 orang
Biaya Produksi Per Hektar	
Biaya Makan penyiapan lahan dan penanaman selama 15 hari	
Rp. 150.000/orang	Rp 11.250.000
Pemeliharaan bulan I	Rp 800.000
Pemeliharaan bulan II	Rp 800.000
Pemeliharaan bulan III	Rp 800.000
Pemeliharaan bulan IV	Rp 800.000
Pemeliharaan bulan V	Rp 800.000
Biaya Keluarga selama ditinggalkan berladang Rp. 40.000/1 keluarga penggarap	Rp 108.000.000
Total Biaya	Rp 123.250.000
Pendapatan dan Keuntungan	
Pendapatan 9.000 x 7 Kg x Rp. 50.000	Rp 3.150.000.000
Keuntungan	Rp 3.026.750.000
Rata-rata keuntungan/Orang	Rp 605.350.000
Namun jika tiap ladang memberikan kontribusi dalam operasi gabungan pemusnahan ganja sebesar 3.500 Pohon	
Keuntungan	Rp 1.925.000.000
Rata-rata keuntungan/Orang	Rp 1.801.750.000
Rp 360.350.000	
Jika Pola yang dilakukan selepas penanaman ganja, penanam ganja akan berhenti menanam selama satu tahun maka keuntungan yang diperoleh :	
Asumsi:	
Sisa Bulan 6 bulan = 180 hari	
180 hari + 360 hari = 540 hari	
Biaya konsumsi keluarga Rp. 50.000/1 keluarga penggarap	Rp 108.000.000
Keuntungan penggarap	Rp 252.350.000
Keuntungan penggarap dari nanam sampai 18 bulan kemudian	Rp. 10.514.583

Sumber: data primer, 2012

Berdasarkan tabel di atas, pada kolom biaya, peneliti menambahkan biaya makan keluarga, berdasarkan yang disampaikan oleh Sitompul (Wawancara Kasubbag TU Deputi Pemberantasan BNN, 5 Mei 2012) yang menyatakan bahwa petani ganja meninggalkan dana untuk keluarga yang ditinggalkan dan semasa



penanaman. Angka yang biasa digunakan sekitar Rp. 40.000,-/hari itu pun menurutnya sudah besar untuk suatu keluarga yang hidup di desa. Seperti yang diungkapkan oleh Sitompul, “biaya makan untuk keluarga yang ditinggal berladang, di Medan biasanya mereka ini ditinggalkan Rp. 40.000,-/hari dan itupun sudah cukup untuk mereka karena kehidupannya masih desa”.

Ditambahkan pula oleh Ari Lispriyanto, bahwa ketika mereka mendapatkan uang, maka mereka akan memberikannya kepada keluarga, “ ’Besok gua perlu segini ya, besok gua kasih sekian’. Udah. Ya udah langsung terima ja, dia langsung buat biaya keluarganya”. Hal ini yang menjadi dasar peneliti mencantumkan biaya makan keluarga. Jika tanpa memperhitungkan tanggungan biaya keluarga, maka penanam ganja hanya membutuhkan modal sebesar Rp. 15.250.000,- untuk masa enam bulan.



Sumber: dokumen Ari Lispriyanto, 2008

### **Gambar 5.8 Brimob Polda Aceh saat Operasi Pemberantasan Ladang Ganja**

Selain itu, terdapat pola penanaman yang dilakukan oleh petani ganja. Penanaman itu tidak dilakukan serta mereka dalam satu tahun dua kali panen. Akan tetapi pola yang digunakan oleh petani ganja dalam menanam adalah satu kali panen dengan tiga semester berhenti panen. Hal ini dilaksanakan untuk menyasati operasi pemberantasan narkoba atau dengan kata lain mengelabui aparat penegak hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Sitompul, “menanam ganja

itu tidak selalu terus menerus, tetapi mereka itu menanam dengan pola 6 bulan menanam dan berhenti selama 18 bulan”.

Pola menanam 6 bulan dengan berhenti menanam selama 18 bulan merupakan pola yang ditempuh oleh petani nuntuk mengelabui petugas penegak hukum dalam melaksanakan operasi. Pasalnya mereka akan mencari celah agar mereka tidak tertangkap dalam operasi pemberantasan narkoba (**Gambar 5.9**). Tidak masalah ketika yang diberantas itu ladangnya asalkan bukan orangnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ari Lispriyanto dalam wawancara mendalam:

Sekarang kan gini, yang paling banyak ditangkap anggota itu kan petani. Sementara yang punya lahan atau lading ini belum pernah kedengaran kan, petani atau bukan. TO nya mereka kan paling nggak lahan itu dulu kan. Berapa hektar sama petani. Lah petani terus mau diapain. Petani itu nggak akan kaya.



Sumber: dokumen Ari Lispriyanto, 2008

### **Gambar 5.9 Petani Ganja yang Ditangkap oleh Polda Aceh**

Kemiskinan yang membuat petani ini menanam ganja. Mereka butuh penghasilan untuk membiayai pengeluaran mereka setiap harinya. Ketika melihat kondisi ini, dimanfaatkan oleh tengkulak atau sindikat untuk menanam ganja. Seperti yang diungkapkan oleh Ahwil, “memang intinya tuh kemiskinan sebetulnya karena mereka miskin ada yang mengimi-imingi mereka duit, dia gak perlu ngurus marketing, begitu datang diladang sudah ada yang bayar, ini yang

kita lawan gitu kan”. Lalu ditambahkan pula oleh Ari bahwa penghasilan yang cepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat adalah ganja itu sendiri. Mereka tidak perlu susah payah dalam menjual hasil ganja dan mencari pasarnya. Seperti yang dikatakan Ari Lispriyanto:

Karena pola pikir mereka itu kan gak mau capek, pengennya serba jadi. Masalahnya kan itu. Kalo perlu dengan tidak capek, dengan duduk begini, dapat uang. Kalau dari kalangan masyarakat bawah, petani, mereka nggak ngerti kaya begituan. Intinya sekarang gua bisa makan dapet dari mana. Terlepas gue mau jual ganja kek, menggarap lahan kek, itu aja. Dapat duit selesai. Dia udah nggak tahu lagi yang dilarang atau nggak.

Hal ini tidak selalu mereka lakukan, walaupun nantinya ada pekerjaan lain maka mereka akan beralih profesi. Seperti yang diungkapkan oleh Amin, bahwa dia akan beralih profesi ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan. Selama belum mendapatkan pekerjaan maka dia akan kembali ke profesi sebelumnya.

Sebenarnya saya tidak mau menanam ganja tapi kalau susah dapat kerja saya terpaksa menanam ganja lagi, Kita Cuma dibayar 50 ribu tapi nanti sudah sampai di bosnya lagi..di bosnya lagi, itu baru orang ya.. sudah sampai di Medan itu nilainya sudah besar. Ini paling besar yang diterima 50 ribu. Hasil ganja tidak banyak. Yang banyak dapat uang adalah agen/toke. Kerjanya juga berat bisa ditangkap polisi, jalan menuju lokasi 2-3 hari karena melewati hutan dan sungai untuk menghindari petugas.

Kemalasan juga menjadi salah satu yang menyebabkan mereka kembali menanam ganja. Mereka kembali menanam ganja karena mereka juga malas untuk berusaha ke lain profresi. Seperti yang diungkapkan oleh Evlyn Soeleman peneliti di Aceh, bahwa orang Aceh sendiri memiliki kebanggan terhadap dirinya sendiri. Ketika harus harus mengerjakan pekerjaan yang dianggap mereka rendah, maka mereka tidak akan mengerjakannya sama halnya dengan orang Betawi. Jadi

anggapan mereka malas juga bisa dikatakan sebagai bentuk pertentangan yang sudah lama dirasakan di masyarakat.

eee dn males orang lokal sendiri cenderung ya dimana-mana sih sebetulnya karena orang lokal dimana-mana kalah kan sama pendatang, termasuk Betawi pokoknya setiap kali masuk ke satu daerah pasti semua bilang males tuh orang lokal, ya itu sih saya bilang itu sudah apa pertentangan pendatang dengan orang lokal karena orang lokal bilang ‘gua dari dulu begini-gini aja bisa idup ngapain gua mesti bekerja keras kan gitu’.

#### **5.4.2 Jabon**

Lalu, dalam menghadapi benturan kemiskinan dan kemalasan ini tanaman seperti apa yang harus dijadikan sumber mata pencaharian Mukim Lamteuba? Pasalnya, nilai jual yang tinggi, kemiskinan yang dihadapi masyarakat lalu kemalasan karena kebanggaan kepada diri sendiri, menjadikan ganja tanaman yang cocok dengan masyarakat. Tantangan dihadapi ketika akan merubah pola pikir masyarakat ke jenis profesi lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Tayalis, “masyarakat di sini kalo penghasilan tetap gak ada tapi kalo pegawai negeri itu sendiri bisa diitung pake jari. Ari menambahkan justru hanya kepada orang-orang yang memiliki pikiran yang jernih dan maju yang mau berubah ataupun orang yang sudah jera untuk menanam ganja dapat diajak untuk alih profesi.

Siapa yang bisa menandingi nilai ganja. Nggak jarang orang malas beralih dengan alasan nilai uang tadi. Paling orang yang sudah berpikiran agak jernih, agak maju, dia jawabannya “Iya pak, kami sudah tinggalkan itu”. “Kenapa? kan nilai ganja lebih tinggi?”. “Ya lebih tinggi pak tapi kalau kami selalu dikejar-kejar polisi nanti repot juga keluarga kami”. Tapi kalau yang ke bawah ya pikirannya seperti itu tadi, “kami butuh hidup pak, untuk makan aja kami sudah sulit. Dengan adanya ganja kami grap, lumayan pak. Padahal kami kalau secar itung-itungan rugi pak, yang untuk ya bos-bos atas.

Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini BNN, untuk mengalihfungsikan lahan ganja adalah dengan menghadirkan Jabon. Jabon diharapkan menjadi alternatif tanaman masyarakat di Lamteuba. Di samping itu, nantinya diharapkan Jabon menjadi komoditas unggul dari Mukim Lamteuba (**Gambar 5.10**).



Sumber: observasi lapangan, 2012

**Gambar 5.10 Salah Satu Pohon Jabon di Mukim Lamteuba, Aceh Besar**

Terdapat tantangan dalam menanam jabon. Pasalnya, jabon bukanlah pohon yang istimewa di Mukim Lamteuba. Masyarakat belum terpenggil untuk menanam jabon. Terbukti selama melakukan observasi di Mukim Lamteuba, Jabon hanya dimiliki oleh salah seorang pendatang dari Jakarta, pegawai Bank Indonesia (BI). Kepemilikan lahan dan pohon jabon, untuk membantu program yang dijalankan oleh BNN agar masyarakat mau menanam seperti halnya (**Gambar 5.11**).

Keyakinan tim dari BNN untuk melaksanakan program alih fungsi lahan khususnya menanam Jabon adalah kepercayaan yang diberikan oleh Gubernur Irwandi Yusuf kepada tim BNN. Hal ini yang memberikan semangat kepada tim

BNN walaupun masyarakat belum menyetujui tanaman yang ingin diganti. Seperti yang diungkapkan Hendrajid:

Jabon itu banyak. Aceh itu tidak istimewa lah untuk Jabon. Tetapi perlu diingat Aceh itu diujung, diujung Indonesia. Lebih dekat aceh ke berbagai Negara dari pada Jawa. Lahan nya lebih subur di sana, penggarapannya lebih cepat. Jadi pak Irwandi Yusuf pernah bilang, di Sumatera itu 80 persen hutan di Aceh. Itu hutan yang belum disentuh ya. Kalo 100 persen hutan yang di Sumatera dibagi-bagi, itu masih 80 persen hutannya milik Aceh. Yang lain hutan lindung milik Negara. Jabon ini kehutanan. Jabon itu di gunung, di luar pemukiman, di daerah-daerah yang diberantas tanaman dia tumbuh. Tanpa mendapatkan perawatan yang serius dia tumbuh.



Sumber: observasi lapangan, 2012

**Gambar 5.11 Peninjauan Lahan Jabon Milik Pegawai BI, Tim BNN, Dinas Kehutanan Aceh dan Petani Jabon di Mukim Lamteuba, Aceh Besar**

Seperti yang dijelaskan Anas, dari Dinas Kehutanan Aceh menjelaskan bahwa harga bibit jabon di Aceh berkisar antara Rp. 1.000,-. Setiap hektar dari lahan jabon menghasilkan 500 m<sup>3</sup> dengan asumsi, pohon jabon subur 30 cm. Saat ini, harga per m<sup>3</sup> jabon sekitar Rp. 600.000,- sehingga penghasilan kotor dari petani jabon adalah 500 m<sup>3</sup> x Rp. 600.000,- = Rp. 300.000.000,-. Seperti yang dijelaskannya:

Harga bibit jabon di Aceh Rp. 1.000,- dengan hasil tiap hektarnya 500 m<sup>3</sup> dengan asumsi diameter 30 cm (subur) dan harga perkubik Rp. 600.000,- jadi 500 x 600.000 jadi hasilnya Rp. 300.000.000,- untuk 1 (satu) hektar per 6 tahun ketika petani memiliki 2 ketar maka petani akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipatnya dan bisa menaikkan haji bagi si petani tersebut.

Maka dari itu, peneliti mencoba untuk mengasumsikan keuntungan dari menanam jabon pada bagian ini. Jenis tanaman adalah jabon putih. Jumlah bibit tiap hektarnya 1.100 bibit. Umur panen yang pada umumnya adalah 6 tahun sekali dan bisa lebih. Perhitungan biaya perawatan dapat dihitung dengan merujuk pada buku Jabon terbitan Trubus yang diperkirakan, sebesar Rp. 2.430.000,- untuk tahap awal dan selebihnya sebesar Rp. 400.000,-.

Pemeliharaan hanya dilakukan 4 tahun karena di tahun berikutnya, pohon jabon dapat mencari makan sendiri. Jumlah penggarap lahan biasanya antara 3-4 orang. Biaya membengkak dari pemupukan awal, yaitu habis dana sebesar Rp. 15 juta. Hal ini terjadi lantaran untuk menghasilkan jabon yang tumbuh subur, maka pemupukan awal sangat diperlukan.

Biacara masalah keuntungan, maka setelah dihitung secara sistematis, maka didapatkan setiap hektarnya mampu menghasilkan 735,94 m<sup>3</sup> dengan harga jual di Aceh sebesar Rp.600.000,-. Peneliti mencoba membandingkan dengan profit yang dihasilkan ganja dengan jabon, maka peneliti menghitung dan memasukkan biaya makan untuk keluarga penggarap lahan jabon dengan asumsi sebesar Rp. 50.000,-/ keluarga. Keuntungan bersih perbulan untuk setiap penggarap sebesar Rp. 286.750,-. Berbeda dengan ganja yang mampu memberikan keuntungan sebesar Rp. 10.514.583,- per bulannya. Berikut disajikan perhitungan kelayakan jabon (**Tabel 5.2**):

**Tabel 5.2 Analisis Kelayakan Jabon**

Dari hasil wawancara Anas Mahmudi, S.Hut, M.Ma (Kepala Seksi Bina Pengembangan Hutan Tanaman) serta merujuk pada Buku Sengon dan Jabon

Asumsi	
Jenis	Jabon Putih
Jumlah Bibit	1.100/ha
Jarak Tanam	3 x 3 m <sup>2</sup>
Umur Panen	6 tahun
Diameter 25 cm; Tinggi 15 m; Jumlah Pohon siap Panen 1.000 Pohon	
Perkiraan Volume Kayu/ha (Rumus: $VP=(1/4\pi d^2xt)$ )	735,94 m <sup>3</sup>
Harga Kayu	Rp. 600.000/m <sup>3</sup>
Jumlah Penggarap	4 Orang/ha
<b>Biaya Produksi Per Hektar</b>	
Bibit Rp. 5.000 x 1.100	Rp 5.500.000
Bibit untuk penyulaman (20%)	Rp 1.100.000
Penyiapan lahan	Rp 1.500.000
Penanaman	Rp 1.150.000
Pengendalian gulma	Rp 850.000
Pemupukan awal	Rp 15.850.000
Pestisida dan insektisida	Rp 400.000
Transportasi	Rp 5.000.000
Pemeliharaan tahun I	Rp 2.430.000
Pemeliharaan tahun II	Rp 400.000
Pemeliharaan tahun III	Rp 400.000
Pemeliharaan tahun IV	Rp 400.000
Biaya Makan sehari Penggarap dan Keluarga Rp. 50.000/1 keluarga penggarap	Rp 324.000.000
<b>Total Biaya</b>	<b>Rp 358.980.000</b>
<b>Pendapatan dan Keuntungan</b>	
Pendapatan 735,94 x Rp. 600.000	Rp 441.564.000
Keuntungan	Rp 82.584.000
Rata-rata keuntungan/bulan sejak menanam hingga panen	Rp 1.147.000
Keuntungan perorang penggarap	Rp 286.750

Sumber: data primer, 2012

Merujuk pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa keuntungan yang didapatkan jauh berbeda. Anas menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seulimeum (**Gambar 5.12**). Tindakan mereka untuk tidak memelihara jabon, bahkan sengaja menyianiyakan program yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh. Anas sempat memberikan bibit jabon sebanyak 17.000 bibit jabon namun satu pun bibit saat ini tidak ada yang hidup. Lalu, anas juga sudah memberikan upah bulanan untuk petani yang menanam jabon untuk menyambung biaya hidupnya tetapi satu pun jabon tidak ada yang tumbuh. Kondisi paling parah adalah ketika lahan yang dipergunakan



untuk menanam jabon sudah disertifikatkan justru dijual oleh yang sang pemilik lahan. Seperti yang diungkapkan oleh Anas:

... masyarakat tidak mau berupaya untuk memelihara jabon yang sudah diberikan padahal kita sudah berupaya kepada mereka untuk melaksanakan program tersebut. Tidak hanya bibit, upah bulanan trus lahan milik mereka sudah kami sertifikatkan tapi hasilnya justru lahan tersebut sudah dijual oleh pemiliknya (Wawancara Anas Mahmudi, 29 Mei 2012).



Sumber: observasi lapangan, 2012

**Gambar 5.12 Diskusi Peneliti, Tim BNN dengan Dinas Kehutanan tentang Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Kehutanan kepada Warga Seulimeum**

### 5.4.3 Nilam

Alternatif berikutnya yang coba ditawarkan kepada warga Mukim Lamteuba adalah Nilam (**Gambar 5.13**). Nilam dijadikan sebagai komoditas lainnya yang digunakan untuk mendongkrak perekonomian petani di sana. Hal ini dimaksudkan agar petani memiliki pendapatan yang cepat sebelum menuai hasil dari jabon yang panen saat berumur enam tahun. Seperti yang dijelaskan oleh Hendrajid bahwa strategi yang diterapkan untuk Mukim Lamteuba adalah dengan menanam jabon dan nilam tidak bisa salah satu. Pasalnya, jika salah satu yang diprioritaskan maka petani tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Seperti yang diungkapkannya:

Nah dua strategi ini yang kita pakai. Kalo semua dipukul rata nilam atau jabon saja ya ga akan mungkin dapat hasil yang maskimal. Yang jelas masalah yang kita bidik itu hanya 8 bulan karena di bulan ke 9 balik ke lokasi awal untuk proses penanaman nilam.



Sumber: observasi lapangan, 2012

**Gambar 5.13 Sampel Nilam Gayo pada Acara Pembekalan Petani dalam Alih Fungsi Lahan Pengembangan Komoditi Nilam dan Jabon, Mukim Lamteuba**

Nilam sendiri memiliki masa tanam yang cepat dibandingkan dengan jabon. Nilam membutuhkan waktu selama enam bulan untuk menanam nilam sampai panennya. Seperti yang dikatakan Dik Dik bahwa BNN mencoba untuk mencari alternatif tanaman yang bisa berkembang dengan cepat, hasilnya bisa dinikmati segera dan mudah dalam perawatannya, nilam adalah jawabannya. Apalagi nilam Aceh merupakan nilam yang unggul. Dalam hal merubah pola menanam nilam bukan persoalan mudah. Seperti yang diutarakan Dik Dik:

itu petani itu kita lihat kemauan untuk berubah mau menanam tanaman selain ganja, kemudian tidak mudah untuk itu, kita harus mencari tanaman yang cepat,cepat menghasilkan, mudah mendapatkan, dan mudah dalam

perawatan, akhirnya kita pilih nilam, nilam terbaik dunia itu di Aceh kemudian unggul yang kedua sayangnya di aceh itu ketersediaan nilam itu sangat sedikit (Wawancara, Dik Dik Kusnadi, 9 April 2012)

Peneliti mencoba untuk mengasumsikan keuntungan dari menanam nilam pada bagian ini. Jenis tanaman adalah nilam Aceh. Jumlah bibit tiap hektarnya 20.000 bibit. Umur panen yang pada umumnya adalah 6 bulan. Perhitungan biaya perawatan dapat dihitung dengan merujuk pada Studi Dokumentasi Balitro Kementan dan Andre Walah (NGO Caritas), sebesar Rp. 25.470.000,-. Jumlah penggarap lahan biasanya antara 4 orang.

Bicara masalah keuntungan, setelah dihitung secara sistematis dari hasil panen, satu hektar lahan nilam bisa menghasilkan nilam basah sebesar 36 ton. Sedangkan setelah dikeringkan nilam kering memiliki bobot sebesar 7 ton. Lalu, setelah diolah menjadi minyak nilam, maka dapat menghasilkan minyak nilam sebesar 357,93 kg. Harga jual minya nilam sendiri di Aceh sebesar Rp.250.000,-. Maka keuntungan setelah dikurangi biaya yang didapatkan oleh petani sebesar Rp. 64.012.500,-.

Berikut disajikan perhitungan kelayakan nilam (**Tabel 5.3**):

**Tabel 5.3 Analisis Kelayakan Nilam**

Wawancara Mendalam Andre dan Studi Dokumentasi Balitro Kementan

Asumsi

Jenis	Nilam Aceh
Jumlah Bibit	20.000/ha
Jarak tanam	1 x 0,5 m <sup>2</sup>
Umur Panen	6 bulan
Harga ditingkat petani minyak nilam	Rp. 250.000/Kg
Penggarap Lahan	4 orang
Hasil Panen (Nilam basah)	36.720 kg
Hasil Panen (Nilam kering)	7.731 kg
Hasil Minyak Nilam	357,93 kg

Uraian	Satuan	Volume	Biaya satuan	Total biaya (Rp)
<b>Tenaga Kerja</b>				
Tebe semak belukar	HOK	28	Rp 20.000	Rp 560.000
Penebangan pohon	HOK	30	Rp 20.000	Rp 600.000
Pembersihan tunggul	HOK	20	Rp 20.000	Rp 400.000
Persiapan lahan	HOK	150	Rp 20.000	Rp 3.000.000
Penanaman	HOK	25	Rp 20.000	Rp 500.000
Penyulaman	HOK	8	Rp 20.000	Rp 160.000
Pemupukan	HOK	30	Rp 20.000	Rp 600.000
Pembuatan saluran air	HOK	60	Rp 20.000	Rp 1.200.000
Penyiangan	HOK	140	Rp 20.000	Rp 2.800.000
Pengendalian H/P	HOK	30	Rp 20.000	Rp 600.000
Panen	HOK	70	Rp 20.000	Rp 1.400.000
Prosesing/penyulingan	HOK	56	Rp 20.000	Rp 1.120.000
Total Biaya				Rp 12.940.000
<b>Bahan-bahan</b>				
Bibit	Polibag	22.000	Rp 300	Rp 6.600.000
Pupuk :				
1. kandang	Kg	10.000	Rp 250	Rp 2.500.000
2. urea	Kg	250	Rp 1.200	Rp 300.000
3. SP 36	Kg	100	Rp 1.200	Rp 120.000
4. KCl	Polibag	100	Rp 1.600	Rp 160.000
Obat-obatan	Paket	-	Rp 500.000	Rp 500.000
Karung	Bh	100	Rp 5.000	Rp 500.000
Tali rafia	Gulung	10	Rp 25.000	Rp 250.000
Bahan pembantu lain	Paket	1	Rp 500	Rp 500.000
Total Biaya				Rp 11.430.000
<b>Alat-alat</b>				
Cangkul	Buah	5	Rp 50.000	Rp 250.000
Sabit/golok	Buah	5	Rp 50.000	Rp 250.000
Sprayer	Buah	2	Rp 300.000	Rp 600.000
Total Biaya				Rp 1.100.000
<b>TOTAL</b>				Rp 25.470.000
<b>Pendapatan dan Keuntungan</b>				
Pendapatan 357,93 x Rp. 250.000				Rp 89.482.500
Keuntungan				Rp 64.012.500
Rata-rata keuntungan/bulan sejak menanam hingga panen				Rp 10.668.750
Keuntungan perorang penggarap				Rp 16.003.125

Sumber: data primer, 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa didapatkan keuntungan bersih perbulan untuk setiap penggarap sebesar Rp. 2.667.188,- atau sekali panen

mendapatkan keuntungan sebesar 16.003.125. Berbeda dengan ganja yang mampu memberikan keuntungan sebesar Rp. 10.514.583,- perbulannya. Tayalis menjelaskan jika menanam nilam untuk satu hektarnya belum tentu satu orang bisa beli motor. Ketika menanam nilam, justru yang ada adalah kita hutang ke orang lain dan hasil nilam untuk menutup hutang lagi. Seperti yang diungkapkan Tayalis berikut, “kalo emang seandainya nanem nilam satu hektar, tuh satu orang aja belum tentu bisa buat beli motor, ya langsung cukup seandainya kita hutang-hutang perbulan tuh hasil panennya untuk nutupin”.

Budidaya nilam sendiri membutuhkan kesadaran bagi penanamnya untuk merawat selalu, jika tidak maka yang terjadi adalah gagalnya budidaya itu. Hal ini diungkapkan oleh Hendrajid, “nilam itu lebih menawarkan siapa yang bersedia dan lebih memprioritaskan yang bekerja”. Ketika awal 2012 program ini ditawarkan kepada warga Mukim Lamteuba, Hendrajid menjelaskan justru yang terjadi mereka tidak mengetahui sama sekali apakah nilam itu, “Ketika kita tawarkan menanam Nilam, itu *blank* apa nilam?”. Padahal Ari menyatakan tanaman nilam sudah lama direncanakan menjadi tanaman pengganti bagi warga Mukim Lamteuba, “Kalau nilam kan kita udah rencana dari waktu itu tapi kan nggak tahu sekarang dijalanin atau nggak. Jadi waktu kita itu udah berbagai macam jenis lah kita upayakan”, ujarnya.

Tayalis menggambarkan kondisi nilam di Mukim Lamteuba, bahwa pasar nilam sendiri di Mukim Lamteuba tidak ada, yang ada hanya lahan nilam. Kalaupun kita memproduksi nilam maka saat panen kita harus berjalan selama 7 jam, karena letak pasarnya ada di Meulaboh. Kalaupun di Mukim Lamteuba ada tempat penampungan, diambil oleh pengepul dengan 1 truk, muatannya hanya dua karung, makanya tidak mungkin untuk diambil. Kondisi yang saat ini di Mukim Lamteuba seperti itu. Seperti yang digambarkan tayalis:

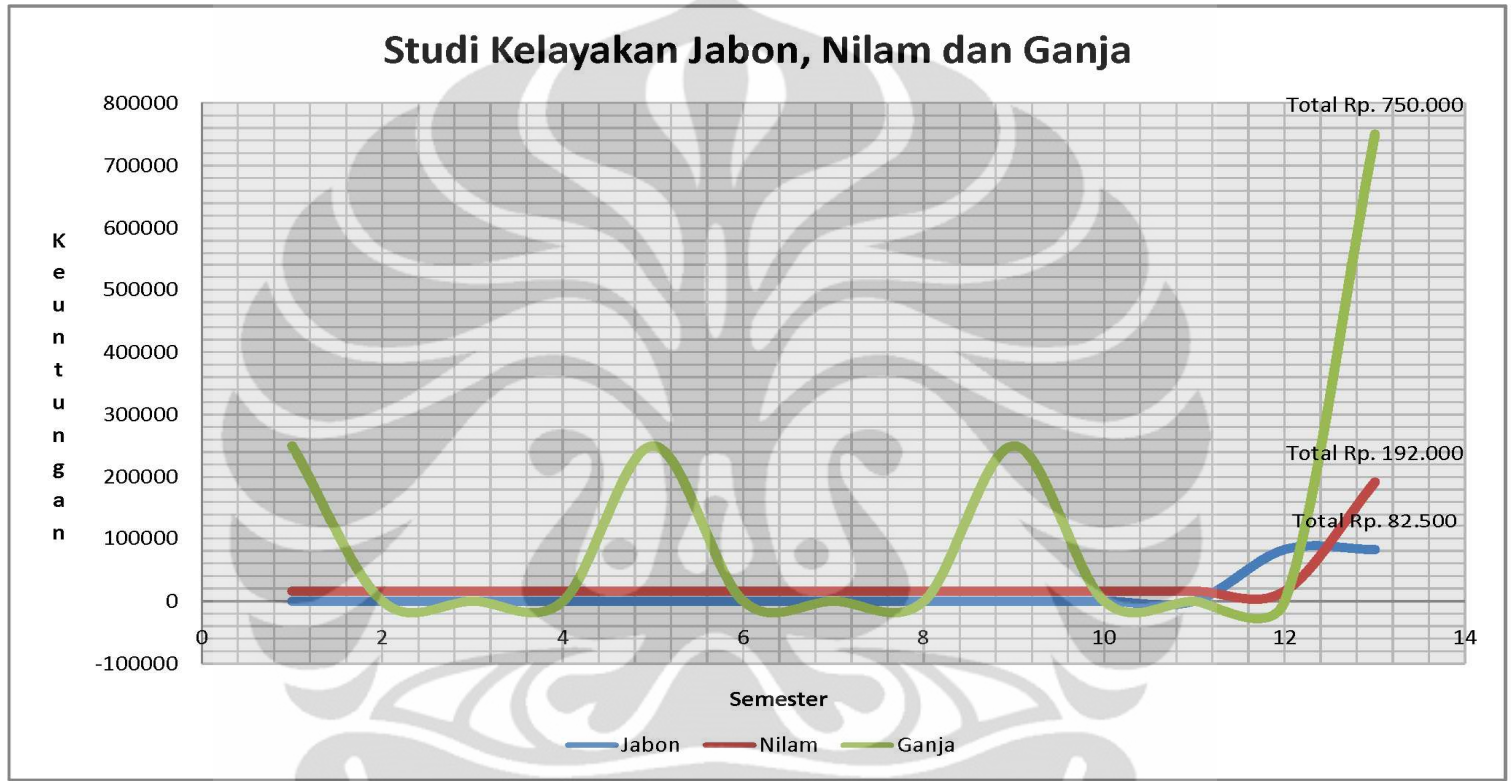
iya, kalo seandainya kayak nilam tuh kan kalo di pasar kan didaerah sini emang engga ada, ada tempatnya Pak Ridwan tapi itu cuma tempat produksinya aja, kalo seandainya pemasarannya nanti dia yang cari tau sendiri, mau dibawa kemana nanti hasilnya, biasa anaknya tuh dibawa ke meulaboh. Jauh dari sini sekitar 7 jam, kalo seandainya 1 hektar tuh kan

sedikit seandainya kita punya tempat penampungan nilam itu tanggung kan, orang itu gak bakalan ambil. Paling sedikit kalo ambil 1 truk kalo seandainya jauh, ini gak mungkin kan 7 jam perjalanan kayak gitu disini Cuma ngambil 2 karung

Jika merujuk pada data di atas, akan terlihat bahwa perbandingan harga jual dan keuntungan yang didapatkan petani memiliki jarak yang cukup jauh. Hal ini justru akan menciptakan keengganan untuk mengikuti program yang direncanakan oleh BNN. Peneliti mencoba untuk melakukan analisis perbandingan dari ganja, jabon dan nilam.

Ganja memiliki ciri dalam penanamannya selama 6 bulan. Setelah panen maka masyarakat akan berhenti menanam selama 18 bulan (**Diagram 5**). Sekali panen maka petani akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 250.000.000,-. Saat program *alternative development* ini dilaksanakan maka, masa panen petani ganja bisa tiga kali panen. Keuntungan yang akan dirasakan oleh sebesar Rp. 750.000.000,- (**Tabel 5.4**).

Nilam memiliki ciri dalam penanamannya selama 6 bulan. Setelah panen pertama maka dapat dilakukan penanaman lagi dan dan panen pada semester berikutnya, proses ini terus beulang-ulang. Jika mengikuti waktu panen jabon maka, petani nilam dapat memanen sebanyak 12 kali. Jika sekali panen petani mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 16.000.000,-, maka yang akan dirasakan manfaat keuntungannya sebesar Rp. 192.000.000,-. Total keuntungan nilam akan ditambah dengan total keuntungan jabon, hasilnya sebesar Rp. 274.500.000,-, sehingga dihasilkan selisih keuntungan antara jabon, nilam dan ganja sebesar Rp. 475.500.000,- atau sekitar Rp. 80.000.000,- tiap tahunnya per petani legal.



Sumber: diolah kembali dari data primer, 2012

**Diagram 5 Studi Kelayakan Jabon, Nilam dan Ganja**

Tabel 5.4 Analisis Kelayakan Jabon, Nilam dan Ganja

Waktu Jenis	Tahun I		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		Keuntungan
	Smtr I	Smtr II	Smtr I	Smtr II	Smtr I	Smtr II	Smtr I	Smtr II	Smtr I	Smtr II	Smtr I	Smtr II	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Ganja</b>	Panen				Panen				Panen				Rp 750.000.000
<b>Jabon</b>												Panen	Rp 82.500.000
<b>Nilam</b>	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Rp 192.000.000
<b>Total Keuntungan Jabon + Nilam</b>													Rp 274.500.000
<b>Selisih Keuntungan Ganja – (Jabon + Nilam)</b>													Rp 475.500.000

Sumber: data primer, 2012

Nb.:

Jika keuntungan yang didapatkan oleh Petani yang menanam Jabon dan Nilam sebesar Rp.274.500.000,- sedangkan petani yang menanam ganja sebesar Rp. 750.000.000,-, maka :

Selisih tanaman ilegal dengan legal =

$Rp. 750.000.000 - Rp. 274.500.000 = Rp. 475.500.000,-$  atau  $Rp. 79.250.000 / \text{tahun}$

Untuk mencukupi kebutuhan petani sebesar Rp. 475.500.000,- maka pemerintah dalam hal ini BNN dapat memberikan subsidi sebesar kepada mereka. Besar subsidi  $Rp. 475.500.000 \div 72 \text{ bulan} = Rp. 6.600.000,-/\text{petani}$ .



Dari hasil perhitungan di atas, dalam mencukupi kebutuhan harian petani legal, maka pemerintah dapat memberikan subsidi. Nilai subsidi yang harus diberikan kepada petani legal sebesar Rp. 6.600.000,-/bulan atau sekitar Rp. 80.000.000,-/tahun. Hal ini seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia dalam memberantas dan mencegah peredaran gelap kokain. Sanchez, Kraybill dan Thompson (2003: 382) mendeskripsikan bahwa *in Colombia, direct subsidies or lump sum transfers to farmers shifting from coca to other crops should be considered*. Negara Kolombia memberikan subsidi kepada petani yang beralih profesi sebagai petani kokain ke pertanian lain.

Jika merujuk pada perbandingan antara tanaman jaboro, nilam dan ganja di atas maka rencana BNN untuk mengganti tanaman ganja ke tanaman jaboro dan nilam hasilnya bisa jadi berjalan. Akan tetapi, tidak *feasible* untuk diterapkan kepada warga Mukim Lamteuba, khususnya petani ganja. Hal ini dikarenakan, keuntungan yang diperoleh petani yang telah beralih profesi, tidak sebanding dengan ketika mereka menanam ganja. Jika harus dipaksakan untuk ditanam warga Mukim Lamteuba maka yang terjadi hanya formalitas penyelenggaraan program saja tetapi tujuan dari program *alternative development* tidak tercapai.

Di samping itu, jika melihat pada kemampuan anggaran negara, maka BNN selaku pelaksana program juga tidak mungkin untuk memberikan subsidi sebesar Rp. 80.000.000,- tiap tahunnya kepada seorang petani ganja. Hal ini disebabkan, pemerintah memiliki batas anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya. Berbeda kasus dengan apa yang dialami oleh Kolombia, mereka selalu diberikan bantuan untuk memerangi pemberantasan narkoba dari kemampuan anggaran itu sendiri maupun dari Amerika.

*...large amounts of money have been spent on coca eradication, crop substitution, and interdiction (interception) of cocaine supply. Approximately spent US\$113 million was spent on aerial spraying of coca in Colombia during 1994–2000. In 2000, the US government approved a two-year budget of US\$860 million in support of Plan Colombia, the main objective of which is to reduce drug production and trafficking. Sanchez, Kraybill dan Thompson (2003: 376)*

Sangat besar uang yang dikeluarkan untuk pemberantasan kokain, alih fungsi tanaman, dan pengintaian terhadap *cocaine supply*. Di Kolombia sejak tahun 1994-2000 diperkirakan sekitar US\$113 juta dikeluarkan untuk membasmi perdagangan kokain. Pada tahun 2000, pemerintah US mendukung rencana pemerintah Kolombia dalam memperkecil produksi dan perdagangan gelap narkoba sekitar US\$860 juta.

Rencana program yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia yang disebut dengan *Plan Nacional de Desarrollo Alternativo* (PLANTE). PLANTE yang dikerjakan sampai 1998, merujuk dari program *alternative development* dengan cara memberantas tanaman koka. Tanaman koka diberikan zat kimia agar mati atau tidak tumbuh kembali di areal tersebut. Garcia (2003: 279) menjelaskan:

*Until 1998, the anti-drug strategy of the Colombian government consisted mainly of eradicating crops--either by fumigating or by the alternative development program known as PLANTE (Plan Nacional de Desarrollo Alternativo)--as well as confiscating drugs being exported and chemicals used for processing them.*

Rencana ini menjadi sinyal bahwa program ini berhasil sukses dilaksanakan. Pemerintah berkeyakinan bahwa alih fungsi tanaman ke tanaman lainnya yang didukung oleh masyarakat setempat ataupun dengan cara mematikan tanaman koka dengan zat kimia merupakan cara efektif dalam memberantas narkoba. Hal ini memberikan tanda kepada petani koka agar tidak membuka lahan baru di tempat lainnya. Kirk (2005: 133) menjelaskan *effort to eradicate crops which has been basically fostering the disguise of coca plantations, the intertwining of coca crops with other crops, and the continuous displacement of coca cultivations to new lands.*

Di balik kisah sukses ini, ternyata terdapat motivasi tersembunyi pemerintah Amerika. Stokes (2005: 28) menjelaskan *there are two main reasons why does the US support Colombia state: to create stability for continued inward investment and to sustain resource extraction.* Apa yang dilakukan pemerintah Amerika untuk mendukung rencana Kolombia, atas dasar dua hal yang pertama

untuk stabilitas investasi mereka dan yang kedua karena memperbaharui sumber pendapatan dari industri ekstraktif. Hal ini yang menjadi motor kesuksesan dalam memberantas narkoba di Kolombia.

Kesuksesan ini juga yang menjadi tanda tanya besar dalam catatan Steiner (1998: 1013):

*Colombia has been considered, together with Chile, as the most successful Latin American economy during the last two decades. Some have suggested that this country's relative economic success is closely associated to the fact that it has routinely appropriated huge amounts of resources through its involvement in the illegal drug trade.*

Kolombia bersama Chili menjadi kisah sukses ekonomi di Amerika Latin selama dua dekade. Beberapa asumsi dimunculkan yaitu bahwa suksesnya perekonomian ini didapatkan dari hasil penjualan narkoba, sehingga pemerintah mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

Kembali kepada Indonesia, bahwa terkait dengan rencana program jabolon dan nilam sebagai pengganti pendapatan dari hasil ganja maka kemungkinan besar tidak *feasible* untuk dilaksanakan. Rencana ini bisa dilakukan asalakan ada subsidi maupun bantuan luar negeri terhadap petani ganja. Hibah atau Bantuan Luar Negeri (BLN), mungkin bisa saja diberikan tetapi *labeling* dunia terhadap ganja yang digolongkan sebagai *soft drugs*, merupakan perjuangan yang sangat berat untuk mendapatkannya.

Rapat internal yang diadakan terkait dengan rencana BNN untuk alih fungsi lahan karena warga menginginkan kejelasan tentang program *alternative development* yang akan dilakukan oleh BNN dengan menanam nilam dan jabolon. Jangan sampai kejadian menanam jagung terulang kembali. Kalau tidak ada kejelasan dalam program yang dilaksanakan maka masyarakat tidak akan mengikuti program tersebut.

Masyarakat sudah antipati terhadap program bantuan khususnya yang dilaksanakan oleh BNN tahun 2008 yang dijalankan oleh MFLF, Thailand. Hal tersebut membuat *barrier* bagi program-program bantuan lainnya yang akan

masuk ke Lamteuba. Seperti yang akan dilaksanakan oleh BNN tahun 2012 ini. Warga Lamteuba membutuhkan kejelasan tentang program bantuan jaban dan nilam itu sendiri, berapa jumlah dana yang diberikan atau berapa jumlah bibit yang dikasih. Seperti yang diungkapkan oleh Tayalis:

orang pemukin Lamteuba ini kan nolak, sekarang kepikiran kaya berbelit-belit itu masalahnya. Masyarakat itu perlu ketegasan, kalo seandainya dana bantuan ke Lamteuba tuh berapa, sistem kerjanya tuh kayak gimana, itu yang perlu dijelasin ke masyarakat. kalo seandainya sekarang dananya untuk bantuan belum jelas tapi bakalan dibantu, itukan cuma omongan, dana aja engga ada gimana mau bina masyarakat? kalo seandainya ada bantuan mau ambil apa engga itu musyawarah semua kecil dulu, kalo seandainya kita ambil bantuan itu ya kita ambil, kalo seandainya udah sepakat engga ambil ya engga usah ambil kayak gitu.



Sumber: observasi, 2012

**Gambar 5.14 Rapat Internal 29 Mei 2012 Membahas Program Nilam dan Jabon Ditengahi oleh Camat Seulimeum**

### **5.5 Focus The Evaluation**

Pada Sub Bagian *Focus The Evaluation*, peneliti membahas mengenai Kesesuaian Rencana dan Jadwal Program, Kesesuaian Tujuan Program, dan *Capacity Building*.

### 5.5.1 Keseuaian Rencana dan Jadwal Program

Program *alternative development* yang sudah dijalankan selama enam tahun, semestinya sudah menampakkan hasil bagi masyarakat, khususnya warga di Mukim Lamteuba, Kec. Seulieum, Kab. Aceh Besar, NAD. Pasalnya, sejak awal pembentukan program *alternative development*, program ini sudah dirancang dengan baik sampai tahun-tahun berikutnya. Seperti yang dijelaskan oleh Ari Lispriyanto, bahwa pada tahap awal perumusan program *alternative development*, pelaksana program sudah merancang setiap tahap yang harus dilakukan. Hal ini mengindikasikan ketika tingkat kepemimpinan berubah maka sudah ada sistem yang berjalan tanpa harus membuat kembali.

Yang pasti kita tetap mengacu pada acuan yang telah kita buat. Kita punya kalender. Rencana kegiatan *alternative development* sampai tahun 2015. Kita acuannya sebenarnya ini. Ini yang sudah diajukan ke Bappenas. Ngapain aja sih, anggaran ini digunakan di tahun ini untuk apa aja.

Perencanaan ini yang menjadi cita-cita dasar dalam pelaksanaan program *alternative development*. Menurut Ari, perencanaan yang diketahui oleh Bappenas adalah perencanaan yang dirancang oleh tim *desk* alternatif periode 2006-2008, sedangkan untuk yang sekarang dia berujar tidak mengetahuinya. Ari menjelaskan, faktor yang membantu Bappenas dalam mendukung program *alternative development* di NAD karena diplomasi yang dilakukan oleh ketua tim *desk* alternatif. Hal ini menyebabkan, program tersebut disetujui oleh Bappenas dan dijadikan sebagai *blue print* perencanaan.

Tapi yang jelas dari pihak Pemerintah sendiri khususnya Bappenas sangat mendukung karena kan kebetulan pada saat itu juga sekretaris, orang kepercayaan Bappenas itu masih saudara juga dengan Pak Awil

Berdasarkan perencanaan program *alternative development* (**Tabel 5.5**) yang tertuang dalam *grand design*, peneliti mencoba membagi bahasan evaluasi program dalam dua kelompok, yaitu beberapa yang dijalankan dan beberapa yang

belum dijalankan. Pembagian kelompok ini mengacu dari grand design yang dibuat oleh tim *desk* alternatif.

**Tabel 5.5 Grand Design Program Alternative Development**

No	Kegiatan	Tahun							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Persiapan & perencanaan program AD (1 thn)								
	a. Pertemuan intersektor, seminar, workshop (1 thn)								
	b. Tanah, tanaman pengganti, studi pasar dan ekonomi yang dilaksanakan & eksperimen (2 thn)								
	c. Studi sosial dan budaya (2 thn)								
	d. Penilaian Infrastruktur (2 thn)								
2	Penanaman kanabis gelap, survei wilayah, pengawasan & pemusnahan (3 thn)								
	a. Survei wilayah & pemetaan (3 thn)								
	b. Pengawasan tanah & operasi pemusnahan (3 thn)								
3	Penegak Hukum								
	a. Penegak hukum <i>capacity building</i>								
	b. Pengawasan dan investigasi								
	c. Tuntutan								
	d. Keputusan pengadilan dan penahanan								
4	Kampanye & komunikasi informasi dan edukasi (KIE) anti ganja								
	a. Kampanye dan KIE melalui media massa (2 thn)								
	b. KIE dan kampanye anti kanabis melalui media interpersonal (3 thn)								
	c. Sosialisasi AD (1 thn)								
5	Pengembangan pertanian (3 thn)								
	a. Pelatihan pertanian untuk para petani (20 klmpk)								
	b. Pelatihan perikanan dan keahlian lain yang mendatangkan uang (5 klmpk)								
	c. Persediaan bibit (3 thn)								
	d. Bimbingan dan pengawasan (3 thn)								
6	Pembangunan infrastruktur (3 thn)								
7	Pembangunan daerah pedesaan terintegrasi								
8	Dukungan manajemen dan administrasi AD (10 thn)								

Sumber: diolah kembali dari dokumen Ahwil Lutan, 2007

### 5.5.1.1 Program *Alternative Development* yang Sudah Dijalankan

Pola yang diterapkan pada periode 2006-2008 adalah dengan cara memberikan kebebasan kepada warga Mukim Lamteuba untuk menanam apapun, asalkan bukan ganja. Akan tetapi, hal ini tidak diimbangi dengan studi kelayakannya dari tanaman yang diinginkan. Hasil dari periode ini, tidak ada tanaman yang menjadi unggulan program sehingga tanaman terus menerus berganti tapi tidak menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Tanaman alternatif ditentukan sendiri oleh warga, sedangkan pemerintah hanya memberikan dana dan bibitnya saja. Seperti yang dijelaskan oleh Ari Lispriyanto:

“Pak kita nanam kopi”, ya kita coba dulu, kan tinggal koordinasikan dengan perkebunan atau pertanian. “Itu masyarakat pengen nanam kopi gimana nih?”. Pokoknya antara tahun itu kita sudah coba nanam semua. Tapi nggak tahu nggak ada kabar dan ceritanya lagi. Kita ganti buah naga. Lalu, nggak ada ceritanya lagi, Nggak ada ceritanya lagi itu dalam kurun waktu selama kita tahap pertama itu.

Klimaksnya dari program *alternative development* pada periode 2006-2008, ditetapkan jagung sebagai tanaman alternatif pengganti ganja. Program yang bekerja sama dengan Thailand ini juga tidak ada studi kelayakannya (**Gambar 5.15**). Penanaman jagung ini berbuah kekecewaan bagi warga Lamteuba sehingga membuat warga Lamteuba antipati terhadap program bantuan lagi.

Pada tahun 2008, BNN bekerjasama dengan *Non-Government Organization* (NGO) Thailand untuk memberikan bibit jagung dan mendampingi warga Mukim Lamteuba dalam penanaman jagung dengan masa panen 3 bulan. Bibit jagung yang diberikan adalah bibit jagung pakan ternak, bukan bibit jagung manis. Warga di Mukim Lamteuba juga merasakan kekecewaan, dengan jagung ternak bisa menjadi petani kaya.

Gubernur NAD terpilih, Irwandi Yusuf menyakinkan kepada warga bahwa menanam jagung akan menghasilkan pendapatan yang dijelaskan oleh pelaksana program. Akhirnya, warga Mukim Lamteuba tidak ada yang menanam padi, mereka hanya menanam jagung saja. Keanihan warga mulai muncul ketika pasar

dari hasil panennya nanti tidak ada yang akan nemampung ataupun membeli hasil panen jagung warga Mukim Lamteuba. Warga mulai gusar dengan kondisi tersebut.

Bukan untung yang didapat, namun kerugian yang diderita oleh mereka. Ketika masa panen, jagung tersebut tidak ada yang membeli disebabkan tidak ada pasar yang mendukung. Jagung tersebut busuk karena tidak ada yang membeli dan dibiarkan begitu saja. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi mereka dan menganggap bahwa program bantuan yang diberikan itu hanyalah sandiwara dari pemilik program saja.

Seperti yang diungkapkan oleh Abi, “mengecewakan. Jagung. Suruh tanam jagung dari petani. Akhirnya hasil mau dibawa kemana? Ga ada yang jemput, ini semua jagung ayam. Kalo jagung ayam itu mau dibawa kemana? Itu sudah kecewa”. Abi menjelaskan pula, walaupun memang pemerintah memiliki program dan hanya mengejar laporan saja, warga Lamteuba juga mau membantu bersandiwara dibandingkan harus memaksakan program yang telah ditetapkan. Seperti yang diutarakan Abi, “Memang itu kalo sudah sandiwara semua, ya sandiwara aja kasih aja kulitnya. Kita mau sandiwara, kalo Lamteuba itu main apa main apa. Saya tau, semua tahu. Gerak gerik mereka saya tahu”.



Sumber: dokumen Ari Lispriyanto, 2008

**Gambar 5.15 Lahan dan Hasil Panen Jagung Program *Alternative Development* Periode 2005-2008, Mukim Lamteuba, Aceh Besar**

Tayalis menambahkan bahwa kekecewaan warga Lamteuba itu karena dulu di Lamteuba semua ditanam jagung. Semua masyarakat Lamteuba disuruh



menanam jagung sampai tidak ada yang menanam padi. Pada saat itu, diiming-imingi bahwa warga akan sukses jika menanam jagung maka mereka patuh untuk menanam jagung. Masyarakat tidak mengetahui alasan pemberian bibit yang bukan merupakan jagung manis, melainkan jagung pakan ternak/ayam.

Saat masa panentiba, pihak penyelenggara tidak ada yang bertanggung jawab. Warga Mukim Lamteuba justru ditinggal dan tidak ada pasar yang mau membeli jagung mereka diarenakan selain akses jauh, ternyata komoditas jagungnya juga rendah. Hasil panennya pun bukan merupakan jagung layak konsumsi yang digunakan untuk makanan sehari-hari, sehingga menambah kekecewaan warga. Seperti yang diungkapkan Tayalis:

Dulu dikasih benih jagung, jagung tuh berapa puluh hektar, semuanya ditanam di sawah sampe-sampe orang Lamteuba tuh gak nanem padi, desa ini dijanjiiin kaya gitu sampe kepenampungnya, sampe perawatannya juga sampe pemasarannya juga ditanggung. Waktu udah siap panen, kan masyarakat kebingungan, dilaporin ini jagung udah siap panen, kita panennya kayak gimana? makanya kecewa, ekarang banyak masyarakat Lamteuba tuh gak pernah lagi nerima bantuan program kayak gini khususnya yang kurang jelas gitu, kayak sekarang.”

Kejadian yang membekas seperti ini yang pada akhirnya membutuhkan solusi yang tepat yang harus dicari oleh pemerintah. Padahal sejak awal dilangsungkannya program ini, berbagai macam jenis tanaman yang dikembangkan di Mukim Lamteuba tetapi tidak ada satupun yang berhasil dikembangkan di sana. Hal ini juga yang membuat warga Mukim Lamteuba kurang bersemangat dengan program yang dilaksanakan oleh BNN. Seperti yang dijelaskan oleh Ari Lispriyanto bahwa sudah berbagai macam tanaman yang telah diupayakan, “udah berbagai macam jenis lah kita upayakan. Mulai dari kita minta benihnya, pertanian, perkebunan. Pohon-pohon kita minta kehutanan”. Sampai saat ini belum menampakkan hasil.

Melalui **Gambar 5.16**, dapat diketahui bahwa sejak 2008 sudah ditanam bermacam tanaman, akan tetapi saat ini tanaman tersebut sudah tidak ada. Saat ini warga Lamteuba menginginkan kejelasan dari program yang akan dilaksanakan

oleh BNN tahun 2012. Mereka tidak menginginkan apa yang terjadi pada tahun sebelumnya (program alih fungsi lahan jagung) terulang kembali. Rencana alih fungsi lahan menjadi jabon dan nilam harus dijelaskan teknis bantuan.



Sumber: dokumen Ari Lispriyanto, 2008

**Gambar 5.16 Lahan yang Digunakan untuk Program *Alternative Development* Periode 2005-2008, Mukim Lamteuba, Aceh Besar**

Fenomena yang menarik untuk dibahas ketika program yang sudah berlangsung lama tetapi belum juga menampakkan hasilnya. Seperti yang dikatakan oleh Tayalis maka peneliti mencoba menggarisbawahi bahwa program yang dibuat ini hanya sebatas kuat untuk di atas kertas saja tetapi tidak memiliki dasar dan analisis yang seharusnya dilakukan sebelum melaksanakan program. Seperti yang diungkapkan oleh Ari, “Jadi gini lho tipenya, saya belajar dari pak Ahwil, senengnya membuat. Membuat dari yang tidak ada menjadi”.

#### **5.5.1.2 Program *Alternative Development* yang Belum Dijalankan**

Program *Alternative Development* yang belum dijalankan oleh BNN pada periode tahun 2006 hingga tahun 2011 cukup banyak, mulai dari penegakan hukum, pengembangan pertanian, pembangunan infrastruktur, pembangunan daerah pedesaan terintegrasi, serta dukungan manajemen dan administrasi *alternative development*. Penyebab mengapa program tersebut tidak dijalankan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan yaitu karena pergantian kepemimpinan dari program *alternative development* dan penyesuaian zaman. Seperti yang dikatakan oleh Ari:

Bisa Faktor politis pergantian kepemimpinan atau juga mungkin setelah kita yang sekarang ini juga sudah menyesuaikan dengan keadaan yang baru di sana juga. Bisa juga. Kan belum tentu keadaan jaman saya dengan jaman sekarang itu sama.

Perubahan kepemimpinan dan zaman menjadi faktor penentu dari jalannya program *alternative development*. Harsono (2010: 56) menjelaskan peran pemimpin atau kepemimpinan menjadi semakin penting dalam organisasi yang tumbuh semakin rumit dewasa ini. Hal ini memberikan isyarat bahwa peran kepemimpinan dalam pelaksanaan program *alternative development* juga penting. Seperti yang dijelaskan oleh Ari Lispriyanto:

Mungkin di sana juga sudah ada pergantian pimpinan di level mana. Kaya sekarang aja kita balik, dulu jamannya Pak Wil gimana, setelahnya gimana. Sama seperti dulu jamannya gubernur Pak Irwandi sama bawahannya, kadis-kadisnya masih itu nggak, care nggak dia.

Peran dari seorang pemimpin yang kharismatik, yang juga mempengaruhi dari jalannya program *alternative development* di periode sebelumnya. WawoRuntu (2003: 72) menjelaskan para pengikut membuat atribut pada pemimpin yang heroik atau yang memiliki kemampuan yang luar biasa yang mereka amati dan dapati, sehingga perumusan kebijakan seringkali bermasalah. Hal tersebut yang berdasarkan pengamatan peneliti terjadi pada perencanaan hingga pelaksanaan program *alternative development* di Mukim Lamteuba. Di samping perubahan kepemimpinan, juga dipengaruhi perubahan zaman atas pelaksanaan program. Seperti yang dijelaskan oleh Ari Lispriyanto:

kalau mereka mengacu pada program kerja yang udah kita buat pada waktu itu, harusnya tidak ada perubahan karena ini yang sudah kita sampaikan ke Bappenas. Masalahnya itu. Nah yang sekarang ini di luar jalur itu saya nggak ngerti nih.

Melihat kondisi saat ini, dapat dikatakan bahwa program *alternative development* belum bisa dikatakan belum berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal. Pasalnya, berdasarkan hasil temuan lapangan dengan membandingkan teori yang digunakan, *alternative development* belum memberikan apa-apa kepada warga Mukim Lamteuba. Jika membandingkan berdasarkan periodisasi pelaksanaan program *alternative development* (Bab 4), maka akan jelas apa yang telah dihasilkan setiap periodenya.

Pada periode 2005-2008, program ini dibangun sebagai upaya mereduksi tingkat penanaman ganja di Aceh. Namun, patut disayangkan di tahun terakhir dari periode ini justru muncul kekecewaan dari masyarakat. Kekecewaan itu karena tanaman alternatif yang ditanam oleh masyarakat adalah jagung asin yang dikhususkan untuk pakan ternak sedangkan pasar di sana tidak ada. Hasil dari periode ini adalah kekecewaan masyarakat yang dibawa sampai saat ini. Lalu muncul peta periode baru.

Periode 2009-2010, tata-tata organisasi dari program pemberdayaan alternatif dalam proses transisi. Hal ini disebabkan proses pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan, program yang dilaksanakan di Lamteuba, Aceh Besar kurang diberikan perhatian. Bentuk struktural yang baru justru menyebabkan *transfer knowledge* tidak terjadi. Pelaksana program justru bingung terhadap apa yang harus dilakukan. Pasalnya, pelaksana program pada periode sebelumnya tidak ada satupun yang ikut atau dengan kata lain tidak dicantumkan nama mereka dalam struktur.

Setelah itu muncul lagi periode 2011-2012. Program pada periode ini terlihat kurang sekali kemampuan menekan kepada masyarakat di Mukim Lamteuba. Hal tersebut terjadi lantaran terdapat kekecewaan terhadap program bantuan pemerintah khususnya pemberdayaan masyarakat yang dikarenakan lahan program alih fungsi lahan jagung tadi. Hal ini menyebabkan, pelaksana program harus mengulang dan membangun kepercayaan lagi dari awal. Di samping itu, pelaksana program juga hanya *top-down*, memaksakan kepada petani yang turut serta dalam programnya untuk menanam jaban dan nilam.

### 5.5.2 Keseuaian Tujuan Program

Merujuk apa yang dijabarkan oleh Rerkasem dalam Sanong (2002: 21) tentang tujuan dari *alternative development* bahwa *alternative development* ada sebagai upaya untuk menekan angka *supply drug production*, *alternative development* yang dilaksanakan oleh BNN belum sama sekali mencapainya. Walaupun sempat merubah profesi masyarakat menjadi petani jagung tetapi justru menjadi boomerang bagi BNN karena kekecewaan mereka terhadap pelaksanaan program yang tidak jelas muaranya. Hal ini menyebabkan mereka lebih memilih untuk menanam ganja dan tidak mau menerima bantuan lagi khususnya bantuan yang tidak jelas.

Selain itu, tujuan adanya *alternative development* menurut Rerkasem dalam Sanong (2002: 21) dapat merubah profesi masyarakat yang ilegal ke legal secara hukum dan mensejahterakan. Rerkasem dalam Sanong (2002: 21) menurunkan indikator lainnya, seperti pendapatannya selama ini menanam ganja dapat beralih ke tanaman lainnya; menjamin keamanan untuk tidak terjadi penangkapan terhadap petani yang belum alih profesi; mendukung jalannya organisasi pertanian di daerah setempat; meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat; menyebarkan kesuksesan dari program yang dilaksanakan ke daerah lain; serta pemberdayaan komunitas terhadap anti narkoba.

Berkaca dari apa yang dipetakan oleh tim BNN dengan membandingkan dengan teori yang dijelaskan Rerkasem maka bisa dijelaskan bahwa belum terlaksananya program *alternative development* di Lamteuba, Aceh Besar. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan strategi yang diterapkan oleh BNN untuk mensukseskan program tersebut.

### 5.5.3 Capacity Building

Visi yang ingin dicapai pada program *alternative development* adalah pembangunan yang bebas narkoba, sejahtera, mandiri dan keberlanjutan. Konsep pemberdayaan yang diusung oleh deputi pemberdayaan masyarakat BNN, seperti dijelaskan oleh Hendrajid konsep bebas narkoba merupakan program jangka panjang, sejahtera merupakan kondisi mereka merasakan nyaman dengan pelaksana program karena diberikan uang. Lalu, konsep mandiri dengan

keberlanjutan yang masih menjadi suatu yang sulit untuk diukur. Seperti yang dipaparkan oleh Hendrajid,

Bebas narkoba itu jangka panjang, jangka menengah juga, jangka pendek juga. Sejahtera ini jangka pendek ini. Kita datang itu harus ada bukti yang buat mereka sadar oh iya, kalo bebas saya sejahtera. Sejahtera itu kita datang mereka dapat uang transport. Itu paling real berpikinya itu. Mandiri itulah yang sebenarnya kita masih sulit mengukurnya. Ukuran kita dan ukuran mereka beda. Keberlanjutan ini di kita beda dengan di luar.

Merujuk dari pendapat tersebut, peneliti berasumsi bahwa teori yang mengatakan bahwa pelaksana program dapat meningkatkan daya saing kelompok petani lamteuba maupun pemberdayaan komunitas untuk melawan narkoba merupakan tantangan bagi penyelenggara program. Hal ini dikarenakan, orientasi masyarakat terhadap program yang ditawarkan pemerintah lagi-lagi hanya didasarkan berapa bantuan yang akan diberikan.

Konsep bantuan program yang diberikan kepada warga Mukim Lamteuba sepertinya juga belum dilaksanakan dengan baik. Purwa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BNN itu dikerjakan tidak dipersiapkan dengan baik. Seperti halnya pemberian bantuan, sudah sepatutnya dilakukan supervisi atas bantuan yang diberikan, justru yang terjadi malah supervisi tidak diberikan. Hal tersebut diperparah dengan bantuan hanya dijadikan komoditas untuk membuang-buang anggaran negara.

pernah BNN kebanyakan ngasih ke masyarakat. Masalahnya gak ada supervisor, kalau *alternative development* kan itu harus ada orang yang mendampingi, yang mendampingi kontinu, membina, ada yang *handle* masalah. Nah ini ngga ada. Memang pada saat acara *training*, datang pendampingan selepas *training* tidak ada.

## **BAB 6** **SIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan program *alternative development* alih fungsi lahan ganja di Mukim Lamteuba, Aceh belum berjalan dengan baik. Ditinjau dari sub variabel *assess context*, program ini belum menunjukkan perencanaan yang matang yang dilakukan oleh penyelenggara program. Lalu, didasarkan kepada sub variabel *gather reconnaissance* diketahui bahwa objek dari program *alternative development* memiliki pola pikir yang berbeda dengan penyelenggara program. Hal ini justru didiamkan oleh penyelenggara program. Berdasarkan sub variabel *engage stakeholders*, dapat diketahui kondisi sosio-struktural di dalam Mukim Lamteuba itu sendiri maupun pemetaan terkait *stakeholder* yang dapat membantu perencanaan dan pelaksanaan program *alternative development*.

Berdasarkan sub variabel *describe the program*, diketahui bahwa rencana BNN dalam melakukan alih fungsi lahan ganja ke tanaman legal produktif (jabon dan nilam) bukanlah jalan yang terbaik. Pasalnya setelah dilakukan perbandingan antara ganja dengan jabon dan nilam, pemerintah harus memberikan subsidi kepada petani ganja setiap bulan. Berdasarkan sub variabel *focus the evaluation*, dapat diketahui bahwa kekecewaan terhadap program *alternative development* di tahun sebelumnya menjadi penghambat terlaksananya rencana program yang akan dilaksanakan kembali.

### **6.2 Saran**

Penyelenggara program sudah selayaknya mau memberikan subsidi kepada warga Mukim Lamteuba yang benar-benar mereka adalah seorang petani ganja. Jika bukan seorang petani ganja, maka program ini hanya sia-sia saja. Di samping itu, perhitungan yang dihasilkan dari penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pelaksana program dalam memperhitungkan biaya yang tepat.

Program *alternative development* yang dicita-citakan memiliki gebrakan dalam melakukan alih fungsi lahan dan alih profesi petani harusnya dikerjakan

sungguh-sungguh. Program pemberdayaan ini harusnya mampu bersinergi dengan program pemberdayaan lainnya, bukan berjalan sendiri-sendiri. Bentuk yang tepat yang harusnya dilakukan dari sekarang adalah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemberdayaan masyarakat. Hal ini akan membuka gerbang kemampuan untuk mensukseskan program yang direncanakan.

Jika memang program ini belum menghasilkan apa-apa di Mukim Lamteuba, sudah sepatutnya penyelenggara program memiliki data yang valid terkait dengan kegagalan program. Jangan menutup-nutupi kenyataan yang ada dengan menyatakan bahwa petani yang sudah beralih profesi sebanyak 100 orang atau lahan yang sudah beralih fungsi sebanyak sekian hektar. Hal ini akan menimbulkan kebohongan publik terkait dengan informasi yang tidak benar. Sudah sepatutnya, pelaksana program memiliki kesadaran diri dalam melaksanakan program dengan memberikan keterbukaan informasi yang sesungguhnya.

Pelaksanaan pelatihan dan kunjungan ke Mukim Lamteuba yang sering diundur-undur mencerminkan bahwa ketidakseriusan pelaksana program dalam melakukan program ini. Hal ini tercermin dari alasan tim pelaksana ketika melakukan pengunduran jadwal, bahwa alasan utama melakukan pengunduran jadwal adalah alasan pribadi pelaksana program. Sudah sepatutnya, pelaksana program meluruskan niat dalam mengerjakan program ini. Program ini dapat berjalan apabila tim merasakan apa yang dirasakan oleh warga Mukim Lamteuba bukan justru memaksakan kehendak dari setiap tindakan yang dilakukan.

Perlu dilakukan perubahan strategi untuk mensukseskan program *alternative development* di Mukim Lamteuba, Aceh Besar. Point yang dapat dilakukan tim BNN adalah dengan cara melakukan pemetaan terlebih dahulu jumlah petani ganja yang ada di dalam Mukim tersebut. Selain itu, melakukan studi atas kelayakan tanaman yang dapat menggantikan tanaman ganja yang ditanam oleh petani. Lalu, tim BNN dapat melakukan perkuatan terhadap sosial, politik dan ekonomi dari warga Mukim Lamteuba seperti yang dijelaskan oleh Rerkasem. Terakhir menciptakan keberlanjutan atas perogram yang telah berhasil dilaksanakan.



## DAFTAR REFERENSI

### **Buku**

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.

Alwasilah, Chaedar A.. *Pokok Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2002.

Badan Narkotika Nasional. *Jurnal P4GN 2010*. Jakarta: BNN, 2010.

\_\_\_\_\_. *Jurnal Data P4GN 2011*. Jakarta: BNN, 2011.

\_\_\_\_\_. *Profil Badan Narkotika Nasional*. Jakarta: BNN, 2011.

\_\_\_\_\_. *Rencana Strategi BNN 2011*. Jakarta: BNN, 2011.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. *Hasil Sensus Penduduk 2010: Data Agregat Per Kabupaten/Kota Provinsi Aceh*. Banda Aceh: BPS, 2010.

Bagong, Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Berg, C.. *Drugs and Development in Asia. A background and discussion paper. Division 4500*. German: Rural Development/Drugs and Development Programme GTZ, 1998.

Chinnanon, Sanong. *UNODC Regional Training Monitoring and Evaluation for Alternative Development Projects*. Thailand: International Center (IC), Chiang Mai University Chiang Mai 50200, 2002.

Chotim, Erna Ermawati dan Siti Aminah. *Skenario Aceh Masa Depan 2007-2017: Catatan Akademis atas Scenario Building*. Jakarta: LabSosio Pusat Kajian Sosiologi FISIP UI, 2009.

Creswell, Jhon W.. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 2<sup>nd</sup> ed.*. London: Sage Publications, Inc., 2003.

Daud, Darni M.. *Pembangunan Tahun 2020 Dihubungkan dengan Alternative Development dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dalam Jasman J*.

Ma'ruf, dkk.. *48 Tahun Universitas Syiah Kuala: Membangun Masyarakat Aceh 2020*. Jakarta: PT Pro Fajar, 2007.

Dale, Raedar. *Evaluation Development Programmes and Project 2<sup>nd</sup> ed.*. London: Sage Publications Inc., 2004.

Dwijowijoto, R.N., *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.

Dunn, W.N.. *Public Policy Analysis: An introduction, 2<sup>nd</sup> ed.* (terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 2000.

Grilly, David M.. *Drugs and Human Behavior 5<sup>th</sup> ed.*. Boston: Pearson Educational, Inc., 2006.

Hanson, Glen R., Peter J. Venturelli dan Annette E. Fleckenstein. *Drugs and Society 10<sup>th</sup> ed.*. London: Jones and Bartlett Publisher International, LLC, 2009.

Holden, Debra J. dan Marc Zimmerman. *Practical Guide to Program Evaluation Planning*. California: Sage Publications, Inc., 2009.

Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu–Ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006.

Jones, Charles O.. *An Introduction to Study of Public Policy*. Terjemahan Ricky Ismanto. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Kirk, Jerome dan Marc L. Miller. *Reliability and Validity in Qualitative Research*. California: Sage Publications, Inc., 1987.

Kramer, Tom. *An Assessment of The Impact of The Global Financial Crisis on Sustainable Alternative Development: Key Determinant Factors for Opium Poppy Re-cultivation in Southeast Asia*. New York: UNODC, 2010.

Kumar, Ranjit. *Research Methodology: A Step-By-Step Guide for Beginners*. London: SAGE Publication, 1999.

Langbein, Laura dan Claire Felbinger. *Public Program Evaluation: a Statistical Guide*. New York: M.E. Sharpe, Inc., 2006.

- Levinthal, Charles F.. *Drugs, Society, and Criminal Justice 2<sup>nd</sup> ed.*. Boston: Pearson Educational, Inc., 2008.
- Lincoln, Yvonna S. dan Norman K. Denzin. *The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues*. California: Sage Publication, Inc., 2003.
- Mansur, Irdika dan Faisal Danu Tuheteru. *Kayu Jabon Cetakan ke-3*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Mark, Melvin M., Garry T. Henry, dan George Julnes. *Evaluation: An Integreted Framework for Understanding, Guiding, and Improving Public and Nonprofit Policies and Program*. California: Jossey-Bass, Inc., 2000.
- Maykut, Pamela dan Richard Morehouse. *Beginning Qualitative Research: A Philosophic and Practical Guide*. Bristol: The Falmer Press, Taylor & Francis Inc., 1994.
- McKim, William A.. *Drugs and Behavior: An Introduction to Behavioral Pharmacology 6<sup>th</sup> ed.*. New Jersey: Pearson Education, Inc., 2007.
- Narayana, Dhira, Irwan M. Syarif dan Ronald C.M.. *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Neuman, W. Laurence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Aproaches 6<sup>th</sup> ed.*. Boston: Pearson Education, Inc., 2006.
- Nugroho D., Riant. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research and Evaluation Methods, 3<sup>rd</sup> Edition*. London: Sage Publications, 2002
- Posavac, Emil J. dan Raymond G. Carey. *Program Evaluation: Methods and Case Studies*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1980.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Redaksi Trubus. *Jabon Jagoan Kayu Produktif: My Potential Business*. Jakarta: Trubus Swadaya, 2010.

- Redaksi AgroMedia. *19 Peluang Investasi Kayu, Tanaman Perkebunan, dan Tanaman Buah Cet. 1*. Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2012.
- Renard, Ronald D.. *Mainstreaming Alternative Development in Thailand, Lao PDR and Myanmar: A Process of Learning*. New York: UNODC dan BMZ, 2007.
- Riduan. *Metode dan Teknik Menejemen Tesis*. Bandung: Alfabet, 2004.
- Sevilla, Consuello G., et. al.. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2001.
- Suharto, Edi. *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Sumarno, Agus dan Tim Redaksi Ketikbuku. *Sengon dan Jabon: Kayu Super Cepat*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2012.
- Supramono dan Sugiarto. *Statistika*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Taylor, Steven J. dan Robert Bogdan. *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings 2<sup>nd</sup> ed.*. New York: Jhon Wiley & Sons, Inc., 1984.
- Umar, Husein. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian: Aplikasi Dalam Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- United Nation Office for Drug Control and Crime Prevention. *Alternative Development in The Andean Area*. New York: UNODCCP, 2001.

\_\_\_\_\_. *Alternative Development: Sharing Good Practices Facing Common Problems*. Bangkok: UNDCP, 2001.

\_\_\_\_\_. *A Century of International Drug Control*. New York: UNODC, 2008.

\_\_\_\_\_. *Alternative Development: A Global Thematic Evaluation Final Synthesis Report*. New York: UNDCP, 2005.

Wholey, Joseph S., Harry P. Hatry, dan Kathryn E. Newcomer. *Handbook of Practical Program Evaluation 3<sup>rd</sup> ed.*. San Fransisco: Jhon Willey & Sons, Inc., 2010.

Yusuf, Farida. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

### **Jurnal**

Avenzora, Ricky. "Nanggroe Aceh Darussalam Menuju Provinsi Hijau: Peluang dan Tantangan." *Media Konservasi Vol. XI, No. 3* (2006): 115-123.

Curry, Susan J., Robin J. Mermelstein, Amy K. Sporer, dkk.. "A National Evaluation of Community-Based Youth Cessation Programs: Design and Implementation." *Evaluation Review* 34: (2010): 487-512.

French, Nick dan Laura Gabrielli. "Uncertainty and Feasibility Studies: an Italian Case Study." *Journal of Property Investment & Finance* 24 (2006): 49-63.

Garcia, Ricardo Rocha. "Drug Trafficking and its Impact on Colombia: An Economic Overview." *Canadian Journal of Latin American & Caribbean Studies* 28 (2003): 277-304.

Harsono, Ari. "Paradigma 'Kepemimpinan Ketua' dan Kelemahannya," *Makara, Sosial Humaniora Vol. 14* No. 1 (2010): 56-64.

Laenen, Vander, L. Vandam, B. De Ruyver dan D. Lievens Anderson. "Studies on Public Drug Expenditure in Europe: Possibilities and Limitation." *Bulletin on Narcotics Vol. LX* (2008): 27-44.

Mansfield, D.. "Alternative Development: The Modern Thrust of Supply-Side Policy." *Bulletin on Narcotics vol. LI, Nos. 1 and 2* (1999): 19-44

- Mansur, Irdika dan Surahman. "Respon Tanaman Jabon (*Anthocephalus cadamba*) terhadap Pemupukan Lanjutan (NPK)." *Jurnal Silviculture Tropika*, Vol. 03 No. 01 (2011): 71 – 77.
- Masur, Jonathan S. dan Eric A. Posner. "Against Feasibility Analysis." *The University of Chicago Law Review*, Vol. 77, No. 2 (2010): 657-716
- Moreno-Sanchez, Rocio, David S. Kraybill dan Stanley R. Thompson. "An Econometric Analysis of Coca Eradication Policy in Colombia." *World Development* Vol.31, No.2, (2003): 375–383.
- Nugroho, Bramasto. Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergilir Hutan Rakyat," *JMHT Vol. XVI (3)* (2010): 118–125.
- Pieterse, Jan Nederveen. "My Paradigm or Yours? Alternative Development, Post-Development, Reflexive Development." *Development and Change Vol. 29* (1998): 343-373.
- Prayogo, Dody. "Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development pada Industri Tambang dan Migas." *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 15, No. 1 (2011): 43-58.
- R. Kirk, FE. Thoumi. "The Colombian Puzzle: Drugs, Society, and Human Rights. Massacres, Drugs, and America's War in Colombia, Public Affairs.", *International Journal of Drug Policy* 16 (2005): 132–134.
- Ruhendi, Surdiding dan Erwinsyah Putra. "Sifat Fisis dan Mekanis Papan Partikel dari Batang dan Cabang Kayu Jabon (*Anthocephalus cadamba* Miq.)." *Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan* 4(1) (2011): 14-21.
- Pratiwi, Sudhiani. "Local Community Participation in Ecotourism Development: a Critical Analysis of Selected Published Literature." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. XII No. 2* (2006): 69-77.
- Schrag, Francis. "In Defense of Positivist Research Paradigms." *Educational Researcher*, Vol. 21, No. 5 (1992): 5-8.
- Sidu, Dasmin dan Basita G. Sugihen. "Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal Penyuluhan Vol. 3, No. 1* (2007): 11-17.
- Steiner, Roberto. "Colombia's Income from the Drug Trade." *World Development* Vol. 26, No. 6 (1998): 1013-1031.

Stokes, Doug. "America's Other War: Terrorizing Colombia." *Canadian Dimension* 39, 4 (2005): 26-28.

Urkiagaa, A., L. De las Fuentes, B. Bis, E. Chiru, B. Bodo, F. Hernández, T. Wintgens. "Methodologies for Feasibility Studies Related to Wastewater Reclamation and Reuse Projects." *Desalination* 187 (2006): 263–269.

Vargas, Ricardo. "Development Programs Strategies for Controlling the Drug Supply: Policy Recommendations to Deal with Illicit Crops and Alternative." *Journal of Drug Issues: Florida State University College of Criminology and Criminal Justice* 35 (2005): 131-150.

WawoRuntu, Bob. "Determinan Kepemimpinanmakara," *Sosial Humaniora Vol. 7* No. 2, (2003): 71-81.

**Surat Kabar dan Majalah:**

"2,8 Ton Ganja Disita dari dalam Truk." *Kompas* 16 Feb. 2012.

"111 Kg Ganja Aceh Gagal Masuk Ibu Kota." *Suara Pembaruan* 18 Feb. 2012: 14.

"Perlawanan Ladang Opium Menjadi Lahan Kopi." *Suara Pembaharuan*, 18 Feb. 2012.

Sinar ed. 4 – 2010

Sinar ed. 11, 2010

Sinar ed. XII – 2011

*Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian* Vol. 27, No. 1 (2005): 8

*Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian* Vol. 27, No. 2 (2005): 6

**Laporan Penelitian:**

BNN, Universitas Syah Kuala, IAIN Ar Raniry, Universitas Muhamadyah, Universitas Teuku Umar, Universitas Malikussaleh, dan Universitas

Samudera Langsa, *Laporan Akhir Survey Pemetaan Wilayah dan Area Ganja di Provinsi Aceh*, Banda Aceh, 2010.

**Wawancara:**

Hamdani. Wawancara Pribadi. 29 Mei 2012.

Kusnadi, Dik Dik. Wawancara Pribadi. 9 April 2012.

Lispriyanto, Ari. Wawancara Pribadi. 3 Mei 2012.

Lutan, Ahwil. Wawancara Pribadi. 2 Mei 2012.

Mahmudi, Anas. Wawancara Pribadi. 29 Mei 2012.

Muslim, Teuku. Wawancara Pribadi. 28 Mei 2012.

Soeleman, Evlyn. Wawancara Pribadi. 14 Mei 2012.

Sucahya, Purwa Kurnia. Wawancara Pribadi. 1 Juni 2012.

Tayalis. Wawancara Pribadi. 30 Mei 2012.

W., Hendrajid Putu. Wawancara Pribadi. 9 April 2012.

**Sumber Lainnya:**

Harris, Andra, 17 Februari 2012. <<http://news.lintas.me/go/situs.co/6-negara-penyalar-narkoba-terbesar-di-dunia/>>.

Erwin, 23 September 2011, <[http://obat2-an.infogue.com/let\\_us\\_study\\_adanya\\_manfaat\\_di\\_tanaman\\_ganja](http://obat2-an.infogue.com/let_us_study_adanya_manfaat_di_tanaman_ganja)>.

Haryanto, Andri. *Buah Tangan Doi Tung, Karya Lokal Menembus Dunia*. 2012. 16 Feb. 2012 <[detiknews.com](http://detiknews.com)>.

<http://www.method123.com/feasibility-study.php>

Wolfe, Lahlé. *What is a Feasibility Study? A Comprehensive Feasibility Study Supports Business & Marketing Plans* <<http://womeninbusiness.about.com/od/businessplans/a/feasibilitystud.htm>>



Hofstrand, Don dan Mary Holz-Clause. *What is a Feasibility Study?*,  
<<http://www.extension.iastate.edu/agdm/wholefarm/html/c5-65.html>>



## DARTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama lengkap** : Agung Suseno  
**Nama panggilan** : Seno  
**Tempat dan tanggal lahir** : Jakarta, 06 Mei 1987  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Agama** : Islam  
**Alamat** : Jl. Komplek Perdagangan RT 001/06 No 1-2  
 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara 14240  
**Telepon / HP** : (021) 452-7915 / 0856-1262262  
**Surat elektronik** : galas\_suseno@yahoo.com  
 agung.suseno@ui.ac.id  
**Motto hidup** : orang besar tidak pernah merasa dirinya besar  
**Hobi** : Membaca, memotret, dan olah raga tenis  
**Nama orang tua** : **Ayah** : H. Sriyono  
**Ibu** : Hj. Istiyani

### Riwayat pendidikan formal:

1990-1992 : TK HII Kelapa Gading Timur  
 1992-1999 : SD N 03 Pagi Kelapa Gading, Jak-Ut  
 1999-2002 : SMP N 123 Kelapa Gading, Jak-Ut  
 2002-2005 : SMA N 13 Rawa Badak, Koja, Jak-Ut  
 2005-2009 : Administrasi Negara, Universitas Indonesia

### Riwayat pendidikan informal:

Institusi	Level	Periode
LIA Kelapa Gading	Basic	2002 – 2003
LIA KelapaGading	Intermediate	2003 – 2005
LBI FIB UI	GE	2008 – 2009
Ma'had Al-Manar	MA	2009

### Penghargaan:

2003 : Siswa Bersih Transparan Provesional (BTP) dengan Pin siswa BTP Bulat.  
 2003 : Siswa Bersih Transparan Provesional (BTP) dengan Pin siswa BTP Oval.  
 2007 : Pemantau tingkat Sekolah dalam Kegiatan Tim Pemantau Independen Ujian Nasional tahun 2007 Provinsi DKI Jakarta.  
 2007 : Tim Survey Pemantau PILKADA DKI – Puskapol FISIP UI.

### Prestasi:

2007 : Finalis lomba Meringkas Buku How To Read a Book: Cara Jitu Mencapai Puncak Membaca.  
 2007 : Finalis lomba karya tulis mahasiswa bidang Pendidikan Tk. UI, *Sexual Education* sebagai pembentuk *Self Concept* bagi anak Tunarungu

- (Analisis SLB/B Panggudi Luhur Kebon Jeruk).
- 2008 : Finalis lomba karya tulis BPKP golongan I (Mahasiswa), Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Indonesia.
- 2008 : Finalis lomba karya tulis Bank Tabungan Negara golongan mahasiswa, UU Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyelesaian Sengketa Transaksi Keuangan pada Layanan SMS Banking.
- 2009 : Juara ketiga lomba menulis artikel HMJIA FISIP UI

